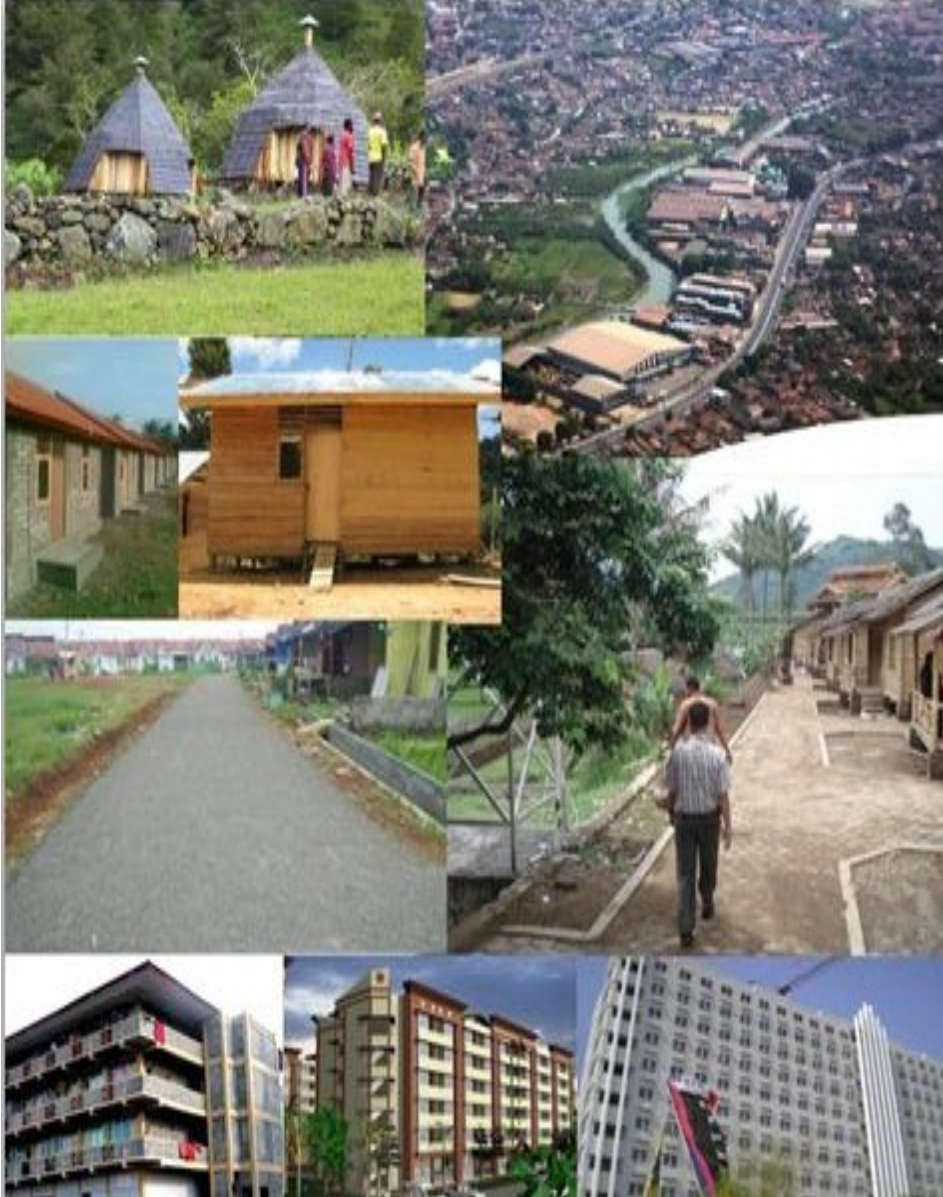




**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

BUKU SAKU

JAKARTA, OKTOBER 2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	v
I. KONTRAK KINERJA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	1
II. RPJMN 2010-2014	2
A. RPJMN 2010-2014 (Buku I)	2
B. RPJMN 2010-2014 (Buku II)	3
III. SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010-2014	4
A. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni dan didukung dengan PSU yang memadai	4
B. Fasilitas Lainnya.....	4
IV. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 A Tahun 2011).....	5
V. TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014.....	6
VI. PAGU ANGGARAN KEMENPERA (BA 091) MENURUT RPJMN 2010-2014 VS ALOKASI	7
VII. ANGGARAN KEMENPERA TAHUN 2011 DAN 2012 SESUAI RPJMN DAN DIPA.....	8
VIII. PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2011	10
IX. REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2011	11
X. PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2012	14
XI. SANDINGAN PAGU INDIKATIF DAN PAGU ANGGARAN KEMENPERA TA 2012 (BA 091).....	16
XII. PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2012.....	17
XIII. RINCIAN ALOKASI PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN 2012 (BA 091).....	18

XIV.	KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH TAHUN 20102	19
XV.	KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN ANGGARAN 2012.....	20
XVI.	KINERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011	21
XVII.	LAPORAN MONITORING INPRES TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2011 BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	23
XVIII.	KENDALA DAN LANGKAH PEMECAHAN	33
XIX.	ROAD MAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM 2020-2025.....	34
XX.	DIREKTIF PRESIDEN	35
	A. Rencana Aksi Terpadu Program Pro Rakyat Klaster IV	35
	B. Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat Klaster IV: Pembangunan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah.....	36
	C. Penanganan Rumah di Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste	37
	D. Sistem Deliveri Program Perumahan Pro-Rakyat	38
	E. Persiapan Rencana Aksi Terpadu Program Pro Rakyat.....	39
	F. Persiapan Pembangunan Rumah Murah	43
	G. Tim Teknis Pokja Rumah Sangat Murah.....	45
	H. Sebaran Rumah Sangat Murah Tahun 2012.....	50
XXI.	SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN.....	51
	A. Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan SMF	52
	B. Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan.....	53
XXII.	REFORMASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	54
	A. Latar Belakang Kebijakan Fasilitas Likuiditas	55
	B. Kerangka Kerja Fasilitas Likuiditas	55
	C. Tahapan Proses Terobosan Kebijakan Pembiayaan Perumahan	56
	D. Perbandingan Kebijakan Skim Subsidi dan Skim Fasilitas Likuiditas	57
	E. Perbedaan KPR Bersubsidi dan KPR FLPP	58

F. Karakteristik Skim FLPP	59
G. Rencana FLPP 2011	60
H. Simulasi FLPP KPR Sejahtera Tapak.....	61
I. Simulasi FLPP KPR Sejahtera Susun	63
J. Kebutuhan Uang Muka KPR Sejahtera dan Profesionalisme Pengembang	66
K. Pelembagaan Tabungan Perumahan	67
L. Syarat dan Cara Mengikuti Program FLPP.....	68
M. Daftar Bank Pelaksana yang telah melakukan MoU/PKO.....	69
N. Realisasi Penyaluran Pembiayaan KPR Program FLPP	70
XXIII. PROGRAM PENGEMBANGAN PKP BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN.....	71
A. Program/Kegiatan Pengembangan Kawasan	71
B. Program Pembangunan PSU Kawasan	72
C. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).....	73
D. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	74
E. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	75
F. Program Penanganan Rumah di Kawasan Perbatasan Provinsi NTT dan Timor Leste	76
XXIV. PROGRAM PENGEMBANGAN PKP BIDANG PERUMAHAN SWADAYA.....	78
A. Kebijakan dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	78
B. PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman.....	79
C. Proyeksi Kebutuhan PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman.....	80
D. Fasilitasi Pra dan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	81
E. Matriks Kebijakan Program Perumahan Pro-Rakyat	82
F. Sasaran Program Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah.....	83
G. Karakteristik Program Perumahan Pro-Rakyat	84
H. Rencana Aksi Terpadu TA 2012: Pembangunan Rumah Sangat Murah	85

XXV. PROGRAM PENGEMBANGAN PKP BIDANG PERUMAHAN FORMAL	86
A. Program/Kegiatan Pembangunan Perumahan Formal	86
B. Pembangunan Rumah Susun Sejahtera Sewa/Rusunawa.....	88
C. Pembangunan Rumah Susun Sejahtera Milik/Rusunami	89
D. Matrik Kebijakan Program Perumahan Pro-Rakyat.....	90
E. Sasaran Program Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah.....	91
F. Karakteristik Program Perumahan Pro-Rakyat	92
G. Rencana Aksi Pembangunan Rumah Murah Tahun 2012	93
XXVI. DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010-2011	94
A. Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2010-2011	94
B. Alokasi Dana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2010 dan 2011	95
C. Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011	96
D. Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2012.....	103
XXVII. DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2011-2015	104
XXVIII. KERANGKA PIKIR REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	106
XXIX. PROSES REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	107
XXX. PERATURAN PELAKSANAAN UU RUMAH SUSUN.....	108
XXXI. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN ASET KEMENPERA TAHUN 2012.....	110
XXXII. FASILITASI ADMINISTRASI ALIH ASET RUSUN SEWA KEMENPERA	111
XXXIII. DATA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2011	112
A. Data Lokasi Penanganan Kawasan Tahun 2011	112
B. Data Lokasi Pembangunan Perumahan Swadaya Tahun 2011	120
C. Data Lokasi Pembangunan Perumahan Formal Tahun 2011	129
XXXIV. BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009.....	135

KATA PENGANTAR

Buku saku ini merupakan gambaran secara ringkas tentang rencana dan capaian yang diperoleh dari kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011 serta perencanaan tahun 2012, berdasarkan dokumen perencanaan yaitu :

1. Kontrak kinerja Menteri Negara Perumahan Rakyat;
2. RPJMN 2010-2014;
3. Sasaran Pembangunan Perumahan Tahun 2010-2014 (sesuai kontrak kinerja Menteri Negara Perumahan Rakyat, Inpres 1 Tahun 2010 dan Renstra Kemenpera 2010-2014);
4. IKU (Indikator Kinerja Utama) Kemenpera;
5. Target dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 (Sesuai RPJMN dan Renstra Kemenpera 2010-2014);
6. Anggaran Kemenpera Tahun 2011 dan Tahun 2012 sesuai RPJMN dan DIPA;
7. Kinerja Pembangunan Perumahan Rakyat Tahun 2011;
8. Penyerapan Anggaran Tahun 2011;
9. Rencana kinerja program/kegiatan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2011 dan 2012;
10. Pengawasan UKP4 terhadap Realisasi Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan 2011 Bidang Perumahan dan Permukiman;
11. Direktif Presiden; dan
12. Kerangka Pikir Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan Rakyat

Diharapkan buku saku ini bisa menjadi panduan dengan cepat mengenal tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Jakarta, Oktober 2011

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat RI

I. KONTRAK KINERJA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NO	PROGRAM	WAKTU
A.	Memastikan tersusunnya Rencana Strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014	
	i. Menyusun usulan Renstra Kemenpera Tahun 2010-2014 yang terdiri dari: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, indikator kinerja per Eselon II	Paling lambat tanggal 20 November 2009
	ii. Menyempurnakan Renstra Kemenpera Tahun 2010 2014	Paling lambat tanggal 31 Desember 2009
B.	Memastikan tercapainya target capaian program 100 hari	
	Meningkatkan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami	Paling lambat Januari 2010
C.	Memastikan tercapainya prioritas nasional yang mencakup namun tidak terbatas pada	
	Memastikan pembangunan 685.000 unit RSH Bersubsidi, 180 Tower Rusunami dan 650 TB Rusunawa berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga pada tahun 2012	Paling lambat Oktober 2014
D.	Melaksanakan reformasi bidang pelayanan umum	
	Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan Kementeriannya secara tuntas sebelum Juni 2010 serta memastikan efektifitas implementasi perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden untuk memimpin reformasi pelayanan umum.	Paling lambat Juni 2010
E.	Melaksanakan perbaikan peraturan yang mendukung investasi	
	Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat atau berpotensi menghambat investasi dengan sebelum Juni 2010 dan memastikan efektifitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.	Paling lambat Juni 2010

Sumber : Kontrak Kinerja Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan Presiden Republik Indonesia

II. RPJMN 2010 – 2014

A. RPJMN 2010-2014 (Buku I)

NO	Substansi Inti/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pagu (Rp Miliar)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
4. PERUMAHAN RAKYAT:										
Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012										
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	380 twin block	Jumlah rusunawa terbangun	100	100	180	0	0	4.560,0	Kemenpera
2	Fasilitasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	700.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	90.374	117.010	145.000	161.616	186.000	4.375,00	Kemenpera
3	Bantuan subsidi perumahan Tahun 2010-2014	1.350.000 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	210.000	250.000	290.000	290.000	310.000	20.700,00	Kemenpera
4	Pembayaran Tunggakan Subsidi Tahun 2008-2009	187.006 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	187.006	-	-	-	-	923,51	Kemenpera
5	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	200.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	30.000	50.000	65.000	30.000	25.000	2.145,00	Kemenpera
6	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	400.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	50.000	75.000	85.000	90.000	100.000	625,00	Kemenpera

Sumber : RPJMN 2010-2014 (Buku I) Bidang Perumahan dan Permukiman

B. RPJMN 2010-2014 (Buku II)**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PAGU 2010-2014 (Rp Miliar)
				2010	2010-2014	
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA					1.171,4
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					12.111,1
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	380 twin block	Jumlah rusunawa terbangun	100	380	4.560,0
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	7.500	50.000	536,3
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	7.500	50.000	286,3
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	700.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya	90.374	700.000	4.375,0
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	50.000 unit	Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya	7.500	50.000	236,3
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	655 Ha	Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi	50	655	1.043,0
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	30.000 unit	Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi	-	30.000	12,0
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	5.000 unit	Jumlah rumah khusus terbangun	250	5.000	259,7
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	20 peraturan perundangan	Jumlah revisi peraturan perundangan	4	20	802,6
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					802,6
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	10 peraturan perundangan	Jumlah revisi peraturan perundangan	2	10	802,6
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014						14.085,10

Sumber : RPJMN 2010-2014 (Buku II) Bidang Perumahan dan Permukiman

III. SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010-2014

A. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN DIDUKUNG DENGAN PSU YANG MEMADAI

2. PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI														
TAHUN	RUMAH LAYAK HUNI								RUSUNAWA				RUSUNAMI	
	FORMAL	SWADAYA						RUMAH KHUSUS	MAHASISWA DAN PEKERJA	KUMUH				
		Pembangunan Baru		Peningkatan Kualitas										
				KPRS		BLM								
2010	150.000	unit	7.500	unit	30.000	unit	7.500	unit	250	unit	100 TB 9.600 unit	40 TB 3.960 unit	60 Tower 30.000 unit	
2011	180.000	unit	12.500	unit	40.000	unit	12.500	unit	750	unit	100 TB 9.600 unit	71 TB 7.041 unit	60 Tower 30.000 unit	
2012	210.000	unit	16.250	unit	50.000	unit	16.250	unit	1.050	unit	100 TB 9.600 unit	71 TB 7.041 unit	60 Tower 30.000 unit	
2013	210.000	unit	7.500	unit	60.000	unit	7.500	unit	1.350	unit	40 TB 3.840 unit	53 TB 5.200 unit	60 Tower 30.000 unit	
2014	200.000	unit	6.250	unit	70.000	unit	6.250	unit	1.600	unit	40 TB 3.840 unit	35 TB 3.458 unit	60 Tower 30.000 unit	
TOTAL PROGRAM 2010-2012	540.000	unit	36.250	unit	120.000	unit	36.250	unit	2.050	unit	300 TB 28.800 unit	182 TB 18.042 unit	180 Tower 90.000 unit	
	576.250 unit										482 TB 46.842 unit		180 Tower 90.000 unit	
					156.250 unit				2.050 unit					
	TOTAL PROGRAM = 871.392 unit													
TOTAL PROGRAM 2010-2014	950.000	unit	50.000	unit	250.000	unit	50.000	unit	5.000	unit	380 TB 36.480 unit	270 TB 26.700 unit	270 Tower 26.700 unit	
											650 TB 63.180 unit		300 Tower 150.000 unit	
	1.305.000 unit													
	1.518.180 unit													

DIDUKUNG
DENGAN
+

2. PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN							
TAHUN	PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman				PSU Perumahan Swadaya	DAK PSU Kawasan	
	Kaw. Skala Besar	Kaw. Non Skala Besar	Kaw. Khusus	TOTAL			
2010	51.280	36.198	2.896	90.374 Unit	7.500 Unit	- Ur	
2011	65.692	46.371	4.947	117.010 Unit	12.500 Unit	80.000 Ur	
2012	86.310	51.786	6.904	145.000 Unit	16.250 Unit	80.000 Ur	
2013	110.159	44.360	7.097	161.616 Unit	7.500 Unit	80.000 Ur	
2014	130.603	52.592	2.805	186.000 Unit	6.250 Unit	80.000 Ur	
TOTAL	444.044	231.307	24.649	700.000 Unit	50.000 Unit	320.000 Ur	

B. FASILITASI LAINNYA

No.	Kegiatan	SASARAN							
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2012	TOTAL	
1	FASILITASI DAN STIMULASI PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	50	100	150	175	180	300	Ha	655 Ha
2	FASILITASI PRA SERTIFIKASI DAN PENDAMPINGAN PASCA SERTIFIKASI BAGI MBR	-	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	Unit	30.000 Unit
3	PSO PERUMAHAN	-	20.000	25.000	25.000	30.000	45.000	Unit	100.000 Unit

Sumber : Kontrak Kinerja Menteri Negara Perumahan Rakyat, Inpres I Tahun 2010 dan Renstra Kemenpera 2010-2014

IV. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 A Tahun 2011)

No.	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Pengembangan regulasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1. Penyusunan rancangan perubahan atas berbagai peraturan perundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 2. Pengembangan NSPK, dalam rangka penerapan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2.	Peningkatan pembangunan perumahan berbasis kawasan permukiman yang serasi dengan tata ruang dengan dukungan penyediaan infrastruktur	1. Pemanfaatan fasilitasi PSU kawasan sebanyak 700.000 unit; 2. Pemanfaatan DAK perumahan dan kawasan permukiman berupa PSU sebanyak 320.000 unit
3.	Peningkatan tingkat hunian rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR dan MBM	1. Fungsionalisasi terhadap rusunawa terbangun sebanyak 380 TB; 2. Pemanfaatan rumah swadaya 100.000 unit; 3. Pemanfaatan rumah khusus, rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana sebanyak 5.000 unit; 4. Penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit; 5. Mempertahankan tingkat suku bunga kredit $\leq 10\%$ bagi MBR dan MBM.
4.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	1. Perluasan penataan lingkungan kumuh seluas 655 ha; 2. Penataan lingkungan dengan fasilitasi PSU secara swadaya sebanyak 50.000 unit.

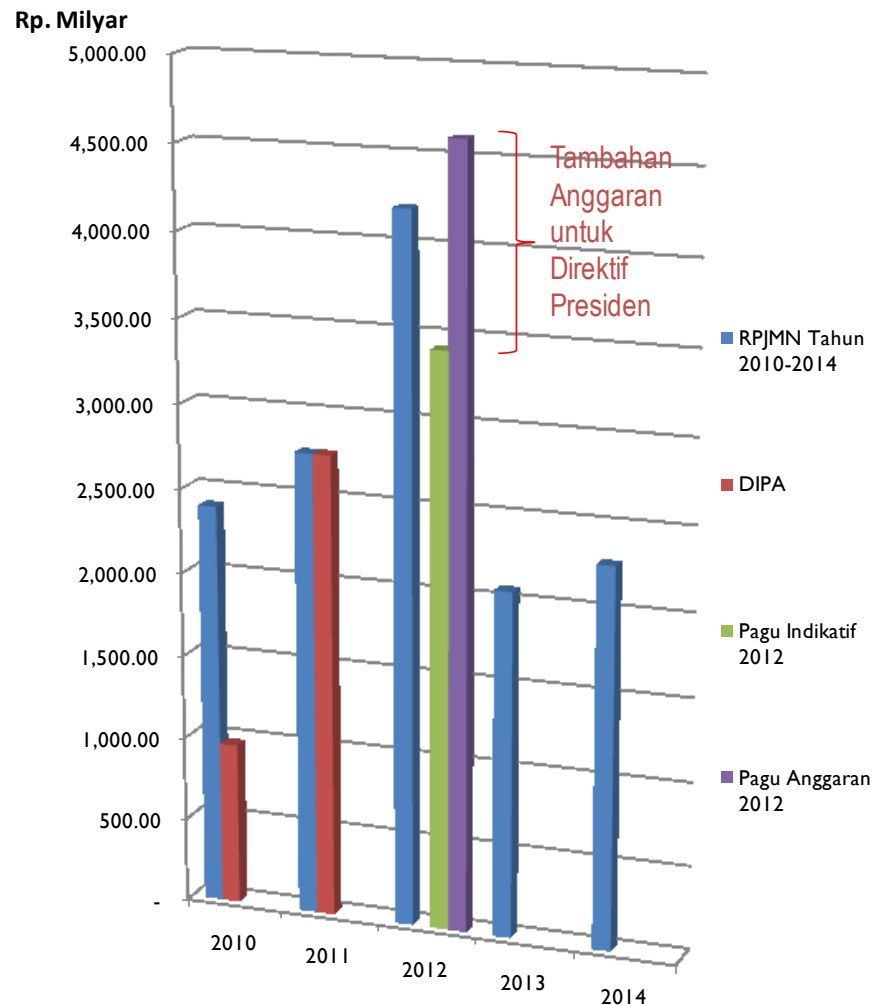
Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

V. TARGET DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010–2014

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	RPJMN 2010 - 2014											
			TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
A	BA 091													
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA								127,61	156,63	242,46	303,33	341,35	1.171,38
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								2.185,73	2.520,46	3.874,52	1.679,37	1.851,02	12.111,10
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	twin block	100	100	180	-	-	380	1.200,00	1.200,00	2.160,00	-	-	4.560,00
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	75,00	125,00	178,75	82,50	75,00	536,25
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	37,50	62,50	97,50	45,00	43,75	286,25
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	unit	90.374	117.010	145.000	161.616	186.000	700.000	564,84	731,31	906,25	1.010,10	1.162,50	4.375,00
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	unit	7.500	12.500	16.250	7.500	6.250	50.000	30,00	50,00	81,25	37,50	37,50	236,25
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	50	100	150	175	180	655	75,00	160,00	240,00	280,00	288,00	1.043,00
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	unit	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	-	2,25	3,00	3,00	3,75	12,00
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	unit	250	750	1.050	1.350	1.600	5.000	42,87	28,88	47,25	60,75	80,00	259,75
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	peraturan perundangan	4	4	4	4	4	20	160,52	160,52	160,52	160,52	160,52	802,60
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	412,00
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	peraturan perundangan	2	2	2	2	2	10	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	412,00
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091)									2.395,74	2.759,49	4.199,38	2.065,10	2.274,77	13.694,48
B.	BA 999													-
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								4.163,51	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	21.623,51
1	Bantuan Subsidi Perumahan	unit	210.000	250.000	290.000	290.000	310.000	1.350.000	3.240,00	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	20.700,00
2	Masa Transisi	unit	187.006					187.006	923,51					923,51
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999)									4.163,51	3.840,00	4.440,00	4.440,00	4.740,00	21.623,51

Sumber : RPJMN 2010-2014 Bidang Perumahan dan Permukiman dan RENSTRA Kemenpera 2010-2014

VI. PAGU ANGGARAN KEMENPERA (BA 091) MENURUT RPJMN 2010-2014 VS ALOKASI



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

Alokasi Anggaran Kemenpera sesuai RPJMN 2010 – 2014 meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2012, kemudian menurun pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Sesuai Kontrak Kinerja Menteri Perumahan Rakyat dengan Presiden RI, diamanatkan bahwa sampai dengan Tahun 2012 harus dapat memastikan terbangunnya 685.000 unit RSH Bersubsidii, 180 tower Rusunami dan 380 TB Rusunawa berikut PSU pendukungnya.
- Porsi terbesar Anggaran Kemenpera adalah untuk pembangunan Rusunawa. Sasaran pembangunan Rusunawa Kemenpera sesuai RPJMN 2010 - 2014 adalah sebanyak 100 TB pada tahun 2010, 100 TB pada tahun 2011 dan 180 TB pada tahun 2012. **Pada tahun 2013 dan 2014, Kemenpera tidak lagi memiliki alokasi anggaran pembangunan Rusunawa.** Dengan demikian, alokasi anggaran Kemenpera yang terbesar sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 adalah pada tahun 2012.
- Terdapat kenaikan alokasi anggaran Tahun 2012 (termasuk PNBPN) dari Pagu Indikatif yaitu sebesar Rp. 3,42 Trilyun menjadi Rp. 4,60 Trilyun. Kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,2 T tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan Direktif Presiden yaitu: (1) Program Pro-Rakyat Klaster IV dan (2) Penanganan Rumah bagi Warga Baru di Perbatasan NTT-Timor Leste.

VII. ANGGARAN KEMENPERA TAHUN 2011 DAN RENCANA TAHUN 2012 SESUAI RPJMN DAN DIPA

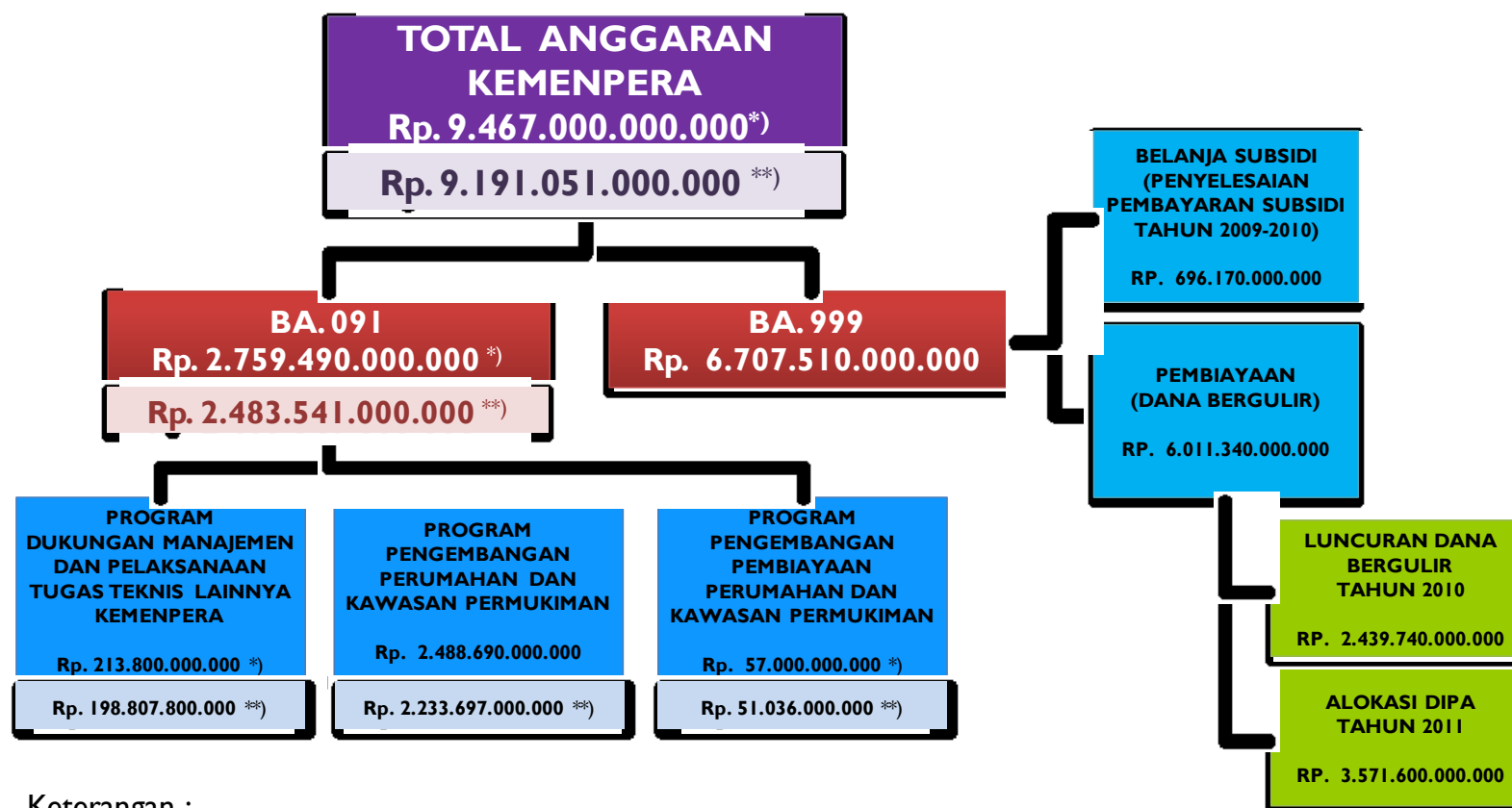
No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TAHUN 2011				TAHUN 2012			
			RPJMN 2010-2014		DIPA		RPJMN 2010-2014		PAGU ANGGARAN	
			TARGET	PAGU (Rp. Milyar)	TARGET	PAGU (Rp. Milyar)	TARGET	PAGU (Rp. Milyar)	TARGET	PAGU (Rp. Milyar)
A	BA 091									
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA			156,63		197,26		242,46		250,78
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.520,46		2.235,70		3.874,52		4.127,60
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	TB	100	1.200,00	143	1.075,00	180	2.160,00	175	1.190,66
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	Unit	12.500	125,00	32.000	143,34	16.250	178,75	26.250	288,75
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	Unit	12.500	62,50	13.500	62,50	16.250	97,50	29.314	175,88
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	Unit	117.010	731,31	128.210	614,25	145.000	906,25	128.000	800,00
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	Unit	12.500	50,00	15.000	50,00	16.250	81,25	29.314	146,57
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	100	160,00	100	147,78	150	240,00	150	240,00
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	-	7.500	2,25	7.500	1,50	7.500	3,00	7.500	6,00
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	Unit	750	28,88	11.950	36,00	1.050	47,25	1.050	89,84
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	Peraturan Perundangan	4	160,52	4	105,32	4	160,52		184,34
10	Pendampingan dan Pengendalian Perumahan Swadaya	Unit							55.416	55,56
11	Penanganan Rumah bagi Warga Bari di Perbatasan Prov NTT - Timor Leste	Unit							29.992	700,00
12	PSU Rumah Murah								40.000	250,00
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			82,40		51,04		82,40		225,71
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	Peraturan Perundangan	2	82,40	2	51,04	2	82,40		46,55
2	PNBP BLU Lukuiditas Pembiayaan Perumahan									179,16
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2011 - 2012 (BA 091)				2.759,49		2.483,99		4.199,38		4.604,10

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TAHUN 2011				TAHUN 2012			
			RPJMN 2010-2014		DIPA		RPJMN 2010-2014		PAGU ANGGARAN	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(Rp. Milyar)		(Rp. Milyar)		(Rp. Milyar)		(Rp. Milyar)
B	BA 999									
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.840,00		6.707,51		4.440,00		4.709,25
1	Bantuan Subsidi Perumahan	Unit	250.000	3.840,00		0,00	290.000	4.440,00		
2	Pembayaran Tunggal	Unit			245.888	696,17				
3	Fasilitas Likuiditas	Unit			160.925	6.011,34				
4	Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak	Unit							122.790	4.641,52
5	Pembangunan Rumah Sejahtera Susun	Unit							1.000	67,73
6	Pembangunan Rumah Murah	Unit								
II	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit							30.500	191,24
1	PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	Unit							30.500	191,24
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2011 - 2012 (BA 999)				3.840,00		6.707,51		4.440,00		4.900,49
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2011 - 2012 (BA 091 + BA 999)				6.599,49		9.191,50		8.639,38		9.504,59

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

VIII. PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2011

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM



Keterangan :

*) DIPA Awal

**) DIPA Revisi setelah Penghematan 10%

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

IX. REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2011 PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 dan PROGNOSA 31 DESEMBER 2011

BAGIAN ANGGARAN : 091

NO	SATUAN KERJA	DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKS. TUGAS LAINNYA			PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERKIM			TOTAL			PROGNOSA PENYERAPAN S/D 31-12-2011	
		PAGU DIPA	PENYERAPAN s/d 30-09-2011		PAGU DIPA	PENYERAPAN s/d 30-09-2011		DIPA	PENYERAPAN s/d 30-09-2011		DIPA	PENYERAPAN s/d 30-09-2011			
		(Rp. 000.000)	(Rp. 000.000)	%	(Rp. 000.000)	(Rp. 000.000)	%	Rp. 000.000	Rp. 000.000	%	(Rp. 000.000)	(Rp. 000.000)	%	(Rp. 000.000)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3+6+9	13=4+7+10	14	15	16
1	SEKRETARIAT KEMENPERA	147.260	67.652	45,94	-	-	-	-	-	-	147.260	67.652	45,94	141.039	94,78
2	PENGELOLAAN KAWASAN	-	-	-	37.000	18.742	50,65	-	-	-	37.000	18.742	50,65	35.746	96,61
3	PENGEMBANGAN PERUM. FORMAL	-	-	-	35.240	19.330	54,85	-	-	-	35.240	19.330	54,85	35.145	99,73
4	PEMBERDAYAAN PERUM. SWADAYA	-	-	-	34.582	15.960	46,15	-	-	-	34.582	15.960	46,15	33.303	96,30
5	PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	35.680	16.179	45,34	35.680	16.179	45,34	35.159	98,54
6	PENYEDIAAN PERUMAHAN	-	-	-	2.128.875	340.477	15,99	-	-	-	2.128.875	340.477	15,99	1.962.468	92,27
7	PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	15.356	3.481	22,67	15.356	3.481	22,67	15.070	98,14
8	SKPD PELAKSANAAN DEKONSENTRASI	50.000	15.285	30,57	-	-	-	-	-	-	50.000	15.285	30,57	48.801	97,60
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 091		197.260	82.937	42,04	2.235.697	394.510	17,65	51.036	19.660	38,52	2.483.993	497.106	20,01	2.306.730	92,88

BAGIAN ANGGARAN : 999

NO.	SATUAN KERJA	PEMBIAYAAN DANA BERGULIR									TOTAL				
1	BLU PST. PEMBIAYAAN PERUMAHAN	6.011.340	2.487.604	41,38	-	-	-	-	-	-	6.011.340	2.487.604	41,38	5.986.740	99,59
2	PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN	696.170	581.459	83,52	-	-	-	-	-	-	696.170	581.459	83,52	624.240	89,67
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 999		6.707.510	3.069.063	45,76	-	-	-	-	-	-	6.707.510	3.069.063	51,05	6.610.980	98,56
TOTAL BAGIAN ANGGARAN : 091 + 999											9.191.503	3.566.169	38,80	8.917.710	97,03

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2011
PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011
PER KELOMPOK BELANJA

B A : 091

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	BELANJA PEGAWAI	27.118.805	17.036.278	62,82	10.082.527
2	BELANJA BARANG	353.993.102	145.978.722	41,24	208.014.380
3	BELANJA MODAL	1.865.381.315	318.063.295	17,05	1.547.318.020
4	BELANJA SOSIAL	237.500.000	16.027.500	6,75	221.472.500
JUMLAH		2.483.993.222	497.105.795	20,01	1.986.887.427

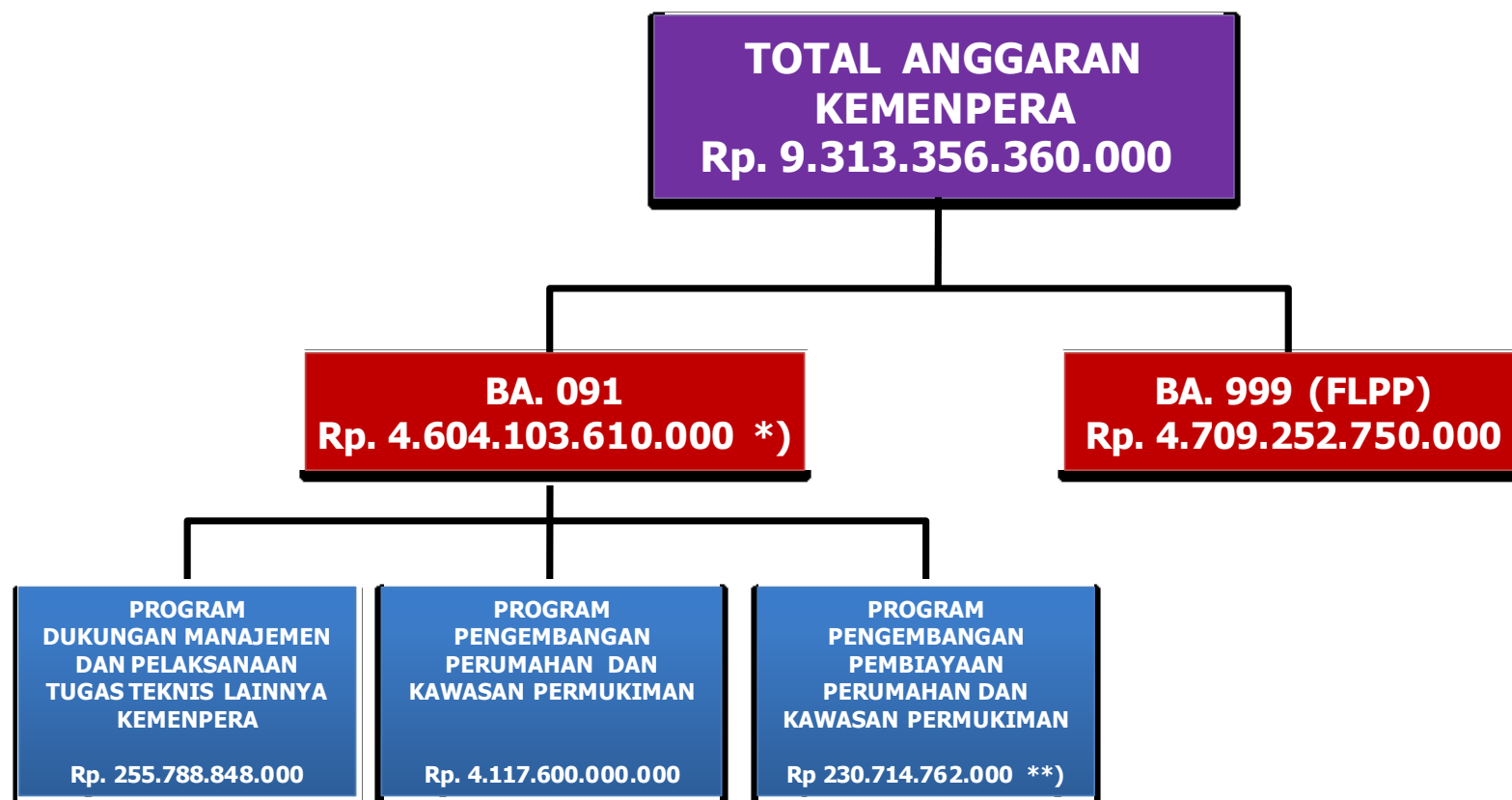
NO	SATUAN KERJA, KELOMPOK BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	SATKER SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	147.260.022	67.651.925	45,94	79.608.097
	BELANJA PEGAWAI	27.118.805	17.036.278	62,82	10.082.527
	BELANJA BARANG	118.891.217	50.026.844	42,08	68.864.373
	BELANJA MODAL	1.250.000	588.803	47,10	661.197
2	SATUAN KERJA PENGELOLAAN KAWASAN	37.000.000	18.742.236	50,65	18.257.764
	BELANJA BARANG	37.000.000	18.742.236	50,65	18.257.764
3	SATUAN KERJA PENGELOLAAN PERUMAHAN FORMAL	35.240.000	19.329.971	54,85	15.910.029
	BELANJA BARANG	35.240.000	19.329.971	54,85	15.910.029
4	SATUAN KERJA PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA	34.582.200	15.960.249	46,15	18.621.951
	BELANJA BARANG	34.582.200	15.960.249	46,15	18.621.951

NO	SATUAN KERJA, KELOMPOK BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA
5	SATUAN KERJA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	35.680.000	16.178.917	45,34	19.501.083
	BELANJA BARANG	35.680.000	16.178.917	45,34	19.501.083
6	SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN	2.128.875.000	340.476.915	15,99	1.788.398.085
	BELANJA BARANG	29.213.685	6.974.923	23,88	22.238.762
	BELANJA MODAL	1.862.161.315	317.474.492	17,05	1.544.686.823
	BELANJA SOSIAL	237.500.000	16.027.500	6,75	221.472.500
7	SATUAN KERJA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN	15.356.000	3.480.961	22,67	11.875.039
	BELANJA BARANG	13.386.000	3.480.961	26,00	9.905.039
	BELANJA MODAL	1.970.000	-	-	1.970.000
8	SKPD PELAKSANAAN DEKONSENTRASI	50.000.000	15.284.621	50,58	34.715.379,00
	BELANJA BARANG	50.000.000	15.284.621	30,57	34.715.379,00
JUMLAH		2.483.993.222	497.105.795	20,01	1.986.887.427

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

X. PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2012

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM



Keterangan:

*) Pagu Anggaran Kemenpera TA.2012 Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.215/KMK.02/2011 Tanggal 30 Juni 2011

**) Termasuk alokasi PNPB BLU-Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp.179.161.362.000,-

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

RINCIAN PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN ANGGARAN 2012

BAGIAN ANGGARAN : 091

NO	SATUAN KERJA	DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKS. TUGAS LAINNYA	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TOTAL
		(Rp. 000.000)	(Rp. 000.000)	(Rp. 000.000)	(Rp. 000.000)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	SEKRETARIAT KEMENPERA	180.788,85	-	-	180.788,85
2	PENGELOLAAN KAWASAN	-	103.840,00	-	103.840,00
3	PENGEMBANGAN PERUM. FORMAL	-	44.500,00	-	44.500,00
4	PEMBERDAYAAN PERUM. SWADAYA	-	66.370,00	-	66.370,00
5	PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	-	51.553,40	51.553,40
6	PENYEDIAAN PERUMAHAN	-	3.902.890,00	-	3.902.890,00
7	BLU PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN *)	-	-	179.161,36	179.161,36
8	SKPD PELAKSANAAN DEKONSENTRASI	75.000,00	-	-	75.000,00
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 091		255.788,85	4.117.600,00	230.714,76	4.604.103,61
BAGIAN ANGGARAN : 999					
NO.	SATUAN KERJA	PEMBIAYAAN DANA BERGULIR			TOTAL
1	BLU PST. PEMBIAYAAN PERUMAHAN	4.709.252,75	-	-	4.709.252,75
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN : 999		4.709.252,75	-	-	4.709.252,75
TOTAL BAGIAN ANGGARAN : 091 + 999					9.313.356,36

Keterangan: * PNP/BLU

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XI. SANDINGAN PAGU INDIKATIF DAN PAGU ANGGARAN KEMENPERA TA 2012 (BA 091)

KODE		PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PAGU INDIKATIF	PAGU ANGGARAN
DEP	PROG				
091	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Rp. Murni	223.410.000,0	255.788.848,0
			b. PNBP/BLU	0,0	0,0
			c. PHLN/PDN	0,0	0,0
			TOTAL	223.410.000,0	255.788.848,0
091	06	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	a. Rp. Murni	2.943.570.000,0	4.117.600.000,0
			b. PNBP/BLU	0,0	0,0
			c. PHLN/PDN	0,0	0,0
			TOTAL	2.943.570.000,0	4.117.600.000,0
091	07	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	a. Rp. Murni	55.583.400,0	51.553.400,0
			b. PNBP/BLU	194.088.800,0	179.161.362,0
			c. PHLN/PDN	0,0	0,0
			TOTAL	249.672.100,0	230.714.762,0
			a. Rp. Murni	3.222.563.400,0	4.424.942.248,0
			b. PNBP/BLU	194.088.800,0	179.161.362,0
			c. PHLN/PDN	0,0	0,0
			TOTAL	3.416.652.100,0	4.604.103.610,0

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XII. PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2012

1. PEMENUHAN SASARAN RPJMN DAN RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014

PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. DUKUNGAN PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK: a. REFORMASI BIROKRASI b. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH; 2. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SESUAI AMANAT UU 1/2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3. PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA DI 33 PROV. (DEKONSENTRASI TAHUN 2012): a. FASILITASI POKJA PERUMAHAN DAERAH b. PEMBINAAN PENYUSUNAN RP3KP 4. FASILITASI POKJA PERUMAHAN NASIONAL; 5. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN HARI HABITAT TAHUN 2012, HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2012 DAN <i>WORLD URBAN FORUM</i> (WUF); 6. PENATAAN BMN: HIBAH DAN KERJASAMA PENGELOLAAN.	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. PENYUSUNAN PP AMANAT UU RUMAH SUSUN (UU RUMAH SUSUN SEDANG DIREVISI): a. PP TTG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN b. PP TTG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN 2. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN <i>LAND BANKING</i> 3. PERENCANAAN <i>DEMO PLOT</i> PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAW. PERMUKIMAN SERTA PENGEMBANGAN KOTA BARU 4. PENGEMBANGAN NSPK DLM RANGKA PENERAPAN SPM BID. PERUMAHAN RAKYAT	OPERASIONALISASI KEBIJAKAN 1. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI: a. PEMBANGUNAN RUSUNAWA b. PENINGKATAN HUNIAN RUSUNAWA c. PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS d. PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK e. PEMBANGUNAN RUSUNAMI (SWASTA) 2. DUKUNGAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MLL FASILITASI PENYEDIAAN PSU (KAW. SKALA BESAR, KAW. KHUSUS, DAN KAW. BUKAN SKALA BESAR) 3. PENGEMBANGAN KEMBALI KOTA KEKERABATAN MAJA 4. PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH 5. PELAKSANAAN PSO PERUMAHAN 6. PELAKSANAAN DAK PERUMAHAN 7. PENGEMBANGAN <i>LAND BANKING</i>	1. RUU TABUNGAN PERUMAHAN 2. RPP SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN TENTANG: a. TATA CARA PENERAHAN & PEMUPUKAN DANA b. KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 3. RAPERPRES TTG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAW. PERMUKIMAN KEPADA BUMN 4. RAPERMENPERA TENTANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DLM MENDUKUNG MBR UTK MEMENUHI KEBUTUHAN HUNIAN YG LAYAK, SEHAT DAN TERJANGKAU : a. KPR RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SUSUN (KONVENSIONAL DAN SYARIAH) b. KREDIT KONTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA TAPAK (KONVENSIONAL DAN SYARIAH) 5. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN a. SOSIALISASI KEBIJAKAN b. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

2. PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN

PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT KLASER 4	PENANGANAN RUMAH BAGI WARGA BARU DI PERBATASAN NTT-TIMOR LESTE
A. PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH: ▪ STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (PEMBANGUNAN BARU, PENINGKATAN KUALITAS, DAN PSU) ▪ FASILITASI PRA-SERTIPIKASI DAN PASCA SERTIPIKASI ▪ PENDAMPINGAN FASILITATOR KELOMPOK B. PEMBANGUNAN RUMAH MURAH PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK DIDUKUNG FLPP DAN PSU	▪ PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ▪ PEMBANGUNAN RUMAH MURAH (DENGAN SKIM KHUSUS) YANG DIDUKUNG PSU KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ▪ FASILITASI DAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (PEMBANGUNAN BARU, PENINGKATAN KUALITAS, PSU DAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH)

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XIII. RINCIAN ALOKASI PAGU ANGGARAN KEMENPERA TAHUN 2012 (BA 091)

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA			255,79
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenpera	Tahun	1	255,79
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			4.117,60
1	Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusun Sewa) *)	TB	175	1.190,66
2	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman	unit	128.000	800,00
3	Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh	Ha	150	240,00
4	Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus	unit	1.050	89,84
5	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman			201,11
6	Program Pro-Rakyat Klaster 4	unit		896,00
a	Pembangunan Rumah Sangat Murah	unit	53.333	646,00
-	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	unit	26.250	288,75
-	Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	unit	27.083	162,50
-	Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	unit	27.083	135,42
-	Fasilitasi Pra-sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi	bidang	7.500	6,00
-	Pendampingan dan Pengendalian	unit	53.333	53,33
b	Pembangunan Rumah Murah	unit	40.000	250,00
-	PSU Rumah Murah	unit	40.000	250,00
7	Penanganan Rumah bagi Warga Baru di Perbatasan Prov NTT - Timor Leste	Unit	29.992	700,00
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			230,71
1	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			51,55
2	PNBP BLU-Pusat Pembiayaan Perumahan			179,16
TOTAL BA 091				4.604,10
IV	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan			4.709,25
TOTAL BA 999				4.709,25
TOTAL ANGGARAN KEMENPERA				9.313,36

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

DIREKTIF PRESIDEN

XIV. KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH TAHUN 2012

A. TARGET PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH TAHUN 2011-2014

TAHUN	RUMAH SANGAT MURAH	RUMAH MURAH		JUMLAH
		RTSNON-BANKABLE	RTS BANKABLE	
2011	50.000 unit		10.000 unit	60.000 unit
2012	100.000 unit	50.000 unit	50.000 unit	200.000 unit
2013	100.000 unit	120.000 unit	120.000 unit	340.000 unit
2014	100.000 unit	150.000 unit	150.000 unit	400.000 unit
2011-2014	350.000 unit	320.000 unit	330.000 unit	1.000.000 unit

Komponen Biaya

1. Rumah Murah:

- Fasilitas PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- PSO Perumahan;
- Pembiayaan KPR melalui FLPP.

2. Rumah Sangat Murah :

- Bantuan Stimulan Swadaya (Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas dan PSU);
- Pendampingan Pra-sertifikasi dan Paska-sertifikasi bidang tanah;
- Pendampingan dan pengawasan/pengendalian pembangunan perumahan swadaya.

B. KEKURANGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH MURAH TAHUN 2012

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	SASARAN				PAGU ANGGARAN			KEKURANGAN ANGGARAN			
			TARGET	SKENARIO 1		SKENARIO 1				TARGET	ANGGARAN (Rp. Milyar)		
				Harsat (Rp. Juta)	ANGGARAN (Rp. Milyar)	Harsat (Rp. Juta)	ANGGARAN (Rp. Milyar)	SKENARIO 1	SKENARIO 2				
A.	BA 091												
I	PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH	unit	100.000		1.306,6		1.306,6	53.333		646,0		660,6	660,6
	a. Pembangunan Baru	unit	26.250	11,0	288,8	11,0	288,8	26.250	11,0	288,8	-	-	-
	b. Peningkatan Kualitas	unit	73.750	6,0	442,5	6,0	442,5	27.083	6,0	162,5	46.667	280,0	280,0
	c. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	unit	86.875	5,0	434,4	5,0	434,4	27.083	5,0	135,4	59.792	299,0	299,0
	d. Pendampingan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan	bidang	100.000	1,0	100,0	1,0	100,0	53.333	1,0	53,3	46.667	46,7	46,7
	e. Fasilitas Pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi	unit	7.500	0,8	6,0	0,8	6,0	7.500	0,8	6,0	-	-	-
	f. Biaya Operasional UPK/BKM	unit	100.000		35,0		35,0	-		-	100.000	35,0	35,0
2	PEMBANGUNAN RUMAH MURAH	unit	100.000		646,9		646,9	40.000		250,0	60.000	396,9	396,9
	a. Fasilitas Pembangunan PSU Kawasan	unit	100.000	6,3	625,0	6,3	625,0	40.000	6,3	250,0	60.000	375,0	375,0
	b. Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Murah *)	keg.	15		21,9		21,9	-		-	15	21,9	21,9
TOTAL BA 091					1.953,5		1.953,5			896,0		1.057,5	1.057,5
B.	BA 999												
A	PEMBANGUNAN RUMAH MURAH												
1	FLPP Rumah Murah	unit	100.000	20,0	2.000,0	20,0	2.000,0	-	-	-	100.000	2.000,0	2.000,0
2	PSO Rumah Murah	unit	10.799	5,0	54,0	12,5	135,0	-	-	-	10.799	54,0	135,0
TOTAL BA 999					2.054,0		2.135,0			-		2.054,0	2.135,0
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN					4.007,5		4.088,5			896,0		3.111,5	3.192,5

Ket: Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Murah meliputi kegiatan Sosialisasi Pembangunan Rumah Murah, Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan rumah Murah, dan Dukungan Pelaksanaan PSO Rumah Murah

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XV. KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN ANGGARAN 2012

A. PROGNOSA PENCAPAIAN RPJMN TAHUN 2010-2014

Kegiatan	Target RPJMN Tahun 2010-2014 (TB)				Prognosa Realisasi *) (TB)				Kekurangan (TB)
	2010	2011	2012	Total	2010	2011	2012	Total	
Pembangunan Rusun Sewa	100	100	180	380	49	143	175	367	13



B. SKENARIO PENCAPAIAN RPJMN TAHUN 2010-2014

Kegiatan	Target (TB)					
	2010	2011	2012	2013	2014	Total
a. Pembangunan Baru	49	143	175	13	-	380
b. Luncuran	-	49	143	175	13	380



*) Berdasarkan realisasi pembangunan Rusunawa Tahun 2010, alokasi DIPA Tahun 2011 dan Pagu Anggaran Tahun 2012

C. KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2012

No.	Komponen	Vol	Kebutuhan Anggaran		Alokasi Pagu Anggaran	Kekurangan Anggaran	
			Skenario 1 ^{d)}	Skenario 2 ^{e)}		Skenario 1 ^{d)}	Skenario 2 ^{e)}
1.	Pembangunan Baru Rusun Sewa Multi Years 2012/2013 ^{a)}	175 TB	400.000.000,00	1.689.441.250,00	318.135.000,00	81.865.000,00	1.371.306.250,00
2.	Lanjutan Pembangunan Rusun Sewa Multi Years 2011/2012 ^{b)}	143 TB	1.700.875.000,00	1.718.176.360,00	866.202.000,00	828.358.000,00	851.974.360,00
3.	Kegiatan Pendukung ^{c)}		-	6.315.000,00	6.315.000,00	-	-
TOTAL			2.100.875.000,00	3.413.932.610,00	1.190.652.000,00	910.223.000,00	2.223.280.610,00

Keterangan:

a) Terdiri dari review DED, Pembangunan Fisik dan Supervisi

b) Terdiri dari Pembangunan Fisik dan Supervisi

c) Terdiri dari Koordinasi dan Wasdal, LAKIP, KMP dan Pelatihan

d) Pembangunan Fisik untuk Pembangunan Baru (Tahun Pertama) sebesar 15%

e) Pembangunan Fisik untuk Pembangunan Baru (Tahun Pertama) sebesar 70%. Lokasi ditetapkan pada T-1, sehingga nilai prestasi kinerja bisa lebih besar yaitu sekitar 70% (alokasi waktu untuk pelaksanaan pembangunan fisik lebih panjang)

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XVI. KINERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TAHUN 2011				REALISAS
			RPJMN 2010-2014		DIPA		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				(Rp. Milyar)		(Rp. Milyar)	
A	BA 091						
I	PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA			156,63		197,26	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.520,46		2.235,70	
1	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	TB	100	1.200,00	143	1.075,00	33 a
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	Unit	12.500	125,00	32.000	143,34	12.500 b
3	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	Unit	12.500	62,50	13.500	62,50	12.500 b
4	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	Unit	117.010	731,31	128.210	614,25	37.500 c
5	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	Unit	12.500	50,00	15.000	50,00	12.500 b
6	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	100	160,00	100	147,78	
7	Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi	-	7.500	2,25	7.500	1,50	
8	Fasilitasi pembangunan rumah khusus	Unit	750	28,88	11.950	36,00	
9	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	Peraturan Perundangan	4	160,52	4	105,32	
10	Pendampingan dan Pengendalian Perumahan Swadaya	Unit					
11	Penanganan Rumah untuk Eks Pengungsi NTT	Unit					
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			82,40		51,04	
I	Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman	Peraturan Perundangan	2	82,40	2	51,04	
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2011 - 2012 (BA 091)				2.759,49		2.483,99	

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TAHUN 2011				REALISASI
			RPJMN 2010-2014		DIPA		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				(Rp. Milyar)		(Rp. Milyar)	
B	BA 999						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.840,00		7.403,67	
1	Bantuan Subsidi Perumahan	Unit	250.000	3.840,00		0	
2	Pembayaran Tunggalan	Unit			245.888	696,17	
	1. SSB RSH	Unit			193.551	428,93	
	2. SSB Rusunami	Unit			3.337	34,03	
	3. Masa Transisi	Unit			49.000	231,20	
	4. Wasdal					2,00	
3	Fasilitas Likuiditas	Unit			184.100	6.011,34	
	KPR Sejahtera Tapak	Unit			133.100		69.109
	KPR Sejahtera Susun	Unit			1.000		113
	KPR Sejahtera Murah	Unit			5.000		
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010 - 2011 (BA 999)				3.840,00		6.707,51	
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010 - 2011 (BA 091 + BA 999)				6.599,49		9.191,50	

Keterangan:

- a) Sudah proses lelang
- b) Dalam proses pencapaian sesuai target
- c) Status 28 September 2011 untuk pelaporan UKP4

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XVII. LAPORAN MONITORING INPRES TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2011 BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PRIORITAS NASIONAL 6: INFRASTRUKTUR
8 PROGRAM - 18 RENAKSI - 54 SUB RENAKSI

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
N6P33A1 : Pembangunan rumah susun sederhana sewa	Kemenpera	TNI/POLRI, Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemen PU, Kemendiknas, Kemenag, Pemda	Jumlah Rusunawa Terbangun (<i>twin block</i>)	TARGET: Terbangun Rusunawa Tahun Anggaran 2011 / 2012 sebanyak 100 TB (<i>twinblock</i>).	TARGET B04: Penetapan Lokasi untuk 100 TB Rusunawa.	B04: 60%	Sudah tetapkan lokasi terhadap 60 TB dari 100 TB (terlampir SK Menteri Negara Perumahan Rakyat), sedangkan 40 TB masih dalam review lokasi. Sebagai penjelasan Lokasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1 Rusunawa TNI = 40 TB 2 Rusunawa POLRI = 20 TB Data Dukung terhadap lokasi Rusunawa yang sudah ditetapkan beserta koordinatnya terlampir.
					TARGET B06: Penandatanganan Kontrak Penyusunan DED Rusunawa.	B06: 82%	Proses lelang Konsultan DED baru dimulai pada tanggal 13 Juni 2011, berdasarkan memo dinas PPK pada tgl 10 Juni 2011 Terlampir Memo Dinas Lelang dari PPK Penyediaan Rumah Susun dan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan. Penetapan Lokasi untuk 100 TB Rusunawa (kondisi per-30 Juni 2011) Penetapan lokasi untuk 100 TB Rusunawa, telah mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut: 1 Rusunawa TNI = 40 TB 2 Rusunawa POLRI = 20 TB 3 Rusunawa Pekerja = 15 TB 4 Rusunawa Mahasiswa = 12 TB 5 Rusunawa Ponpes = 13 TB

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
					TARGET B09: 1) Final DED; 2) Pelelangan Kontraktor dan Konsultan Supervisi.	B09:60,37 %	Adanya optimalisasi anggaran memungkinkan penambahan 43 TB. Sehingga total menjadi 143 TB (terlampir SK Menteri Negara Perumahan Rakyat). Adapun rincian lokasi menjadi sebagai berikut: 1 Rusunawa TNI = 60 TB 2 Rusunawa POLRI = 26 TB 3 Rusunawa Pekerja = 23 TB 4 Rusunawa Mahasiswa = 19 TB 5 Rusunawa Ponpes = 15 TB Pencapaian DED 143 TB telah mencapai 40% terdiri dari ; - Selesai DED sebanyak 33 TB (100%). Bobot Capaian 50 %. Capaian sebesar 11 %. BA Serah Terima terlampir. - DED sebanyak 60 TB Pekerjaan telah mencapai 80 % (Rencana lelang fisik minggu ke-2 Oktober 2011). Bobot Capaian 50 %. Capaian sebesar 17 %. Soft Copy Hasil DED terlampir) - DED sebanyak 50 TB Pekerjaan telah mencapai telah selesai 70 % (Rencana lelang fisik minggu ke-4 Oktober 2011). Bobot capaian 50 %. Capaian sebesar 12 %. Soft Copy Hasil DED terlampir. Pelelangan kontraktor telah mencapai 5 % terdiri dari ; 33 TB siap DED, sudah lelang kontraktor 28 TB. Bobot capaian 25 %. Capaian sebesar 5 %. Print Pengumuman E-Proc LPSE Kemenpera terlampir. Pelelangan konsultan supervisi telah mencapai 15,37 % terdiri dari ; Penetapan pemenang supervisi dari 33 TB (100%). Bobot capaian 25 %. Capaian sebesar 5,76 %. Penetapan Pemenang terlampir.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
							Konsultan supervisi 110 TB (5 Konsultan) telah selesai Prakuifikasi mencapai tahap lelang 50 %. Bobot Capaian 25 %. Capaian sebesar 9,61 %.
					TARGET B12: 1) Penandatanganan kontrak pelaksanaan konstruksi; 2) Progres pelaksanaan fisik mencapai 15% dari kontrak.	B12:	
				TARGET : Terbangun Rusunawa Tahun Anggaran 2010 - 2011 sebanyak 49 TB (twinblock).	TARGET B04: Pekerjaan Struktur Bawah dan Struktur Atas 100%	B04: 84,07%	1 Bobot Pekerjaan struktur : 42.419 % 2 Prestasi Pekerjaan Struktur : 35.660 % 3 Ada kendala persiapan lahan di 1 (satu) lokasi yaitu Rusunawa Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Kabupaten Amuntai, Kalimantan Barat.
					TARGET B06: Pekerjaan Arsitektural, Mekanikal, Elektrikal mencapai 30%	B06: 83,528%	1 Bobot Pekerjaan Arsitektural dan MEP 57,582 %, bobot pada pencapaian 30 % = 17,275%. 2 Bobot Rencana = 42,419 % + 17,275 % = 59,694 % 3 Prestasi Pekerjaan 49,861 % 4 Terdapat kendala persiapan lahan pada awal pekerjaan untuk Rusunawa di lokasi: 1. Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah Kab. Amuntai, Kalimantan Barat. 2. Lantamal I TNI AL Belawan Medan, Sumatera Utara 3. TNI AL Piyambung Lampung 4. Batujajar, Kkab Bandung 5. Kodam VII Tanjungpura, kab Sintang, Kalimantan Barat 6. Pekerja kab Sidoarjo, Jawa Timur 7. Kodam XVII Cendrawasih, Kabupaten Manokwari Laporan Kemajuan pekerjaan beserta S-Curve, koordinat lokasi dan foto terlampir

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
							Pekerjaan Struktur Bawah dan Struktur Atas (kondisi per-30 Juni 2011) Prestasi Pekerjaan Struktur Bawah dan Struktur Atas mencapai 87,5%. Kendala persiapan lahan di 1 (satu) lokasi yaitu Rusunawa Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Kabupaten Amuntai, Kalimantan Barat.
					TARGET B09: 1) Pekerjaan Arsitektural, Mekanikal, Elektrikal mencapai 100%; 2) Finishing Bangunan 100%.	B09:40,24%	1. Bobot Pekerjaan Arsitektur. (termasuk finishing) = 45,702 %. Bobot Pekerjaan ME = 11,880 %. 2. Bobot Rencana Arsitektur (termasuk finishing) dan ME = 45,702 % + 11,880 % = 57,582 % 3. Prestasi Pekerjaan : Pekerjaan Arsitektur (termasuk Finishing) = 76,53 % ; Pekerjaan ME = 44,28 % 4. Capaian Pekerjaan pada B09 = $76,53/100 \times 45,702 \% + 44,28/100 \times 11,880 \% = 40,24 \%$ 5. Beberapa lokasi mengalami keterlambatan karena ketidak siapan lahan di awal pekerjaan dan kesulitan memperoleh material tertentu, sehingga dilakukan percepatan dan optimalisasi pekerjaan dengan menambah waktu dan jumlah tenaga kerja.
					TARGET B12: Masa Pemeliharaan Bangunan serta Proses Penghunian Rusunawa.	B12:	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
			Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan Rusunawa dan percepatan pembangunan rusunawa (TB siap fisik, siap huni dan dihuni, dan alih aset)	TARGET : Terlaksananya sosialisasi pengelolaan rusunawa dan percepatan 91 TB siap fisik, 60 TB siap huni dan dihuni, serta 25 TB alih aset Rusunawa.	TARGET B04: Sosialisasi Permenpera No.14 /2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa. TARGET B06: Percepatan capaian siap fisik 17 TB, siap huni dan dihuni 15 TB, serta alih aset 5 TB Rusunawa. TARGET B09: Percepatan capaian siap fisik 37 TB, siap huni dan dihuni 30 TB, serta alih aset 15 TB Rusunawa	B04: 100% B06: 92% B09: 79,99 %	Prosiding Pelaksanaan Sosialisasi Pencapaian 17 TB Siap Fisik tercapai dan 15 TB Siap Huni Tercapai. Alih Aset 5 TB Terproses; (Rusunawa UI, UnSrat sudah serah terima dan untuk Rusunawa Cingised, IPB, Batam terproses) Data 17 TB Siap fisik dan 15 TB Siap Huni Capaian siap fisik 37 TB (100%). Bobot Capaian 33,33 %. Capaian sebesar 33,33 %. Lokasi dan Foto terlampir. Capaian terhunih 30 TB (100%). Bobot Capaian 33 %. Capaian sebesar 33,33 %. 2 TB sudah penetapan Alih Status (Rusunawa UI, Unsamratulangi) (100 %). Bobot Capaian 33,33 %. Capaian sebesar 4,44 %. Persetujuan Alih Status dari Kemenkeu dan BA Alih Status. 13 TB Penetapan Alih Status dalam proses terdiri dari : - 2 TB proses persetujuan Hibah (Rusunawa Cingised Bandung dan Mukakuning Batam) (80%). Bobot Capaian 33,33 %. Capaian sebesar 3,56 %. Surat dari Kemenkeu ke Presiden terkait persetujuan hibah. - 6 TB Rusunawa, sedang dalam proses persetujuan alih aset ke DJKN (Universitas Diponegoro 1 TB, Universitas Hasanudin 1 TB, Universitas Andalas 1 TB, Rusunawa Pekerja : Siwalan Kerto Jatim 2 TB, Universitas Udayana Bali 1 TB) (40 %). Bobot Capaian 33,33%. Capaian sebesar 5,33 %. Surat dari Sesmenpera untuk Penetapan BMN dan Usulan Alih Status. 5 TB dalam persiapan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
					TARGET B12: Percepatan capaian siap fisik 91 TB, siap huni dan dihuni 60 TB, serta alih aset 25 TB Rusunawa.	B12:	
N6P33A2: Pembangunan rumah layak huni bersubsidi	Kemenpera	Kemen PU, Pemda, Bank Pelaksana, REI dan APERSI	Jumlah fasilitasi dan stimulasi PSU untuk rumah layak huni bersubsidi	TARGET: Terbangunnya PSU perumahan dan permukiman untuk mendukung pembangunan 117.010 unit rumah layak huni bersubsidi	TARGET B04: Laporan prosiding konsultasi regional dan verifikasi lokasi program.	B04: 100%	Laporan Prosiding Konsultasi Regional dan Laporan Hasil Verifikasi Lokasi.
					TARGET B06: 1) Pelelangan DED; 2) Penandatanganan kontrak DED.	B06: 50%	Pelelangan DED sampai dengan tahap prakualifikasi, ada 20 paket. Kontrak awal Agustus 2011
					TARGET B09: 1) Pelelangan dan penandatanganan kontrak fisik; 2) Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman untuk mendukung pembangunan rumah secara kumulatif menjadi 40.000 unit rumah layak huni bersubsidi.	B09: 46,7 %	Pelelangan fisik tanggal 16 September 2011 (199 paket dari 233 paket), Bobot capaian 33,33 %. Capaian sebesar 28,47 %. Pengumuman dan Pemasukan dokumen melalui LPSE serta BA proses lelang. Rencana penandatanganan kontrak fisik akhir Bulan Oktober 2011 (50 %). Bobot Capaian 33,33 %. Capaian sebesar 16,67 %. Rencana pembangunan fisik akhir Bulan Oktober 2011. Penyiapan Pelaksanaan Pembangunan PSU (jalan dan drainase) untuk memenuhi 37.000 unit rumah layak bersubsidi pada tahap I dan 2 terdiri atas: Tahap I sebanyak 12.500 unit, Tahap II sebanyak 25.000 unit Dalam Penyiapan tersebut diterbitkan 3 (tiga) SK Kepala Pusat, yaitu: No. 10 Tahun 2011, tanggal 14 Juli 2011 No. 11 Tahun 2011, tanggal 2 Agustus 2011 No. 12 Tahun 2011, tanggal 23 Agustus 2011

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
							Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman untuk mendukung pembangunan rumah secara kumulatif menjadi 117.000 unit rumah layak huni bersubsidi (Target B12). Rencana dimulai pembangunan fisik pada Bulan Oktober 2011, dan pelaksanaan fisik direncanakan selesai pada tanggal 15-12-2011. Bobot Capaian 33,33 %. Capaian Persipan sebesar 5 % . Jadi progress $5\% \times 37500/40000 \times 33,33\% = 1,56\%$
					TARGET B12: Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman untuk mendukung pembangunan rumah secara kumulatif menjadi 117.010 unit rumah layak huni bersubsidi.	B12:	
		Kemenkeu, Pemda Terkait, Bank Pelaksana, REI dan APERSI	Pengembangan kebijakan pembiayaan perumahan dan permukiman	TARGET: Tersusunnya kebijakan untuk meningkatkan efektifitas pembiayaan perumahan dan permukiman sebanyak 1 (satu) Peraturan Menteri	TARGET B04: Draft Permenpera tentang kredit konstruksi.	B04: 100%	2 (dua) Draft Permenpera yang telah diselesaikan yaitu : 1 Draft Permenpera tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 2 Draft Permenpera tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak Murah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
					TARGET B06: Permenpera tentang bantuan pembiayaan perumahan FLPP kredit konstruksi sudah diterbitkan.	B06: 90%	Tahap finalisasi Permenpera terhadap empat Draft Permenpera, yaitu: 1 Draft Permenpera tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 2 Draft Permenpera tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 3 Draft Permenpera tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 4 Draft Permenpera tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
					TARGET B09: Laporan sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk kredit konstruksi mulai berjalan efektif.	B09: 60%	Sosialisasi 4 (empat) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam rangka operasionalisasi kebijakan FLPP untuk Kredit Konstruksi, yaitu : a. Permenpera Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan b. Permenpera Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
							c. Permenpera Nomor 10 Rahun 2011 tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan d. Permenpera Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan belum dapat dilakukan masih menunggu Perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Walaupun demikian beberapa hal sedang dilaksanakan terkait persiapan sosialisasi : a. Menteri Negara Perumahan Rakyat telah menyampaikan usulan penambahan jenis tarif layanan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan kepada Menteri Keuangan RI melalui surat nomor 120/M/PB.06.01/08/2011 tanggal 5 Agustus 2011. b. Deputi Bidang Pembiayaan dalam rangka persiapan operasionalisasi Permenpera terkait dengan Kredit Konstruksi (KK) untuk pembangunan Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Murah telah mengadakan rapat koordinasi intern pada tanggal 20 September 2011. c. Pemimpin BLU Pusat Pembiayaan Perumahan telah menyampaikan presentasi mengenai usulan tarif layanan KK kepada Tim Penilai di Kementerian Keuangan pada tanggal 23 September 2011.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
N6P33: Pengembangan perumahan dan permukiman							
							d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penambahan tarif layanan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan diharapkan dapat diterbitkan pada minggu ke 2 bulan Oktober 2011. e. Sosialisasi dalam rangka operasionalisasi kebijakan FLPP untuk Kredit Konstruksi akan dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Oktober 2011, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dan PKO dengan Bank Pelaksana. Bobot Capaian Sosialisai 100 %. Capaian Persiapan dan bahan sosialisasi 60 %
					TARGET B12: Laporan piloting pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk kredit kontruksi sebanyak 5.000 unit.	B12:	

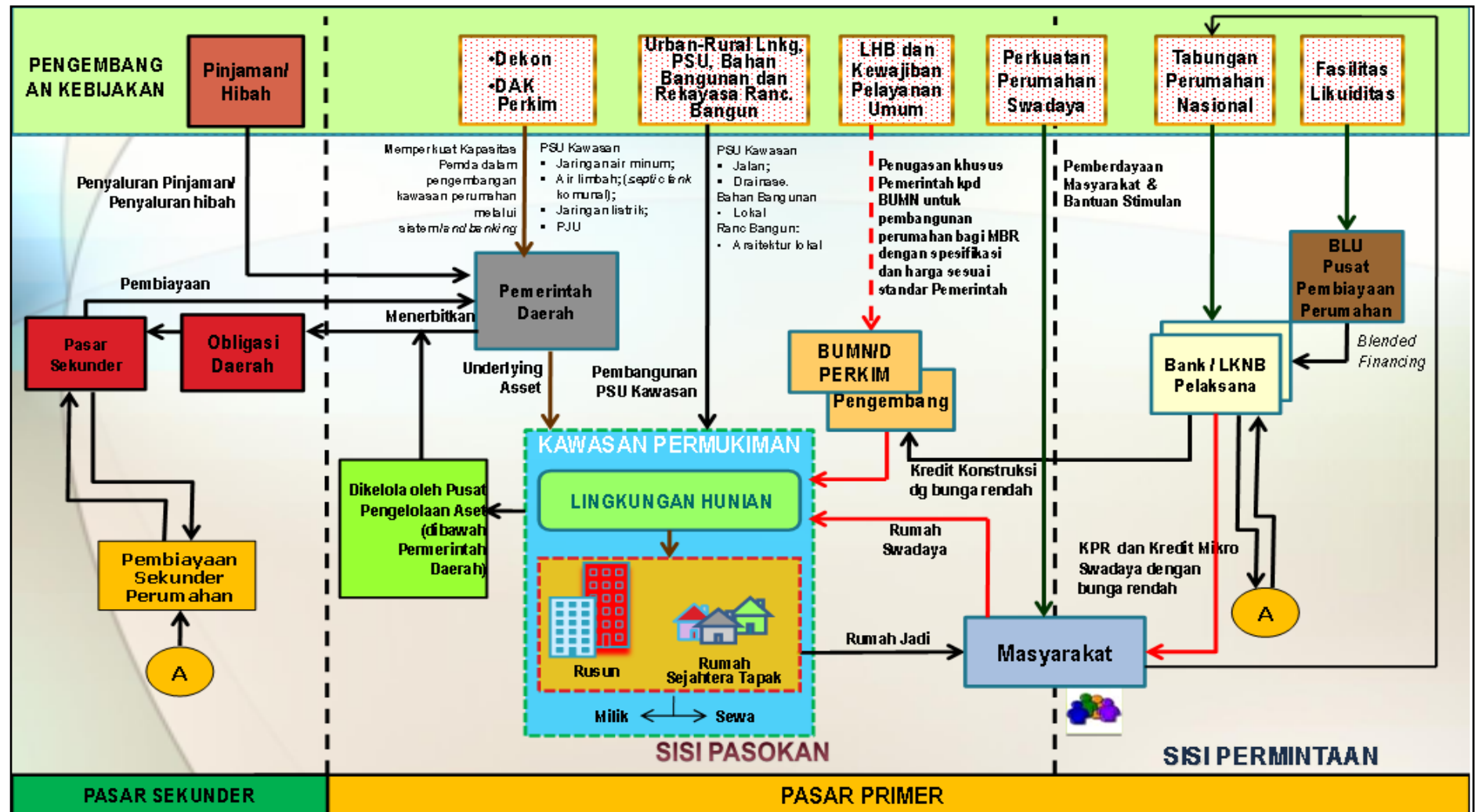
Sumber : Laporan Monitoring Inpres I Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Perumahan 2011 Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Check Point 3 B09: per 28 September 2011).

XVIII. KENDALA DAN LANGKAH PEMECAHAN

NO	BOTTLENECK		DEBOTTLENECKING
1.	KPR BERSUBSIDI TERKENDALA KETERSEDIAAN DANA MURAH JANGKA PANJANG	➡	PELEMBAGAAN FASILITAS LIKUIDITAS YANG MAMPU MENJAMIN PASOKAN DANA MURAH JANGKA PANJANG UNTUK Mendukung PENERBITAN KPR BERSUBSIDI.
2.	SUBSIDI BUNGA DENGAN MASA SUBSIDI TERBATAS PADA KPR BERSUBSIDI TIDAK SEPENUHNYA TERJANGKAU.	➡	KPR BERSUBSIDI DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS MENJAMIN ANGSURAN TERJANGKAU DAN TETAP SELAMA TENOR.
3.	KETERSEDIAAN LAHAN DI PERKOTAAN LANGKA DAN MAHAL	➡	- PEMBANGUNAN HUNIAN VERTIKAL (RUMAH SUSUN) - MENDORONG DAN FASILITASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG - PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR - KONSOLIDASI TANAH UNTUK PERUMAHAN MBR
4	KETERJANGKAUAN MBR TERHAMBAT PPN, PPH, DAN BPHTB	➡	PERCEPATAN REVISI: (1) PP DAN PMK TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF BEBAS PPN KEPADA KELOMPOK SASARAN DAN INSENTIF PPH FINAL KEPADA PENGEMBANG (2) PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BPHTB KEPADA KELOMPOK SASARAN
5	PENERBITAN IJIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIDAK EFISIEN, LAMA DAN MAHAL	➡	MELENGKAPI PERIZINAN SATU ATAP DENGAN PENETAPAN ATAS WAKTU DAN BIAYA PEMENUHAN SYARAT PERIZINAN
6	DUKUNGAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MASIH SANGAT KURANG	➡	- PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BERUPA PSU KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNTUK MBR MELENGKAPI PSU KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI APBN KEMENPERA - MENDORONG PARTISIPASI PEMDA DALAM PENYEDIAAN PSU
7	PENYEDIAAN HUNIAN LA-YAK HUNI DAN PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN BERMUKIM KEPADA MBR	➡	PERLUASAN CAKUPAN PNPM MANDIRI PERKIM MELALUI: - SERTIPIKASI TANAH MILIK MBR - KONSOLIDASI TANAH
8	PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH UNTUK PNS DAN TNI/POLRI	➡	- REVISI KEPPRES 14/1993 TTG TAPERUM-PNS - PELEMBAGAAN TABUNGAN PERUMAHAN NASIONAL

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XIX. ROAD MAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM 2020-2025



Sumber : RENSTRA Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014

XX. DIREKTIF PRESIDEN

A. RENCANA AKSI TERPADU PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER IV

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program Klaster keempat, disusun Rencana Aksi Terpadu yang mengintegrasikan 5 program klaster keempat , yaitu:

1. Program Rumah Sangat Murah Dan Murah
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat
4. Program Listrik Murah & Hemat
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Terpinggirkan Di Perkotaan

Kelompok Sasaran:



Masyarakat Nelayan

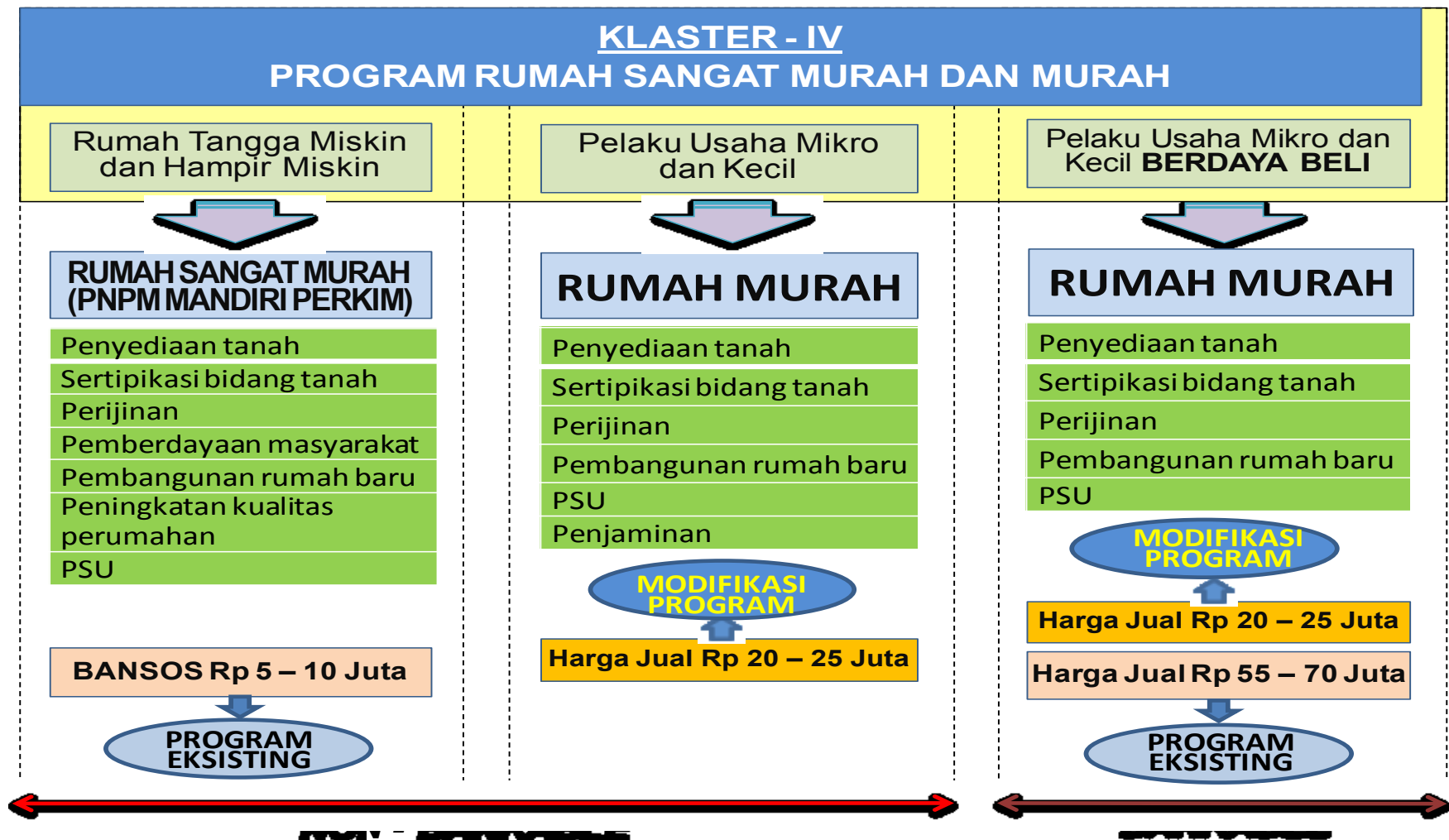


Masyarakat Pinggir Perkotaan



Masyarakat di Daerah Tertinggal

Sumber : Bahan Pembahasan RKA Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012 (Hotel Mercure, 3 Oktober 2011)

B. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT KLASER IV: PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

C. PENANGANAN RUMAH DI KAWASAN PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN TIMOR LESTE

LATAR BELAKANG:

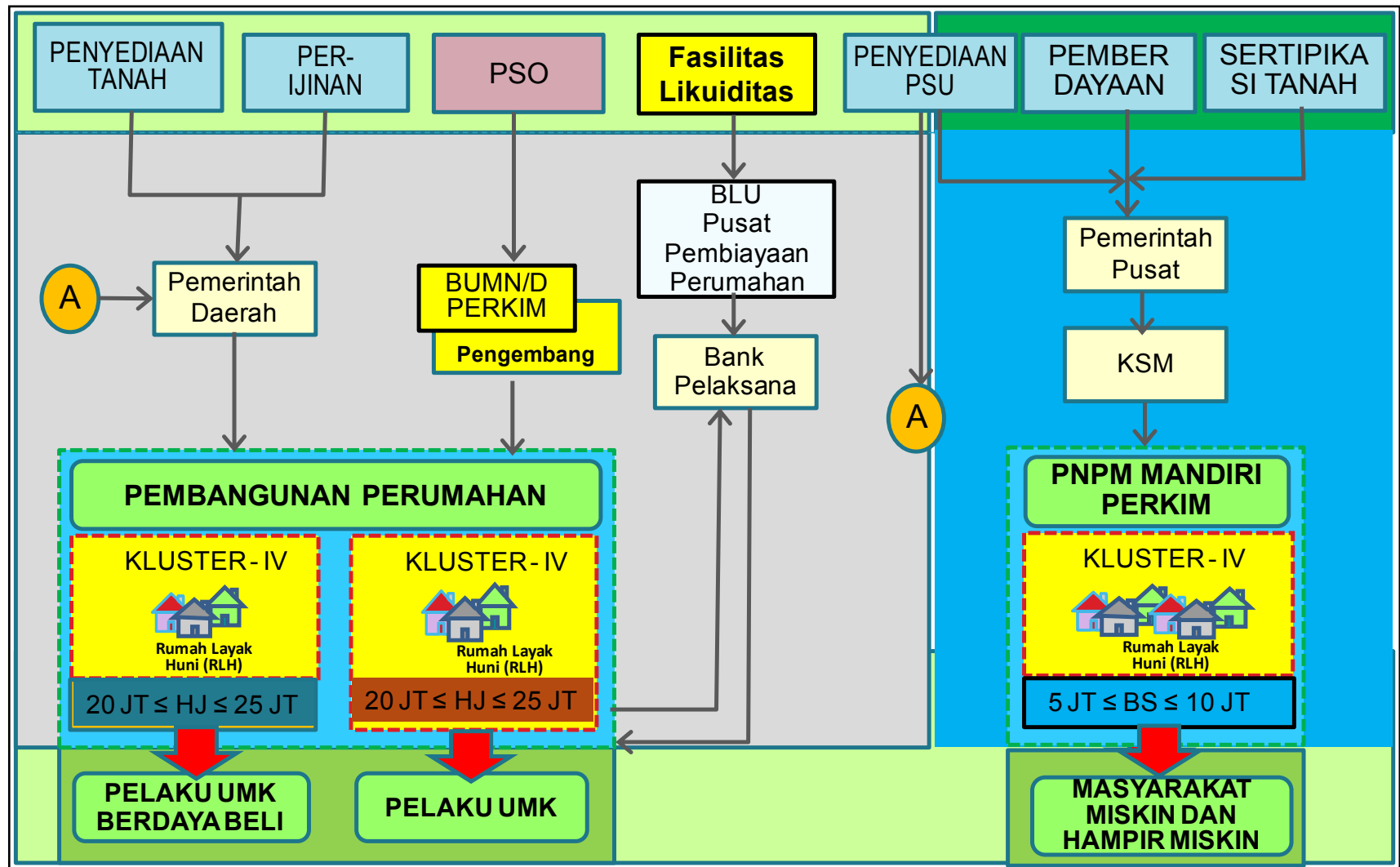
MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH BAGI WARGA BARU (EKS-PENGUNGSITIMOR TIMUR) DAN WARGA LOKAL DI PROVINSI NTT

RUANG LINGKUP KEGIATAN TA 2011-2012:

NO	URAIAN	TARGET
1.	Rumah Khusus	9.762 unit
2.	Rumah Baru Swadaya	6.070 unit
3.	Peningkatan Kualitas Swadaya	14.160 unit
4.	Kegiatan Pendukung	LS
	ANGGARAN	RP. 1 TRILYUN

Sumber : Bahan Pembahasan RKA Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012 (Hotel Mercure, 3 Oktober 2011)

D. SISTEM DELIVERI PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT



Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

E. PERSIAPAN RENCANA AKSI TERPADU PROGRAM PRO RAKYAT**e.1. Peran dan Kontribusi Kementerian/Lembaga Pokja I**

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KONTRIBUSI
1	Kementerian Perumahan Rakyat	Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh program K/L dalam rangka pembangunan rumah sangat murah dan murah
2	Kementerian PPN / Bappenas	Memastikan kesiapan perencanaan dan program pembangunan lintas K/L
3	Badan Pertanahan Nasional	Memfasilitasi proses konsolidasi tanah dan sertifikasi tanah di lokasi yg telah ditetapkan
4	Kementerian Keuangan	Menyediakan anggaran yang dibutuhkan dan percepatan pencairan anggaran
5	Kementerian Pekerjaan Umum	Memberikan konfirmasi atas Spek Teknis Rumah, sinkronisasi program dan dukungan penyediaan air bersih murah dan PSU Kawasan
6	Kementerian Dalam Negeri	Mengkomunikasikan program ke daerah-daerah dan mendorong Pemda dalam penyediaan tanah
7	Kementerian BUMN	Memastikan adanya alokasi dana CSR-BUMN utk pembangunan perumahan
8	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Memberikan informasi usulan lokasi pembangunan rumah murah dan sangat murah serta sinkronisasi program di daerah tertinggal dan kawasan nelayan
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
10	Kementerian ESDM	Dukungan listrik murah di lokasi sasaran
11	Perum Perumnas	Melaksanakan pembangunan rumah sangat murah dan murah dengan skim PSO.

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

e.2. SOP Penyediaan Rumah Sangat Murah

RENCANA AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Penyediaan Rumah Sangat Murah tahun 2011 sebanyak 50.000 unit			
1.	NON FISIK:		
	A. Penetapan Spesifikasi Teknis Rumah Sangat Murah	Kemenpera, Pemda	Kementerian PU
	B. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	Kemenpera	Pemda
	C. Perijinan (IMB)	Pemda	
	D. Sertifikasi bidang tanah	Kemenpera, BPN	Pemda
2.	FISIK:		
	A. Penyediaan Tanah	Masyarakat	
	B. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Masyarakat/KSM	Kemenpera, Kemen PU, Kemen ESDM, Pemda
	C. Pembangunan /Perbaikan Rumah dan PSU Swadaya	Masyarakat/KSM	Kemenpera
3.	SISTEM DELIVERI:		
	A. Penentuan Kelompok Sasaran	Pemda	KSM
	B. Pemberdayaan Masyarakat	Kemenpera	
	C. Penyaluran Bantuan Sosial	KSM, Kemenpera	Kementerian Keuangan
	D. Pengawasan dan Pengendalian	Kemenpera	Pemda

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

e.3. SOP Penyediaan Rumah Murah

RENCANA AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
1.	NON FISIK:		
	A. Perencanaan (Perencanaan Umum, AMDAL, Penyusunan DED dan Supervisi)	Kemenpera, Pemda	Kementerian LH, Kementerian PU, BUMN/D, Pengembang
	B. Penetapan Spesifikasi Teknis Rumah Murah	Kemenpera, Pemda	Kementerian PU
	C. Perijinan (Advice Planning, Ijin Lokasi, Site Plan dan IMB)	Pemda	
	D. Pajak dan Retribusi (BPHTB, PPh)	Kemenkeu	Pemda
2.	FISIK:		
	A. Penyediaan Tanah (Konsolidasi tanah, Pengadaan tanah, Pematangan tanah, dan Sertipikasi)	BPN, Pemda, Kemenpera	Perumnas, Kemenkeu, Bappenas
	B. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Kemenpera, Pemda	
	C. Pembangunan Rumah	Kemenpera	Pemda, BUMN/D, Perumnas, Pengembang
	D. Pengawasan Pembangunan Rumah Murah	Kemenpera, Pemda	
3.	SISTEM DELIVERI:		
	A. Penentuan Kelompok Sasaran	Kemenpera	Pemda, Kemen. Kelautan & Perikanan, Kementerian PDT
	B. Penyediaan Pokok Pinjaman	BLU FLPP, Bank Pelaksana	Kementerian Keuangan, Bappenas
	C. Penerbitan KPR	Bank Pelaksana	Pemda, BUMN/D, Perumnas, Pengembang
	D. Pengawasan dan Pengendalian	Kemenpera	Pemda

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

e.4. Rencana Aksi Terpadu

1. Pelaksanaan Program Pro Rakyat Klaster 4 pada Tahun 2012 akan dipadukan melalui Rencana Aksi Terpadu dengan 3 (tiga) kelompok sasaran sbb:
 - a) Masyarakat Daerah Nelayan;
 - b) Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - c) Masyarakat Pinggiran Perkotaan.

Rencana Aksi Terpadu Tahun 2012 disusun berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran di masing-masing K/L sesuai bidang tugas masing-masing.

2. Dalam rangka memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut, maka hal-hal yang perlu disiapkan sesuai arahan dari Bapak Wakil Presiden, yaitu:
 - a) Pemetaan lokasi Rencana Aksi Terpadu
 - i. Pemetaan lokasi Rencana Aksi Terpadu yang terperinci hingga ke tingkat desa yang dapat menunjukkan data Rumah Tangga Sasaran.
 - ii. Pelaksanaan Pemetaan akan dilaksanakan bersama dengan BPS.
 - iii. Lokasi Rumah Sangat Murah akan ditentukan oleh Kemenpera berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap usulan dari KKP (Data RTS di 400 PPI), usulan dari KPDT (Daerah Tertinggal selain Nelayan), dan usulan dari Pemerintah Daerah (Masyarakat Miskin Perkotaan).
 - b) Penyiapan lokasi percontohan Rencana Aksi Terpadu
 - i. Agenda mendesak adalah penyiapan lokasi percontohan Rencana Aksi terpadu,.
 - ii. Menko Perekonomian akan membentuk Tim Kecil yang merupakan perwakilan dari K/L terkait, yang bertanggung jawab dalam hal:
 - Menentukan lokasi percontohan
 - Verifikasi terhadap kesiapan lokasi percontohan
 - Persiapan pelaksanaan percontohan Rencana Aksi Terpadu

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

F. PERSIAPAN PEMBANGUNAN RUMAH MURAH

f.1. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah

	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN MASALAH
Ketersediaan (Availability)	Penyediaan dan Pematangan Lahan untuk Pembangunan Rumah Murah	
	- Hibah Tanah Pemda/BUMN, perlu disiapkan payung hukum dalam rangka menghibahkan tanah untuk pembangunan rumah murah	- Revisi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dengan memperluas cakupan peruntukkan sehingga tanah Pemda yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah murah dapat dijual di bawah NJOP
	- Penyiapan Tanah Matang	- DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman berupa PSU Kawasan perumahan dan permukiman diarahkan untuk pematangan lahan Pemda yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah murah
	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah	Penetapan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah
Aksesibilitas (Accessibility)	Akses Kredit untuk Pembangunan Rumah Murah	
	- RTS <i>non-bankable</i> sulit mengakses kredit	- Perlu ada regulasi khusus untuk menerapkan Penjaminan KPR Rumah Murah bagi RTS yang <i>non-bankable</i> dan/atau yang belum mampu menyediakan uang muka (untuk pinjaman ≤ Rp. 25 juta, uang muka dapat dihilangkan). Mekanisme penjaminan mengikuti mekanisme penjaminan KUR.
	- Keterbatasan sebagian RTS untuk menyediakan Uang Muka (<i>Down Payment</i> atau DP) yang dipersyaratkan oleh Bank.	- Perlu koordinasi dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan Loan to Value Ratio (LTV) sehingga kebutuhan DP bisa sekecil mungkin.
	- Ketepatan kelompok sasaran: perlu ada persyaratan NPWP	- Untuk memfasilitasi RTS dalam pemenuhan syarat NPWP, perlu disiapkan loket pengurusan NPWP di kantor Bank Pelaksana KPR Rumah Murah
Keberlanjutan (Sustainability)	- Penyebarluasan informasi mengenai program Pembangunan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah masih terbatas	- Peningkatan Sosialisasi mengenai Program Pembangunan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah baik melalui Media maupun kegiatan Dekonsentrasi
	- Kapasitas Pemda dalam melaksanakan Program Rumah Sangat Murah masih sangat terbatas.	- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemda melalui Dekonsentrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah mulai berjalan sejak tahun 2010.

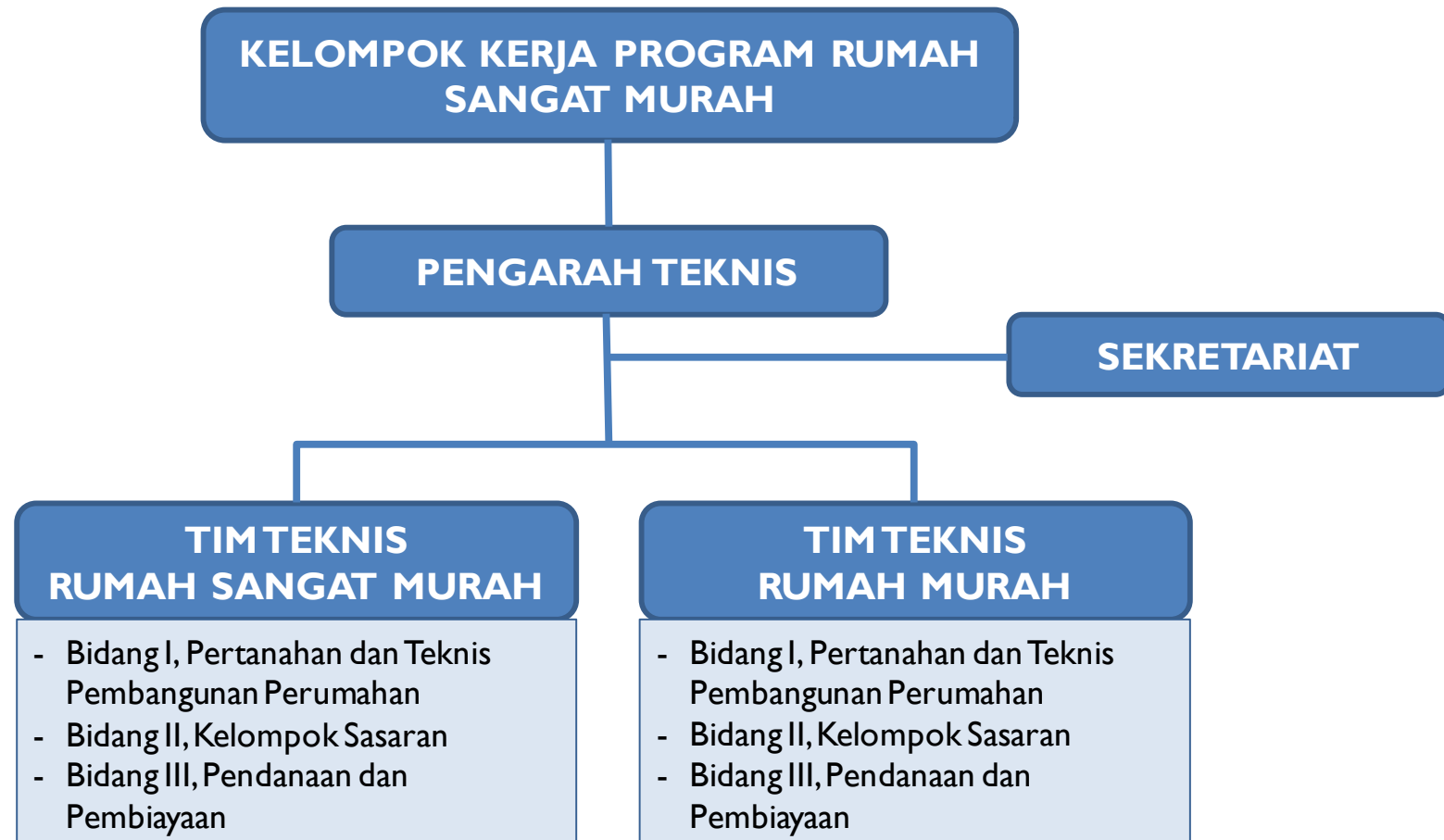
Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

f.2. Persiapan Teknis

Persiapan pelaksanaan pembangunan rumah murah perlu segera ditindaklanjuti:

- Identifikasi dan inventarisasi kesiapan lahan Pemda;
- Identifikasi dan Inventariasi kesiapan Pemda (Pemda yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah murah);
- Mekanisme Hibah Lahan Pemda untuk Pembangunan Rumah Murah yaitu melalui Revisi PP No. 38 Tahun 2008;
- Pembentukan Tim Teknis Rumah Sangat Murah;
- Penyiapan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah;
- Penyiapan Peraturan Menpera tentang Skim FLPP Rumah Murah;
- Rencana pembangunan rumah contoh;
- Sosialisasi dan Diseminasi Informasi mengenai Rencana Pembangunan Rumah Sangat Murah dan Rumah Murah;
- Penyiapan PSO Rumah Murah;
- Penyiapan Penjaminan KPR Rumah Murah;
- MoU dengan Bank Pelaksana.

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

G. TIM TEKNIS POKJA RUMAH SANGAT MURAH**g.1. Struktur Organisasi**

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

g.2. Susunan Keanggotaan

A. PENGARAH TEKNIS

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat

B. TIM TEKNIS RUMAH SANGAT MURAH

BIDANG I, PERTANAHAN DAN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN

- Asisten Deputi Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Pusat Pengembangan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen. Citpa Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
- Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Asisten Deputi Urusan Infastruktur Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

BIDANG II, KELOMPOK SASARAN

- Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat
- Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bidang Infastruktur Kesehatan dan Permukiman, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

BIDANG III, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri
- Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peneliti Eksekutif, Bank Indonesia
- Kepala Subdit Anggaran III/D, Kementerian Keuangan

C. TIM TEKNIS RUMAH MURAH**BIDANG I, PERTANAHAN DAN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

- Asisten Deputi Kerjasama Antar Lembaga, Kementerian Perumahan Rakyat
- Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
- Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pekerjaan Umum

BIDANG II, KELOMPOK SASARAN

- Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat
- Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kepala Bagian Disiplin dan Kesra, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri
- Kepala Bagian Perencanaan Program, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kepala Sub Direktorat Pengembangan Perumahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

BIDANG III, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Direktur Anggaran III, Kementerian Keuangan
- Peneliti Utama, Bank Indonesia
- Peneliti Senior, Bank Indonesia
- Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

D. SEKRETARIAT

- Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bagian Program, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bagian Data dan Pelaporan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bidang Strategi Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bidang Strategi Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bidang Strategi Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat
- Kepala Bidang Strategi Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

g.3. Tugas dan Tanggung Jawab

A. PENGARAH TEKNIS

- mengarahkan pelaksanaan kegiatan pokja rumah sangat murah;
- menetapkan kebijakan kegiatan pertanahan, teknis pembangunan perumahan, kelompok sasaran, pendanaan dan pembiayaan;
- melakukan koordinasi terhadap tugas tim teknis rumah sangat murah dan tim teknis rumah murah;
- melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis rumah sangat murah dan tim teknis rumah murah; dan
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Ketua Pokja Rumah sangat Murah secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

B. TIM TEKNIS RUMAH SANGAT MURAH

BIDANG I, PERTANAHAN DAN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN

- melakukan inventarisasi tanah negara yang dimungkinkan untuk digunakan dalam rangka pembangunan rumah sangat murah;
- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian terkait masalah pertanahan;
- melakukan identifikasi teknologi pembangunan rumah sangat murah yang efektif dan efisien;
- mengusulkan program terkait dengan pertanahan, teknis pembangunan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- melakukan verifikasi lokasi yang diusulkan oleh Pemda/BUMN/BUMD/Kementerian/Lembaga atau pihak-pihak lain yang mengusulkan lokasi pembangunan rumah sangat murah; dan
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Pengarah Teknis secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BIDANG II, KELOMPOK SASARAN

- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas kelompok sasaran rumah sangat murah;
- melakukan kajian tentang rumah sangat murah yang diperuntukan untuk kelompok sasaran yang tepat; dan
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Pengarah Teknis secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BIDANG III, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi pendanaan dan pembiayaan rumah sangat murah;
- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas kemungkinan pemberian bantuan dan/atau kemudahan bagi pembangunan rumah sangat murah;
- menyiapkan usulan program terkait dengan pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung rumah sangat murah;
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Pengarah Teknis secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

C. TIM TEKNIS RUMAH MURAH

BIDANG I, PERTANAHAN DAN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN

- melakukan inventarisasi tanah negara yang dimungkinkan untuk digunakan dalam rangka pembangunan rumah murah;
- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian terkait masalah pertanahan;
- melakukan identifikasi teknologi pembangunan rumah murah yang efektif dan efisien yang akan dibangun perumahan swadaya;
- mengusulkan program terkait dengan pertanahan, teknis pembangunan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- melakukan verifikasi lokasi yang diusulkan oleh Pemda/BUMN/BUMD/Kementerian/Lembaga atau pihak-pihak lain yang mengusulkan lokasi pembangunan rumah murah; dan
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Pengarah Teknis secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BIDANG II, KELOMPOK SASARAN

- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas kelompok sasaran rumah murah;
- melakukan kajian tentang rumah murah yang diperuntukan untuk kelompok sasaran yang tepat; dan
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Pengarah Teknis secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BIDANG III, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi pendanaan dan pembiayaan rumah murah
- melakukan kajian strategis dan memberikan rekomendasi atas kemungkinan pemberian bantuan dan/atau kemudahan bagi pembangunan rumah murah;
- menyiapkan usulan program terkait dengan pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung rumah murah; dan
- membuat dan menyiapkan laporan kepada Pengarah Teknis secara berkala dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

D. SEKRETARIAT

- memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pokja Rumah Sangat Murah;
- mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Pokja Rumah Sangat Murah;
- memfasilitasi pelaporan kegiatan Pokja Rumah Sangat Murah; dan
- mengelaborasi/menjabarkan rencana rangkaian kegiatan penyelenggaraan kegiatan Pokja Rumah Sangat Murah.

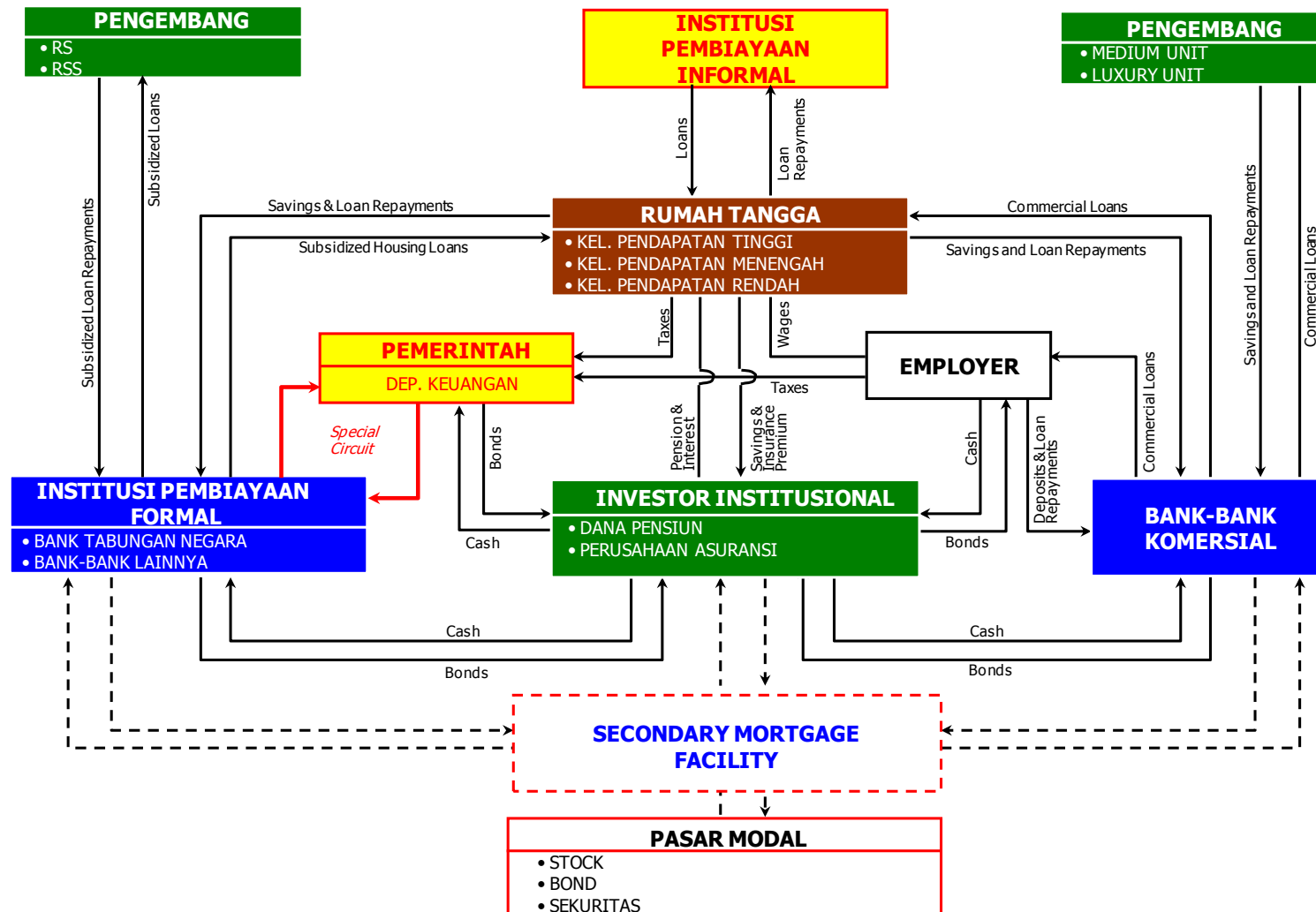
Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

H. SEBARAN RUMAH SANGAT MURAH TAHUN 2012

No.	Provinsi	Masyarakat Nelayan (PPI)			Masyarakat Daerah Tertinggal			MBR Kota			Total Per Provinsi		
		PB	PK	TOTAL	PB	PK	TOTAL	PB	PK	TOTAL	PB	PK	TOTAL
1	Aceh	512	508	1.020	300	300	600	453	487	940	1.265	1.295	2.560
2	Sumatera Utara	1044	1.036	2.080	225	225	450	407	438	845	1.676	1.699	3.375
3	Sumatera Barat	153	152	305	300	300	600	226	244	470	680	695	1.375
4	Riau	-	-	-	-	-	-	181	194	375	181	194	375
5	Kepulauan Riau	138	137	275	75	75	150	315	340	655	528	552	1.080
6	Jambi	40	40	80	-	-	-	135	145	280	175	185	360
7	Kep. Bangka Belitung	15	15	30	38	38	75	135	145	280	187	198	385
8	Bengkulu	10	10	20	225	225	450	272	293	565	507	528	1.035
9	Sumatera Selatan	50	50	100	263	263	525	361	389	750	674	701	1.375
10	Lampung	371	369	740	150	150	300	315	340	655	837	858	1.695
11	Banten	602	598	1.200	75	75	150	181	194	375	858	867	1.725
12	DKI Jakarta	133	132	265	-	-	-	-	-	-	133	132	265
13	Jawa Barat	896	889	1.785	75	75	150	588	633	1.220	1.559	1.596	3.155
14	Jawa Tengah	2301	2.282	4.583	-	-	-	1.129	1.216	2.345	3.430	3.498	6.928
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	135	145	280	135	145	280
16	Jawa Timur	1139	1.131	2.270	188	188	375	1.490	1.605	3.095	2.817	2.923	5.740
17	Bali	110	110	220	-	-	-	135	145	280	245	255	500
18	Nusa Tenggara Barat	118	117	235	300	300	600	315	340	655	733	757	1.490
19	Nusa Tenggara Timur	13	12	25	488	488	975	949	1.021	1.970	1.449	1.521	2.970
20	Kalimantan Barat	213	212	425	225	225	450	407	438	845	845	875	1.720
21	Kalimantan Tengah	50	50	100	38	38	75	91	99	190	179	186	365
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	75	75	150	91	99	190	166	174	340
23	Kalimantan Timur	95	95	190	113	113	225	91	99	190	299	306	605
24	Sulawesi Utara	10	10	20	113	113	225	181	194	375	303	317	620
25	Gorontalo	15	15	30	113	113	225	272	293	565	400	420	820
26	Sulawesi Tengah	35	35	70	375	375	750	407	438	845	817	848	1.665
27	Sulawesi Selatan	213	212	425	150	150	300	588	633	1.220	951	994	1.945
28	Sulawesi Tenggara	70	70	140	338	338	675	407	438	845	815	845	1.660
29	Sulawesi Barat	93	92	185	188	188	375	181	194	375	461	474	935
30	Maluku Utara	13	12	25	263	263	525	91	99	190	367	373	740
31	Maluku	-	-	-	300	300	600	315	340	655	615	640	1.255
32	Papua Barat	30	30	60	300	300	600	272	293	565	602	623	1.225
33	Papua	15	15	30	713	713	1.425	633	682	1.315	1.361	1.409	2.770
TOTAL		8500	8433	16.933	6.000	6.000	12.000	11.750	12.650	24.400	26.250	27.083	53.333

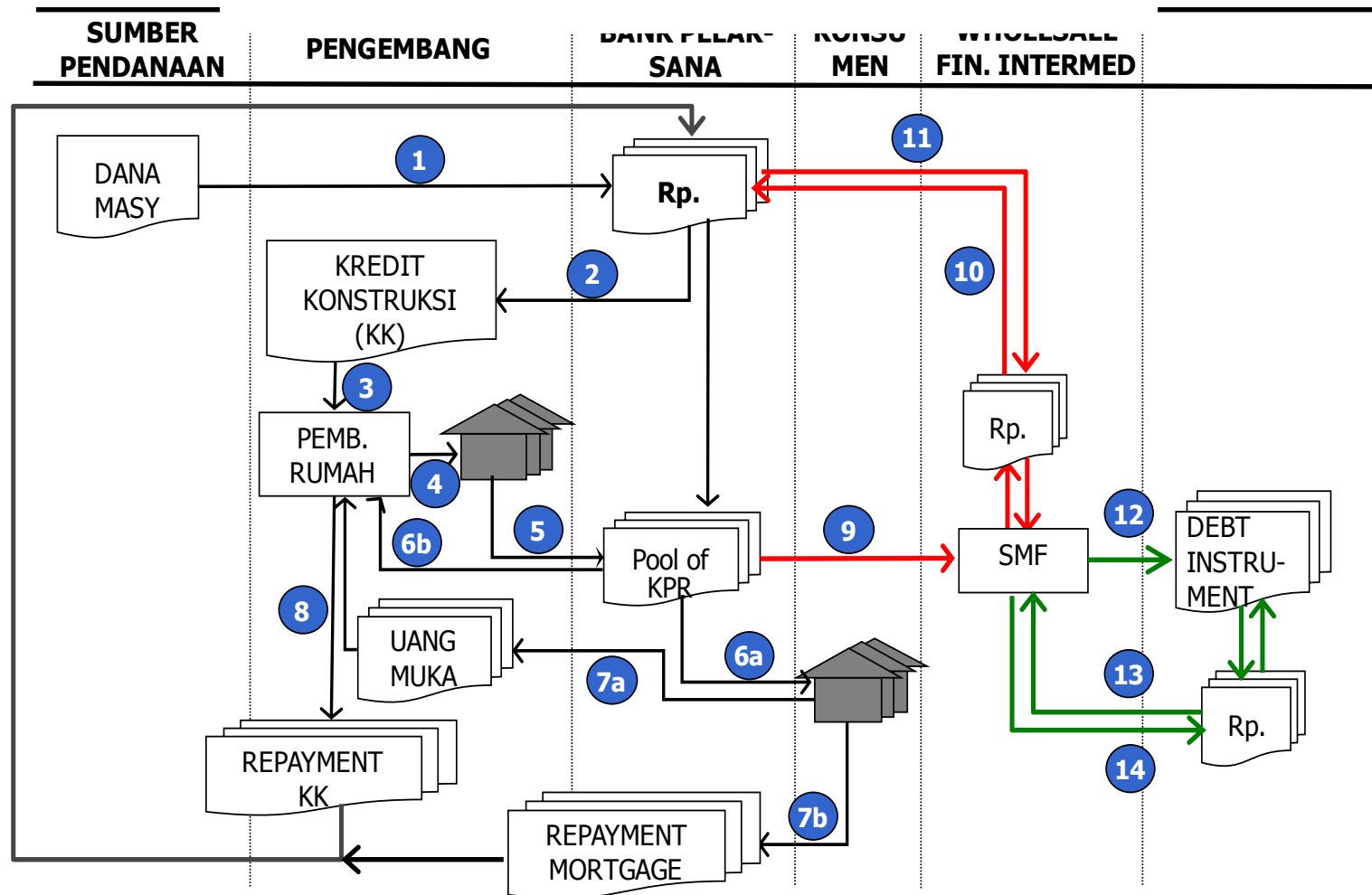
Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXI. SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN



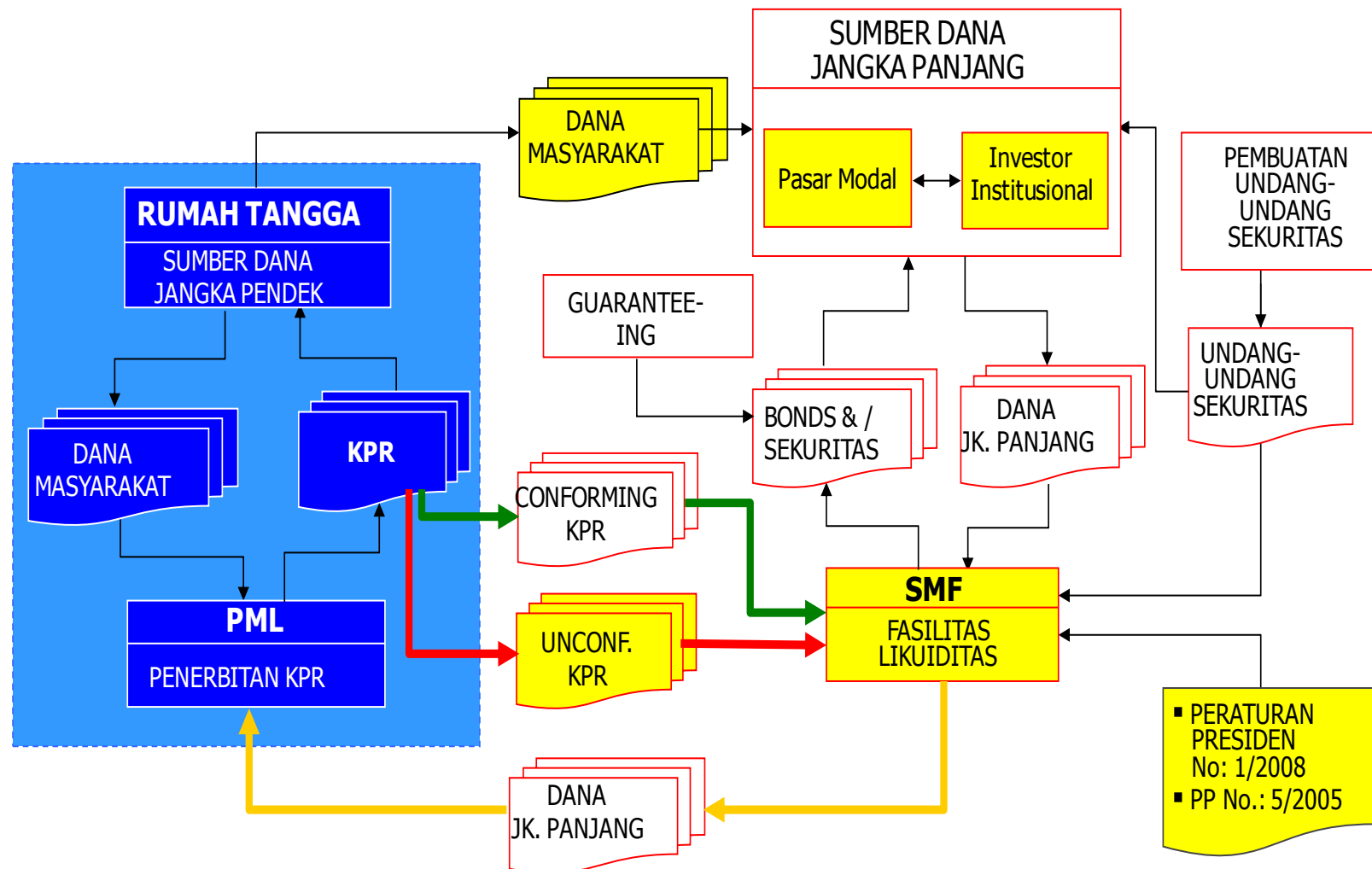
Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN DAN SMF



Sumber : Pusat Pembiayaan Perumahan

B. FASILITAS PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

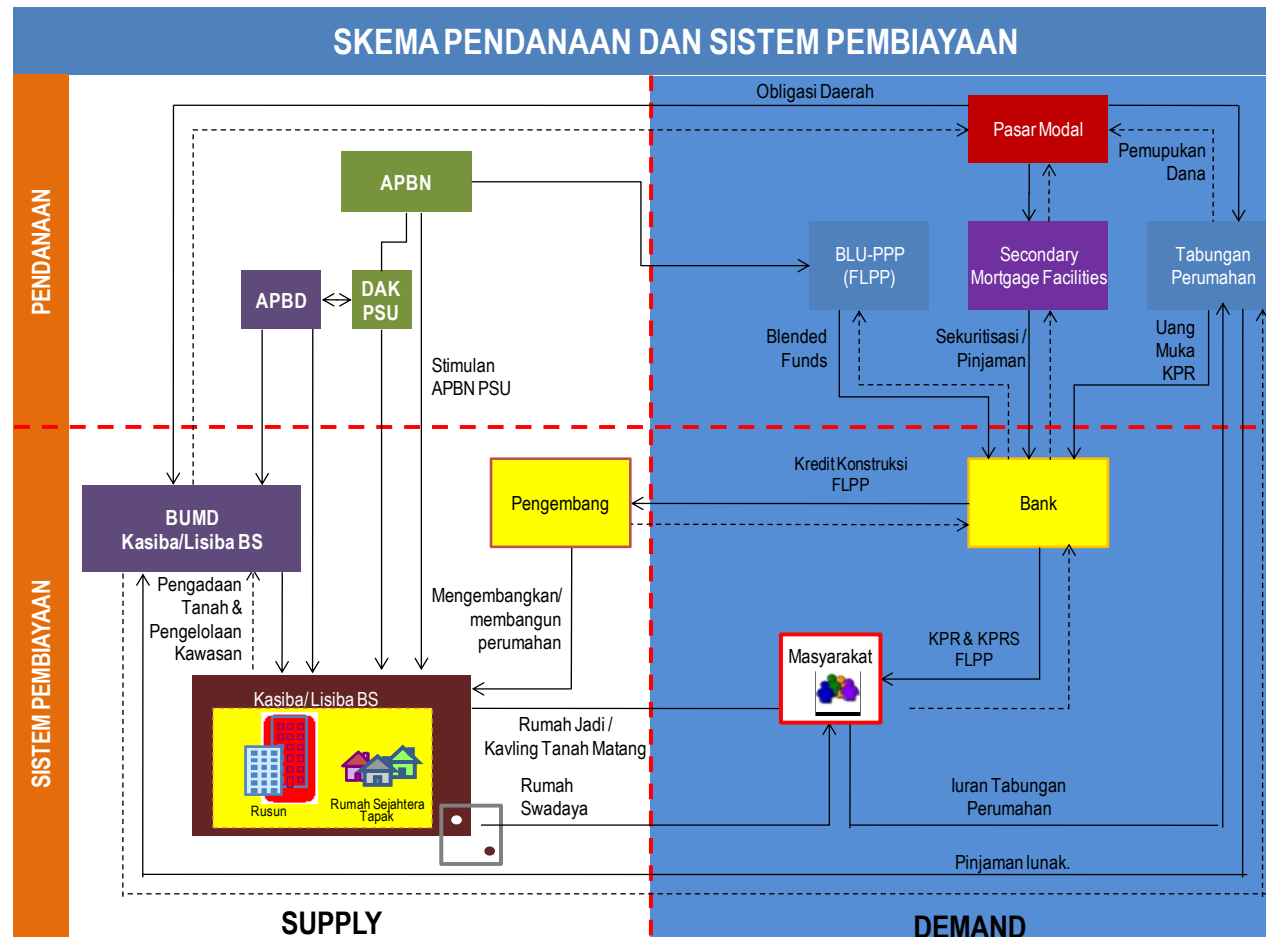


Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

XXII. REFORMASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

A. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS

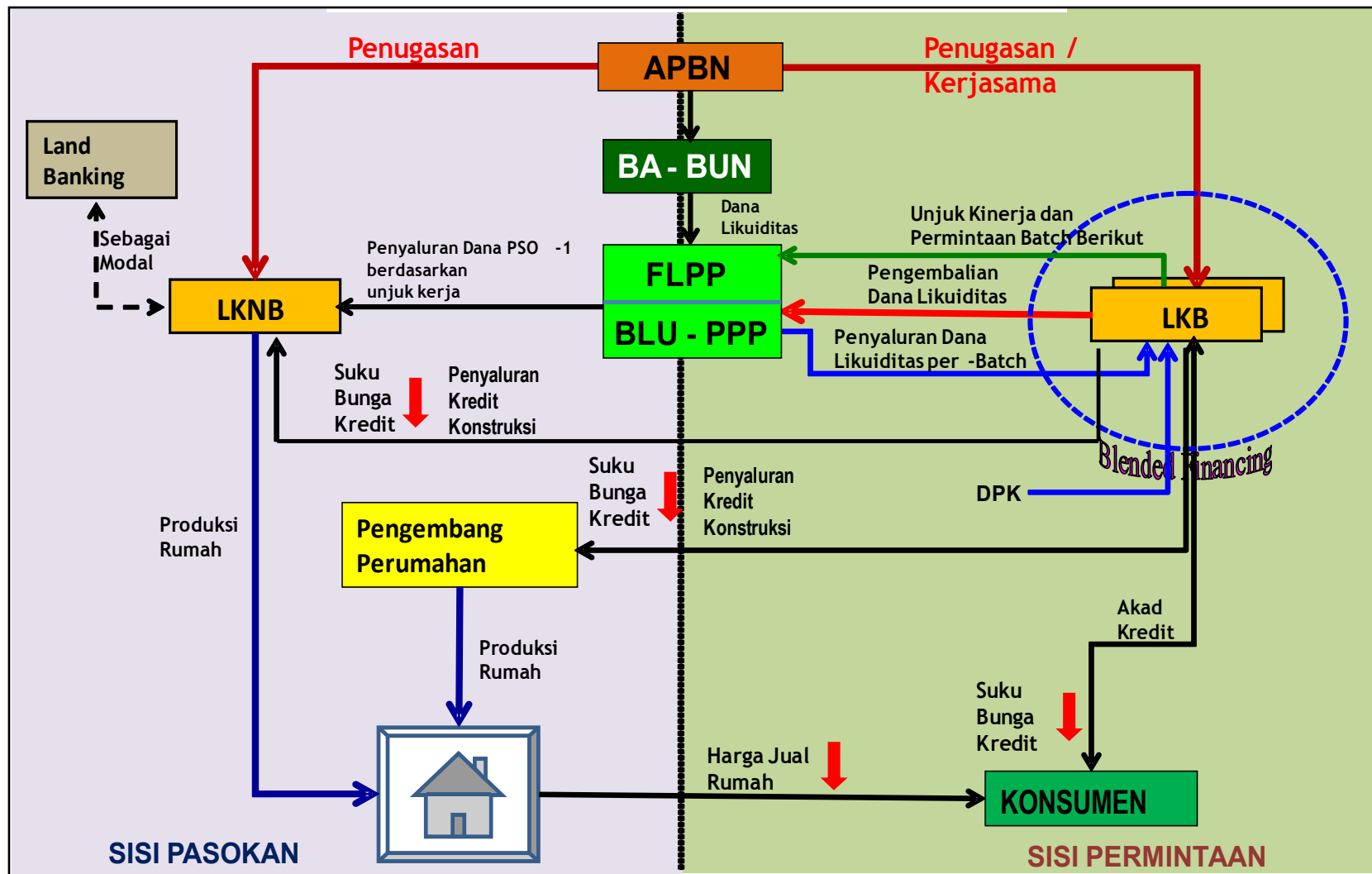
Sejak diluncurkannya Fasilitas Likuiditas pada Tahun 2010, telah berhasil dibiayai sebanyak 14.000 unit Rumah Sejahtera Tapak, dan 1.600 unit Rumah Sejahtera Susun.



1. Kemampuan/Daya Beli Masyarakat masih sangat terbatas dan kenaikan penghasilan/pendapatan setiap tahunnya tidak signifikan dibandingkan dengan laju inflasi per tahun;
2. Keterjangkauan angsuran KPR Bersubsidi diberikan secara terbatas selama masa subsidi (4 s/d 10 tahun);
3. Optimalisasi pemanfaatan dana APBN sejalan dengan keterbatasan keuangan negara;
4. Memerangi rejim suku bunga tinggi melalui penyediaan dana murah jangka panjang sampai dengan melembaganya Tabungan Perumahan Nasional (TPN);
5. Daya tarik bagi Sumber Dana lain untuk berperan dalam Pembiayaan Perumahan (integrasi sumber-sumber pembiayaan).

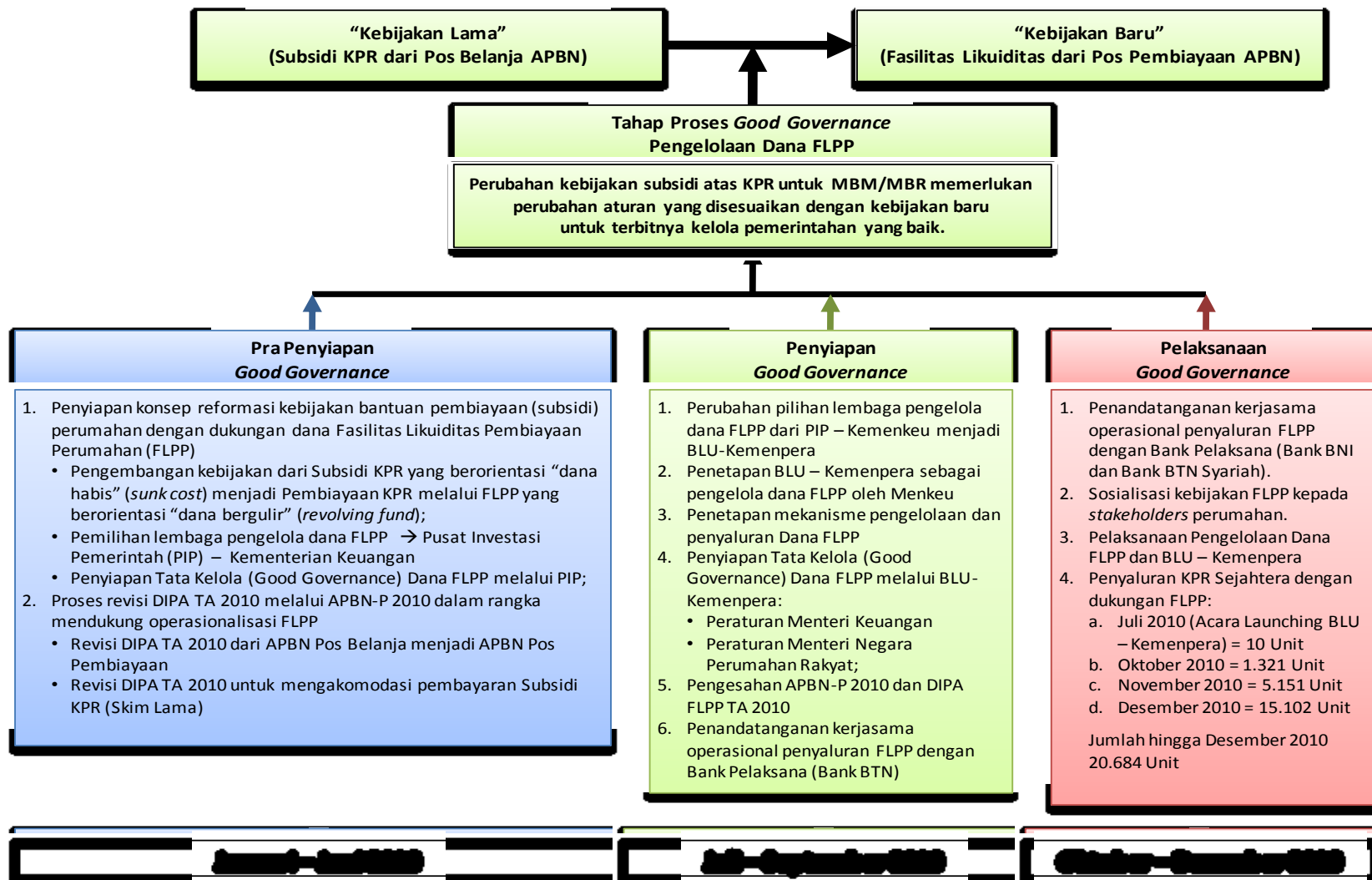
Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

B. KERANGKA KERJA FASILITAS LIKUIDITAS



Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

C. TAHAPAN PROSES TEROBOSAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN



Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

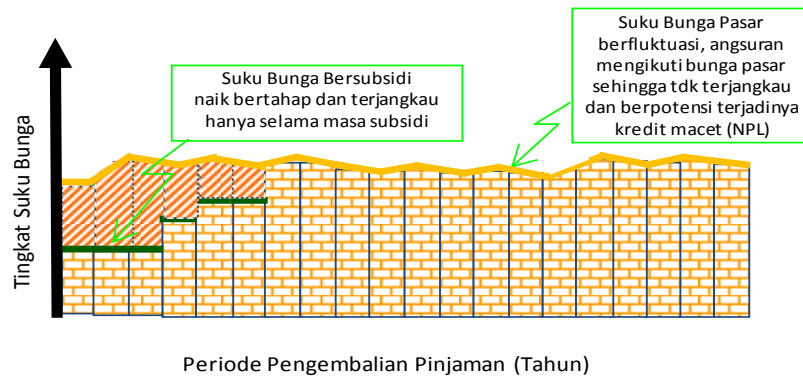
D. PERBANDINGAN KEBIJAKAN SKIM SUBSIDI DAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS

	SKIM SUBSIDI	SKIM FASILITAS LIKUIDITAS
Masa Subsidi	Terbatas, jangka waktu tertentu	Sepanjang masa pinjaman
Suku Bunga	Bunga bersubsidi dalam jangka waktu tertentu dan dilanjutkan bunga komersial (bank yang bersangkutan)	Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjang masa pinjaman (<i>fixed rate</i>)
Angsuran	Angsuran selama masa subsidi $\leq 1/3$ penghasilan, dan selanjutnya cenderung $\geq 1/3$ penghasilan tergantung bunga komersial	Angsuran selama masa pinjaman $\leq 1/3$ penghasilan
Dana APBN	Belanja Subsidi, merupakan dana habis (tidak kembali)	Belanja FL dalam pos pembiayaan/investasi sehingga bukan dana habis dan merupakan <i>revolving fund</i>
Alokasi APBN	Terus menerus	Setelah beberapa periode tertentu semakin berkurang dan terus mengecil sampai akhirnya tidak perlu ada alokasi atau ketika Tabungan Perumahan Nasional sudah melembaga
Sumber Dana	APBN	APBN + sumber dana lain
Penggunaan	Hanya untuk sisi permintaan (KPR Bersubsidi)	Untuk sisi permintaan (KPR) dengan tingkat bunga terjangkau (satu digit) dengan tenor sampai dengan 15 tahun
		Untuk sisi pasokan (Kredit Konstruksi) dengan tingkat bunga terjangkau (satu digit) dengan tenor sampai dengan 24 bulan

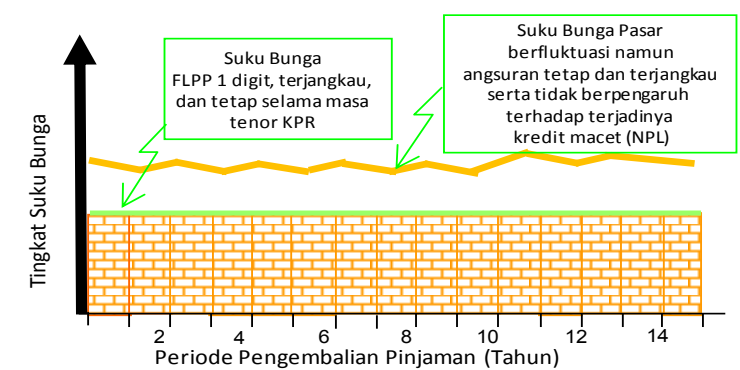
Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

E. PERBEDAAN KPR BERSUBSIDI DAN KPR FLPP

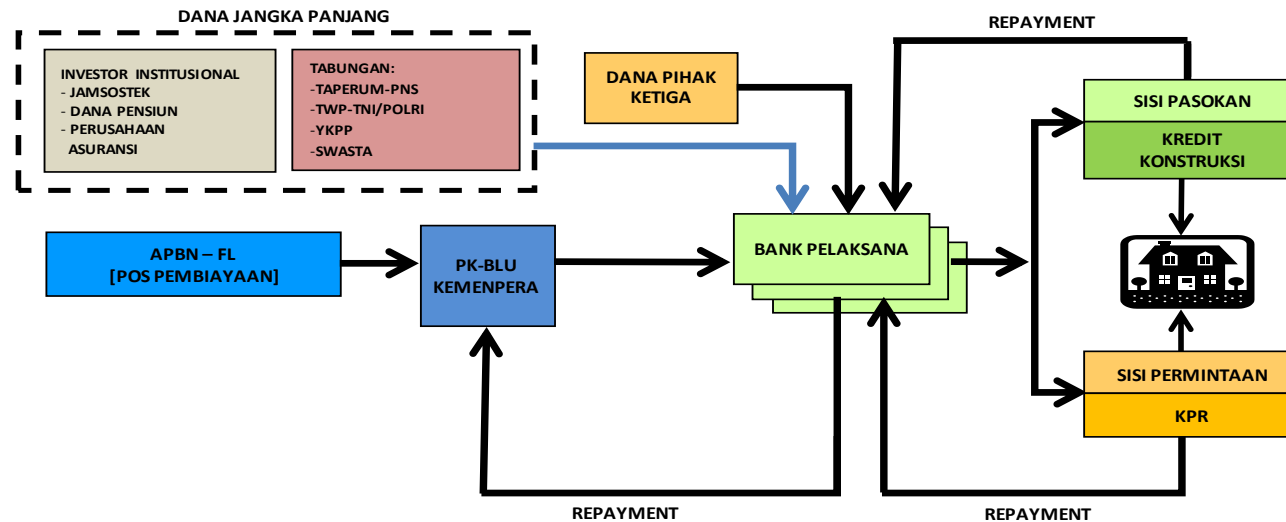
KPR dengan Skim Subsidi



KPR dengan Skim FLPP



Rencana Pelembagaan dan Operasionalisasi Dana FLPP



Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

F. KARAKTERISTIK SKIM FLPP**• KPR Sejahtera Tapak**

KPR Paling Banyak (Rp)	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
Bunga Paling Tinggi (%)	8,15	8,25	8,35	8,5

• KPR Sejahtera Syariah Tapak

KPR Paling Banyak (Rp)	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
Bunga Paling Tinggi (%) *	8,15	8,25	8,35	8,5

• KPR Sejahtera Susun

KPR Paling Banyak (Rp)	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	135.000.000
Bunga Paling Tinggi (%) *	9,25	9,35	9,5	9,65	9,80	9,95

• KPR Sejahtera Syariah Susun

KPR Paling Banyak (Rp)	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	135.000.000
Bunga Paling Tinggi (%) *	9,25	9,35	9,5	9,65	9,80	9,95

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

G. RENCANA FLPP 2011

No	Jenis Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target 2011		Alokasi APBN	Strategi Pencapaian Target
		Jumlah Unit	Vol.	(Rp.)	
1.	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Rumah Sejahtera melalui KPR-FLPP	155.925	unit	6,1 T	- Memperluas jaringan kerjasama dengan Bank pelaksana FLPP termasuk peningkatan peran Bank Pembangunan Daerah untuk berkontribusi dalam penyaluran FLPP - Secara proaktif berkoordinasi ke Kemenkeu untuk memastikan persetujuan usulan insentif pajak untuk KPR sejahtera tapak dengan memperhatikan Permenpera No. 14 Tahun 2010 - Melakukan monitoring penyelesaian permasalahan NPWP dan SPT oleh Debitur kepada Bank Pelaksana maupun APERSI/REI - Mendorong Bank Pelaksana FLPP maupun Bank Pembangunan Daerah untuk mengoptimalkan kembali tabungan uangmuka.
2.	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Rumah Sejahtera Murah melalui KPR-FLPP	5.000	unit		

Sumber : Deputy Bidang Pembiayaan

H. SIMULASI FLPP KPR SEJAHTERA TAPAK

- **Nilai KPR Rp. 50.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	50.000.000	30.850.000	19.150.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	61,70%	38,30%
3.	Bunga per tahun	8,15% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	10%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	186.774	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	33.619.360	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	491.257	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 60.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	60.000.000	36.402.000	23.598.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	60,67%	39,33%
3.	Bunga per tahun	8,25% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	10%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	220.543	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	39.697.725	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	593.095	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 70.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	70.000.000	41.748.000	28.252.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	59,64%	40.36%
3.	Bunga per tahun	8,35% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	10%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	253.105	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	45.558.903	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	696.139	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 80.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	80.000.000	46.400.000	33.600.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	58.00%	42.00%
3.	Bunga per tahun	8,50% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	10%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	282.047	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	50.768.541	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	802.803	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

I. SIMULASI FLPP KPR SEJAHTERA SUSUN

- Nilai KPR Rp. 90.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	90.000.000	45.099.000	44.901.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	50.11%	49.89%
3.	Bunga per tahun	9,25% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	12,5%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	276.240	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	49.723.226	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	944.217	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- Nilai KPR Rp. 100.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	100.000.000	49.100.000	50.900.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	49.10%	50.90%
3.	Bunga per tahun	9,30% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	12,5%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	300.784	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	54.141.199	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	1.055.279	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 110.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	110.000.000	52.195.000	57.805.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	47.45%	52.55%
3.	Bunga per tahun	9,50% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	12,5%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	320.686	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	57.723.409	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	1.170.984	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 120.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	120.000.000	55.104.000	64.896.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	45.92%	54.08%
3.	Bunga per tahun	9,65% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	12,5%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	338.696	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	60.965.211	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	1.288.580	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 130.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	130.000.000	57.551.000	72.449.000
2.	Porsi Dana FLPP	100%	44.27%	55.73%
3.	Bunga per tahun	9,80% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	12,5%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	354.805	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	63.864.831	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	1.408.077	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

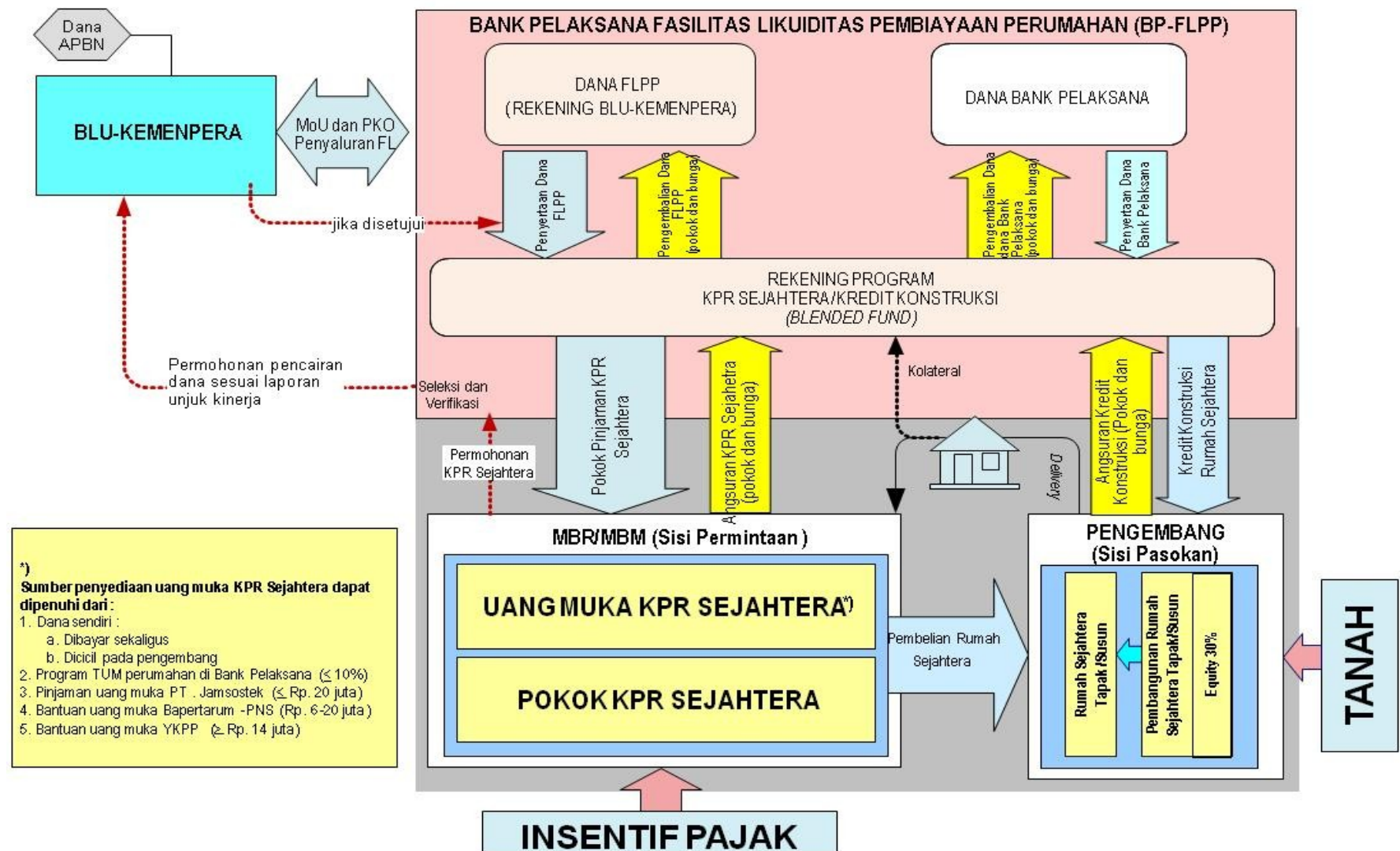
Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

- **Nilai KPR Rp. 135.000.000**

No	Uraian	Skim Fasilitas Likuiditas		
		Total	APBN (FLPP)	Bank
1.	Maksimum Nilai Kredit	135.000.000	57.604.500	77.395.500
2.	Porsi Dana FLPP	100%	42.67%	57.33%
3.	Bunga per tahun	9,95% anuitas		
4.	Tenor	Tidak diatur (simulasi 15 tahun)		
5.	Minimum uang muka	12,5%		
6.	Manfaat Fasilitas Likuiditas	(asumsi bunga pasar 13,99%)		
	a. Perbulan	Rp.	355.824	
	b. Selama Masa Kredit	Rp.	64.048.352	
7.	Angsuran per bulan	Rp.	1.474.861	
8.	Maksimum harga rumah	Tidak diatur		

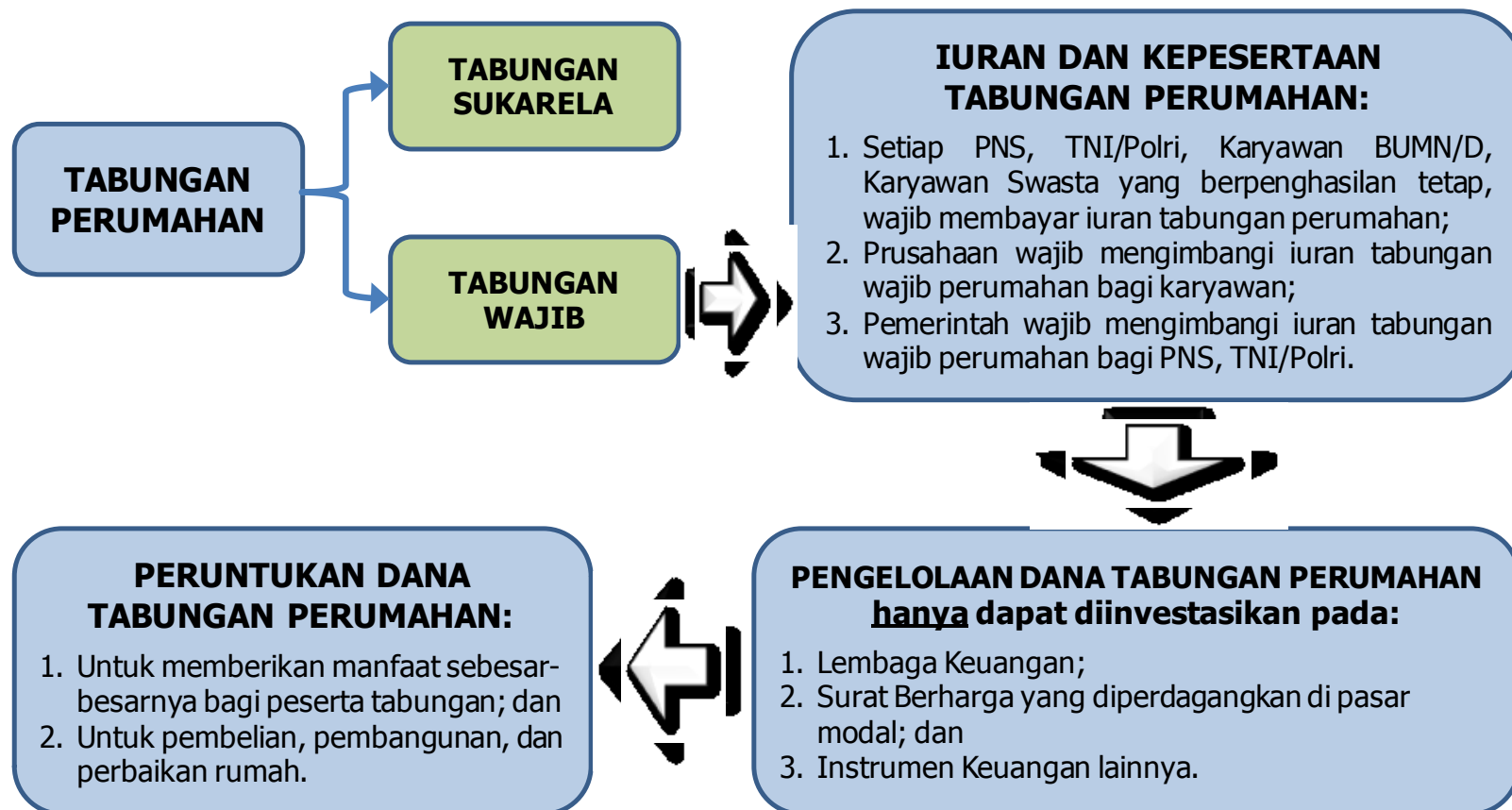
Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

J. KEBUTUHAN UANG MUKA KPR SEJAHTERA DAN PROFESIONALISME PENGEMBANG



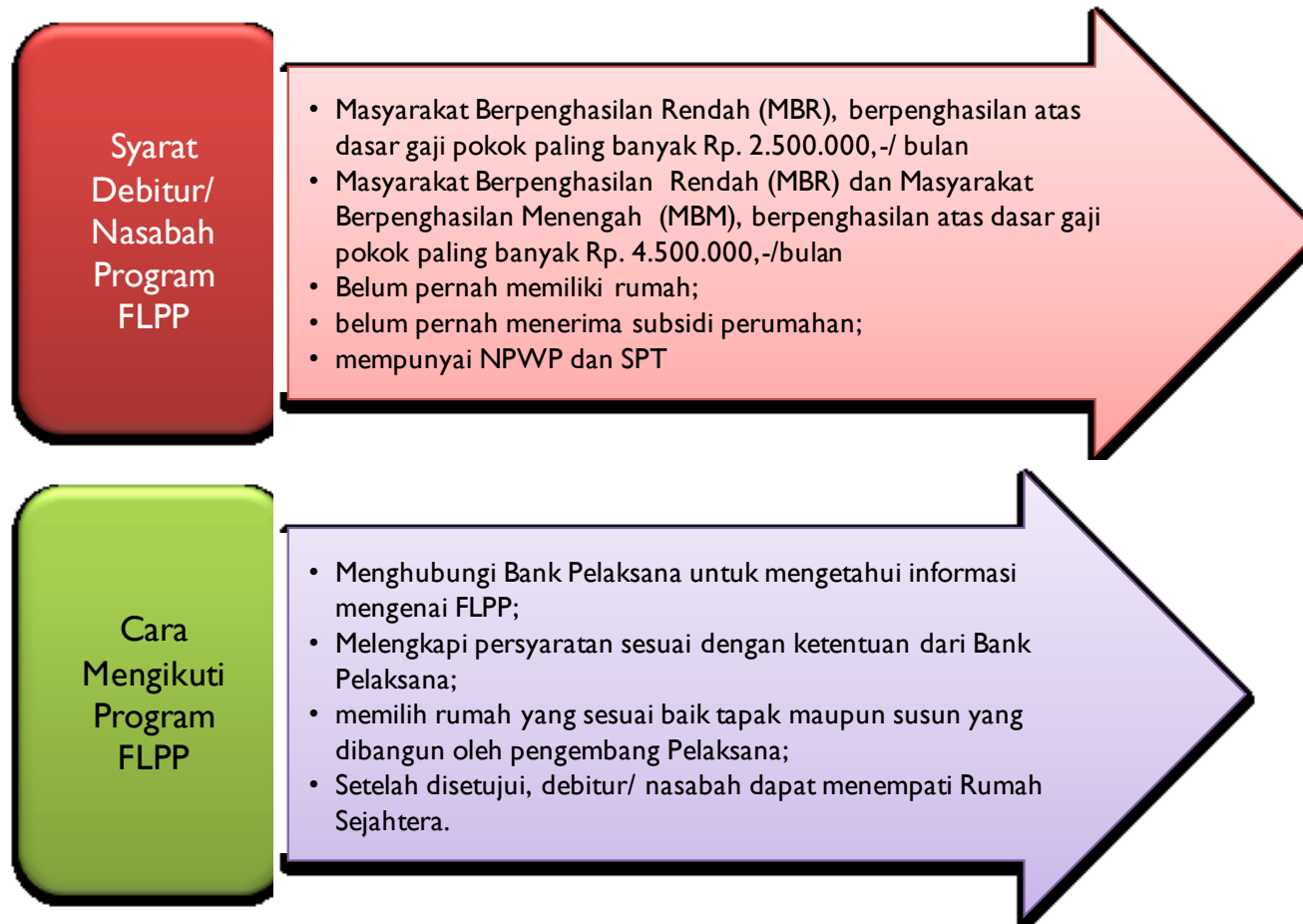
Sumber : Deputy Bidang Pembiayaan

K. PELEMBAGAAN TABUNGAN PERUMAHAN



**UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN**

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

L. SYARAT DAN CARA MENGIKUTI PROGRAM FLPP

Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

M. DAFTAR BANK PELAKSANA YG TELAH MELAKUKAN MOU/ PKO



BANK BUKOPIN



Sumber : Deputi Bidang Pembiayaan

N. REALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR PROGRAM FLPP

KETERANGAN	TARGET (Unit)	REALISASI SD 03 OKTOBER 2011		%
		Unit	Nilai FLPP	
RUMAH TAPAK	154.925	69.109	2.266.693.897.284	44,61%
RUMAH SUSUN	1.000	113	4.204.073.630	11,30%
RUMAH MURAH	5.000	-	-	-
TOTAL	160.925	69.222	2.270.897.970.914	43,02

REALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN KPR PROGRAM FLPP - PER BANK PELAKSANA

KETERANGAN	TARGET (Unit)	REALISASI SD 03 OKTOBER 2011		%
		Unit	Nilai FLPP	
BANK UMUM				
BTN	120.000	66.095	2.160.381.874.453	55,08%
BTN SYARIAH	3.231	3.004	106.201.967.089	92,97%
BUKOPIN	50.575	29	995.185.362	0,06%
BNI	2.750	91	3.193.664.010	3,31%
SUB TOTAL	176.556	69.219	2.270.772.690.914	
BANK PEMBANGUNAN DAERAH				
BPD KALTIM	277	-	-	0,00%
BPD NTT	1.000	-	-	0,00%
BPD PAPUA	500	-	-	0,00%
BPD RIAU KEPRI	1.100	-	-	0,00%
BPD RIAU KEPRI SYARIAH	200	-	-	0,00%
BPD SUMSEL & BABEL	690	-	-	0,00%
BPD SUMUT	301	3	125.280.000	0,00%
BPD SUMUT SYARIAH	878	-	-	0,00%
BPD JABAR BANTEN	1.587	-	-	0,00%
BPD YOGYAKARTA	100	-	-	0,00%
SUB TOTAL	6.633	3	125.280.000	
TOTAL	183.189	69.222	2.270.897.970.914	

Sumber : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan

XXIII. PROGRAM PENGEMBANGAN PKP BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

A. PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN

- 1) Lahan bagi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman semakin langka dan mahal. Program: Pengembangan Kebijakan Land Banking (Pencadangan Lahan) di Perkotaan.
- 2) Lingkungan kumuh diperkotaan cenderung meluas (54.000 ha tahun 2004 menjadi 59.000 ha tahun 2009). Program: Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
- 3) Dengan semakin padatnya lahan perkotaan, maka dibutuhkan alternatif pendekatan pengembangan kawasan melalui pengembangan kawasan bukan skala besar.
Program: Bantuan Stimulan PSU Kawasan.
- 4) Perencanaan perumahan dan permukiman di daerah belum terselenggara dengan baik. Program: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan di daerah melalui Bantek RP4D (RP3KP).
- 5) Pengembangan kawasan perumahan untuk mendukung fungsi-fungsi khusus (industri, perbatasan, nelayan, dll). Program: Pengembangan Kawasan Khusus.
- 6) Kerjasama Swasta/Masyarakat dan Pemerintah dalam pengembangan kawasan, masih relatif terbatas. Program: DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.
- 7) Perlunya pelaksanaan ujicoba pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di beberapa daerah. Program: Revitalisasi Kota Kekerabatan Maja.
- 8) Perlunya pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah yang telah berupaya dalam kerangka pembangunan rumah untuk MBR. Program: pemberian penghargaan Adiupaya Puritama.

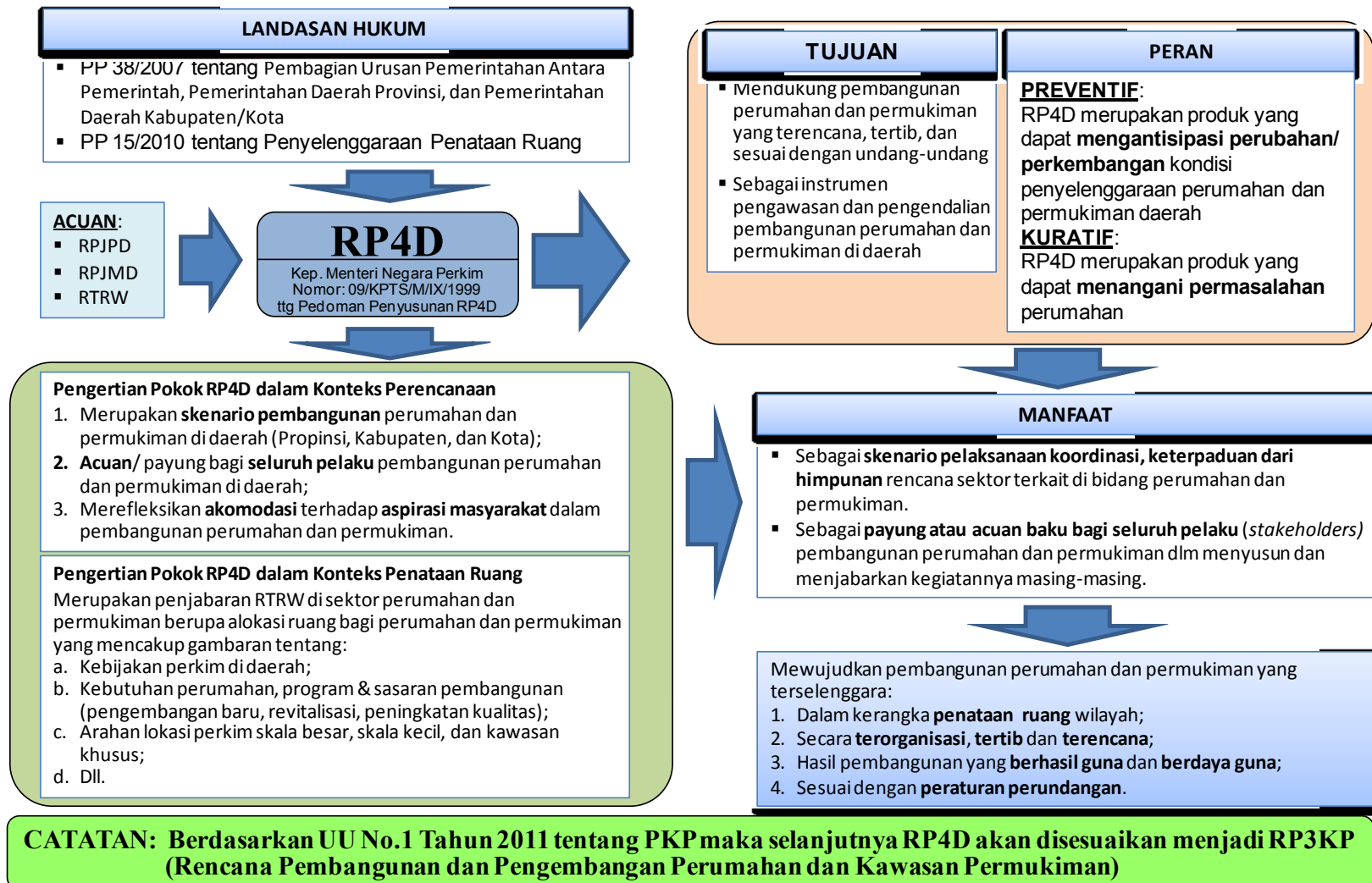
Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

B. PROGRAM PEMBANGUNAN PSU KAWASAN 2011



Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

C. RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH (RP4D)



Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

D. PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)



- Rumah tinggal yang layak merupakan hak dasar bagi masyarakat Indonesia
- Luas permukiman kumuh semakin meningkat, dari 54.000 Ha di Tahun 2004 menjadi seluas 57.800 Ha di Tahun 2009;
- Salah satu indikator MDG's dan pemenuhan tujuan UU Nomor 17 Tahun 2007 yang mengisyaratkan perkotaan bebas kumuh pada tahun 2025



Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan



Karakteristik PLP2K-BK:

1. Pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi)
2. Menata kawasan perkim yang terintegrasi dengan tata ruang
3. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui integrasi dengan sistem kegiatan kota
4. Melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan permukiman yang layak
5. Mengintegrasikan pendekatan sektor lainnya.



Komponen PLP2K-BK:

1. Penyusunan rencana PLP2K-BK;
2. Pembentukan tenaga penggerak masyarakat;
3. Melaksanakan Community Action Plan
4. Menyusun DED;
5. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Fisik PSU;
6. Supervisi;
7. Monev.

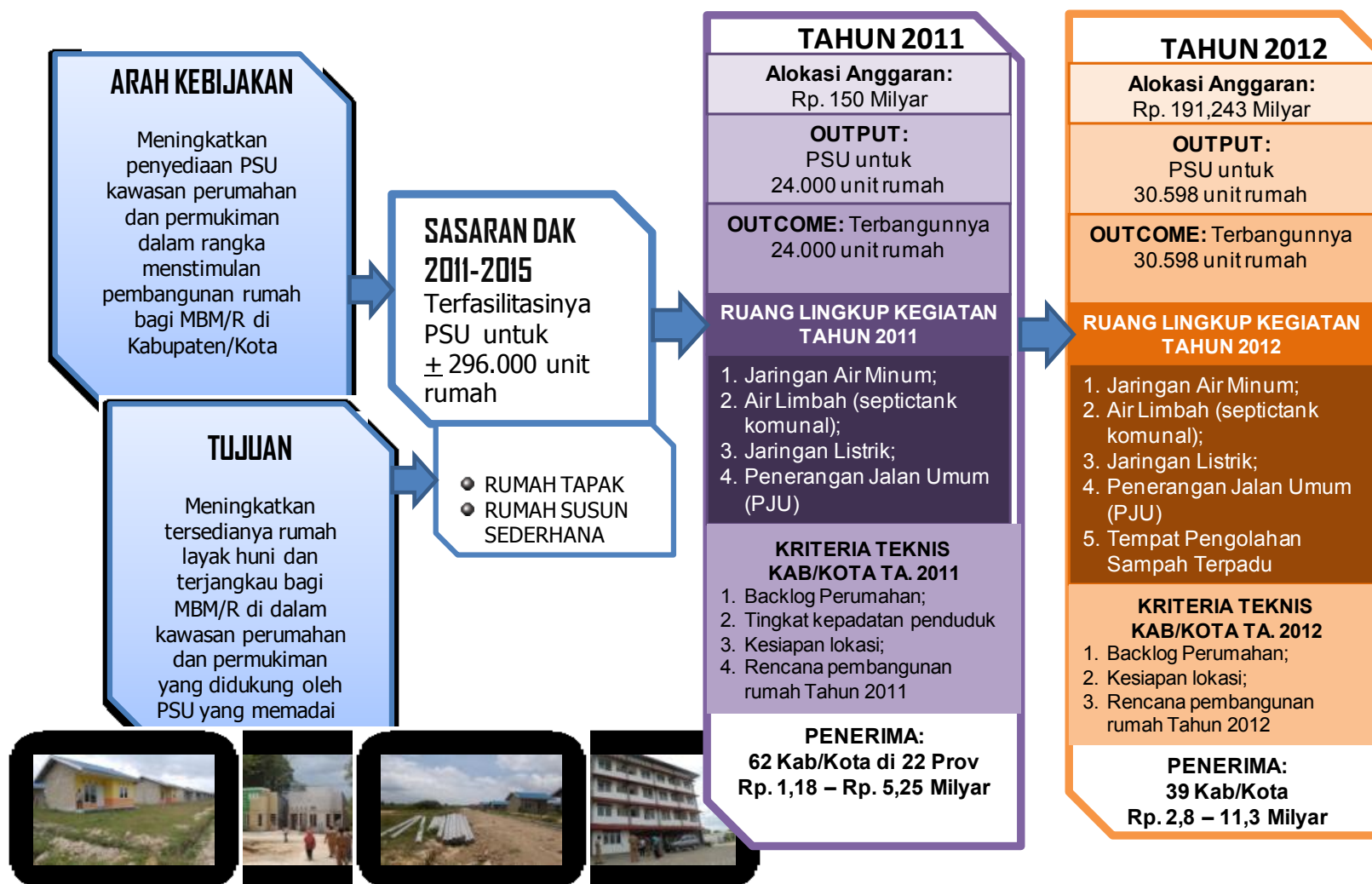
TA 2010 = 21 Lokasi
(75 Milyar)

TA 2011 = 25 Lokasi
(Rp. 160 Milyar)



Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

E. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

F. PROGRAM PENANGANAN RUMAH DI KAWASAN PERBATASAN PROVINSI NTT DAN TIMOR LESTE**I) Kondisi Eks Pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- Jumlah total warga baru (eks-pengungsi Timor Timur) tersebut mencapai 24.524 KK (104.436 jiwa);
- Sebagian besar warga baru saat ini bermukim di Timor Barat terutama di Kabupaten Belu (Atambua), Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Jumlah penduduk yang telah di-*resettlement* melalui pembangunan rumah baru mencapai sekitar 20.230 KK, yang terdiri dari 10.490 KK warga baru dan 9.740 KK warga lokal. Namun, kondisi perumahan yang dibangun tersebut ternyata sudah mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya didukung dengan PSU yang memadai;
- Warga baru yang masih tinggal di kamp pengungsian yang tersebar di beberapa kabupaten (terutama di Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang) berjumlah 4.762 KK. Kondisi lingkungan hunian di kamp pengungsian tersebut kurang layak dan tidak didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai. Selain itu, masih belum ada kepastian penyediaan tanah untuk *resettlement*;
- Kondisi perekonomian bagi sebagian besar warga baru masih memprihatinkan. Untuk itu, diperlukan pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

2) Program Penanganan Rumah Murah di Kawasan Perbatasan Prov. NTT dan Timor Leste

**PROGRAM/KEGIATAN TA 2011-2012**

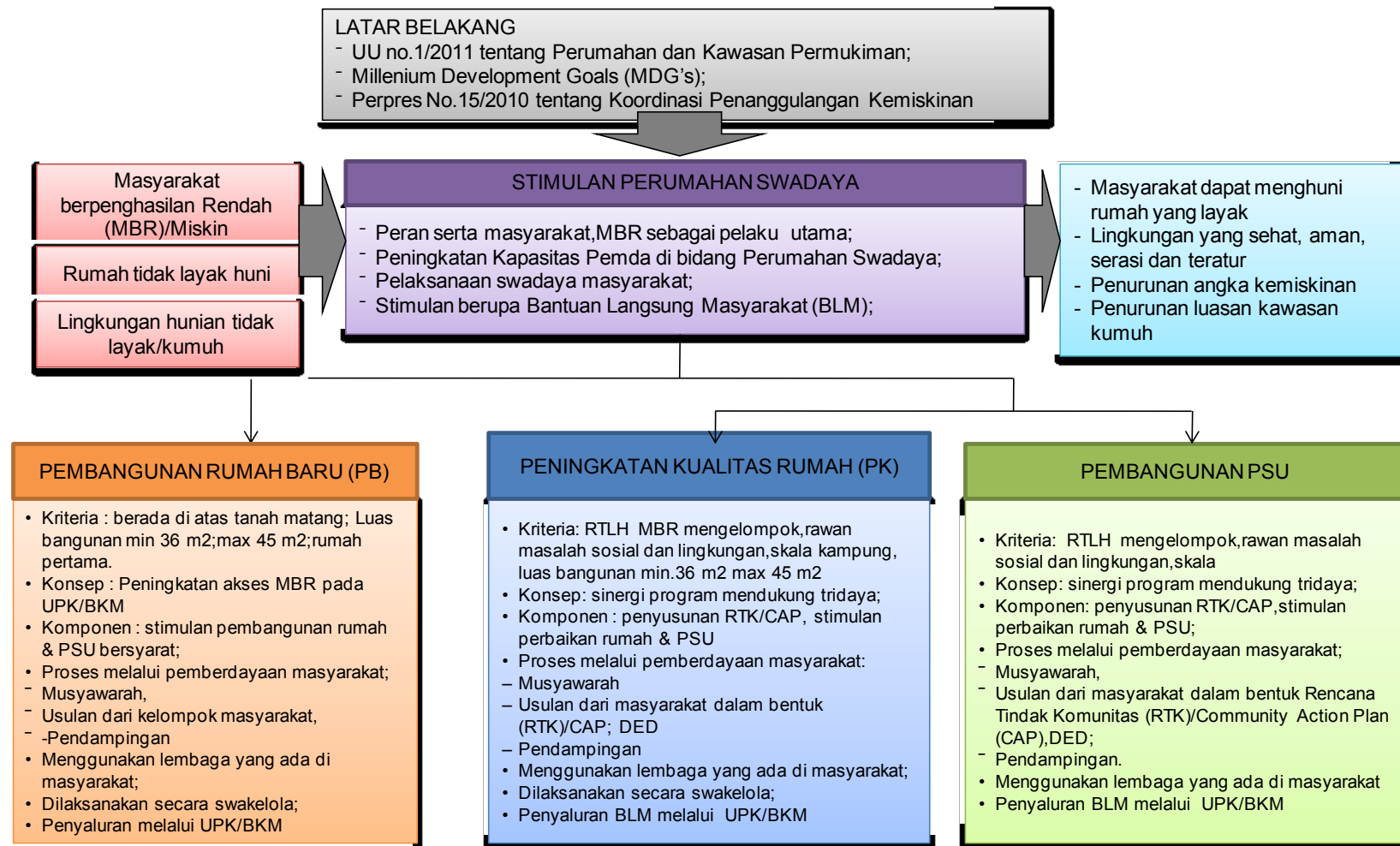
NO	URAIAN	TARGET	TA 2011	TA 2012
1.	Rumah Khusus	9.762 unit	5.600 unit	4.162 unit
2.	Rumah Baru Swadaya	6.070 unit	4.050 unit	2.020 unit
3.	Peningkatan Kualitas Swadaya	14.160 unit	1.000 unit	13.160 unit
4.	Kegiatan Pendukung	LS	LS	LS *)
	ANGGARAN	Rp. 1 Trilyun	Rp. 300 Milyar	Rp. 700 Milyar

*) TA 2012 termasuk kegiatan Fasilitas Pendampingan Pra-Sertifikasi untuk kepastian kepemilikan lahan bagi seluruh rumah yaitu 29.992 bidang

Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

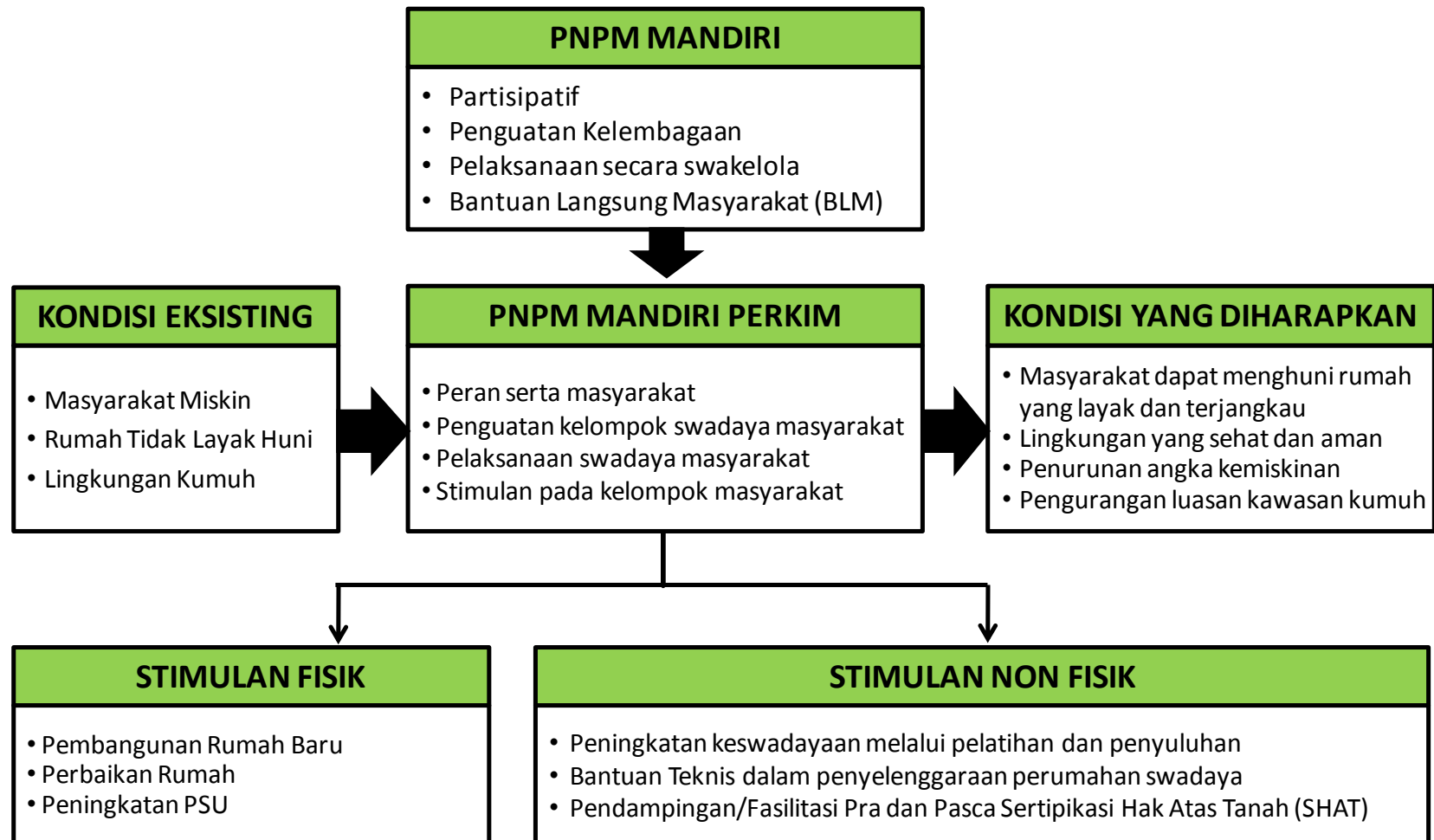
XXIV. PROGRAM PENGEMBANGAN PKP BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA



Sumber : Deputi Bidang Perumahan Swadaya

B. PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Sumber : Deputi Bidang Perumahan Swadaya

C. PROYEKSI KEBUTUHAN PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TAHUN	2010 (unit)	2011 (unit)	2012 (unit)	2013 (unit)	2014 (unit)	SASARAN (unit)
TERALOKASI	11.000	-	-	-	-	
USULAN (on-top)	11.000	84.000	85.000	84.000	75.000	
JUMLAH (unit)	22.000	84.000	85.000	84.000	75.000	350.000 (usulan yang belum teralokasi 339.000)

Keterangan:

- Jumlah penduduk miskin = 7 Jt KK (indikator masyarakat miskin 50% dilihat dari kondisi rumah)
- Asumsi KK miskin yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah adalah 10% x 7 juta KK = 700 ribu unit
- Asumsi kemampuan APBN = 50% x 700.000 unit = 350 ribu unit, yang mana sisanya melalui APBD, Masyarakat, LKM/LKNNB, CSR, dan Donor)

Sumber : Deputi Bidang Perumahan Swadaya

D. FASILITASI PRA DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH (SHAT)

TUJUAN

Mewujudkan mekanisme kerjasama penyiapan calon peserta kegiatan SHAT dalam rangka pemberdayaan MBR untuk membangun/memperbaiki rumah scr swadaya agar memiliki rumah yang layak huni.

RUANG LINGKUP

- Memverifikasi calon peserta pokja dan mekanisme penyiapan calon peserta berdasarkan kriteria yang ditentukan (SKPD kab/kota)
- Monitoring dan evaluasi serta pelatihan (pasca-sertifikasi)
- Akses ke sumber lain (pasca-sertifikasi)

MEKANISME PELAKSANAAN

- ❑ **Para-sertifikasi tanah** meliputi kegiatan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi untuk menyiapkan data calon peserta, yang dilaksanakan pada *periode tahun sebelum pelaksanaan sertifikasi (T-1)*.
- ❑ **Pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah**, dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada *periode tahun pelaksanaan sertifikasi (T)*.
- ❑ **Pasca-sertifikasi tanah** berupa pembinaan dan pendampingan MBR untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan dan sumber-sumber lainnya dalam rangka membangun/memperbaiki rumah secara swadaya untuk mendapatkan rumah yang layak huni, yg dilaksanakan pd *periode tahun setelah pelaksanaan sertifikasi (T+1)*.

TIM KOORDINASI PUSAT

- Kementerian Perumahan Rakyat
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)

TIM KOORDINASI PROVINSI

- SKPD Provinsi yg membidangi perumahan
- Bappeda Provinsi
- Kanwil BPN

TIM KOORDINASI KAB/KOTA

- Unsur instansi yang membidangi perkim
- Unsur pemerintah Kabupaten/Kota
- Kantor Pertanahan

KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT SHAT

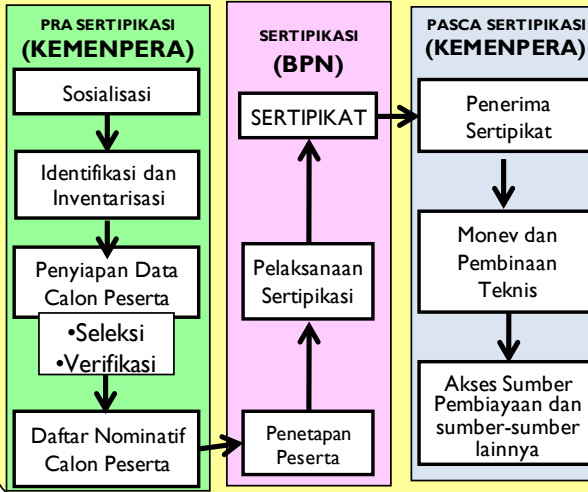
SUBYEK

- a. WNI
- b. Berkeluarga (memiliki akte perkawinan)
- c. Berpenghasilan tetap atau tidak tetap
- d. Mempunyai KTP/KK
- e. Memiliki tanah kosong atau mempunyai rumah tidak layak huni
- f. Berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan letak tanah yang akan disertipikatkan dan bidang tanah untuk rumah pertama

OBJEK

- a. Tanah dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya, tidak dalam sengketa dan tempat berdiri rumah yg akan dibangun atau diperbaiki
- b. Belum bersertipikat
- c. Tidak dalam keadaan dijaminkan
- d. Bukan tanah warisan yang belum dibagi
- e. Luas tanah maksimal 2.000 m² yang peruntukannya hanya untuk perumahan
- f. Penggunaan tanah sesuai RTRW Kab/Kota

BAGAN ALIR TAHAP SHAT UNTUK MBR



Sumber : Deputi Bidang Perumahan Swadaya

E. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT

NO	KEBIJAKAN	KLASTER - IV		
		Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil BERDAYA BELI
1	Non Bankable	✓	✓	-
2	Bankable	-	-	✓
3	Bantuan Pemerintah			
	a. Penyediaan Tanah	✓ (Pemda)	✓ (Pemda)	✓ (Pemda)
	b. Sertifikasi Tanah	✓	✓	✓
	c. PSU	✓	✓	✓
	d. Pembangunan Rumah	✓	✓	✓
	e. Bantuan Pembiayaan			
	- Bantuan Sosial	✓	-	-
	- Belanja Barang	✓	-	-
	- Subsidi	-	-	-
	- Pembiayaan (FLPP)	-	✓	✓
	f. Penjaminan	-	✓	-
4	Bantuan PKBL-BUMN/D			
	a. Penyediaan Tanah	✓	✓	✓
	b. Pembangunan Rumah	✓	✓	✓

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

F. SASARAN PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH

RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)	PENDAPATAN PER BULAN	HARGA RUMAH	PROGRAM	CONTOH RTS
MISKIN DAN HAMPIR MISKIN	$P < 1,2 \text{ JT}$ (<i>non-bankable</i>)	BANSOS: 5 JT – 10 JT	EKSISTING DAN PRO RAKYAT	• NELAYAN • PETANI PENGGARAP • BURUH HARIAN
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2,0 \text{ JT}$ (<i>non-bankable</i>)	20 JT – 25 JT	PROGRAM BARU PRO RAKYAT	• WIRAUSAHA MIKRO • PEKERJA KONTRAK
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL BERDAYA BELI	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2,0 \text{ JT}$ (<i>bankable</i>)	20 JT – 25 JT	PROGRAM BARU PRO RAKYAT	• PNS • TNI • POLRI • PEKERJA SWASTA JAMSOSTEK
	$P \leq 2,5 \text{ JT}$ (<i>bankable</i>)	55 – 70 JT	EKSISTING	

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

G. KARAKTERISTIK PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT

NO	KARAKTERISTIK	RT MISKIN DAN HAMPIR MISKIN	PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	PELAKU UMK BERDAYA BELI
1	PENDAPATAN	$P < 1,2 \text{ JT}$	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2 \text{ JT}$ (NON-BANKABLE)	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2 \text{ JT}$ (BANKABLE)
2	PROGRAM	BANSOS – STIMULAN PB/PK: 5 – 10 JT	KPR UTK HARGA JUAL RUMAH: 20 – 25 JT	KPR UTK HARGA JUAL RUMAH: 20 – 25 JT
3	BUNGA KPR PER TAHUN	-	5% – 6,42%	5% – 6,42%
4	UANG MUKA	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	TENOR	-	s.d. 15 TAHUN	s.d. 15 TAHUN
6	PORSI FLPP	-	80 % s.d. 95%	80 % s.d. 95%
7	ANGSURAN PER BULAN	-	Rp 160.623,- s.d. Rp 220.481,-	Rp 160.623,- s.d. Rp 220.481,-
8	KAPASITAS ANGSUR PER BULAN (15%)	-	Rp 180.000,- s.d. Rp 300.000,-	Rp 180.000,- s.d. Rp 300.000,-
9	PENJAMINAN/ASURANSI KPR	-	PEMERINTAH	TIDAK ADA
10	SUMBER DANA	APBN, BUMN, CSR SWASTA	ABPN/D, BUMN/D, KOPERASI, SWASTA	ABPN/D, BUMN/D, KOPERASI, SWASTA
11	PELAKSANA	KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)	LEMBAGA KEUANGAN BANK/NON BANK	LEMBAGA KEUANGAN BANK/NON BANK
12	KONSEP RUMAH	RUMAH INTI TUMBUH (RIT) TIPE-18	RUMAH TIPE-36	RUMAH TIPE-36
13	RENCANA 2011 - 2014	350 RIBU	325 RIBU UNIT	325 RIBU UNIT

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

H. RENCANA AKSI TERPADU TA 2012: PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH

No.	Sasaran	Kegiatan	Target	Komponen	Pembiayaan	
					Anggaran (Rp. Juta)	Sumber
1.	Masyarakat Nelayan	a. Pembangunan Baru	8,500 Unit	a. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru	93,500.00	APBN KEMENPERA
				b. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	8,500.00	
				sub total a	102,000.00	
		b. Peningkatan Kualitas	8,433 Unit	a. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas	50,602.00	
				b. Bantuan Stimulan PSU	42,165.00	
				c. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	8,433.00	
		sub total b	101,200.00			
TOTAL		16,933 Unit		203,200.00		
2.	Masyarakat Daerah Tertinggal	a. Pembangunan Baru	6,000 Unit	a. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru	66,000.00	APBN KEMENPERA
				b. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	6,000.00	
				sub total a	72,000.00	
		b. Peningkatan Kualitas	6,000 Unit	a. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas	36,000.00	
				b. PSU	30,000.00	
				c. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	6,000.00	
		sub total b	72,000.00			
TOTAL		12,000 Unit		144,000.00		
3.	Masyarakat Miskin Perkotaan	a. Pembangunan Baru	11,750 Unit	a. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru	129,250.00	APBN KEMENPERA
			3,750 Unit	b. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	11,750.00	
				c. Pendampingan pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi	3,000.00	
			sub total a	144,000.00		
		b. Peningkatan Kualitas	12,650 Unit	a. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas	75,900.00	
				b. PSU	63,250.00	
			3,750 Unit	c. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya	12,650.00	
				c. Pendampingan pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi	3,000.00	
		sub total b	154,800.00			
TOTAL		24,400 Unit		298,800.00		

Keterangan:

Pelaksanaan pembangunan rumah sangat murah diberikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

Harga satuan untuk:

- a. Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah baru Rp. 11 juta/unit
- b. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rp. 6 juta/unit
- c. Bantuan Stimulan PSU Rp. 5 juta/unit
- d. Pendampingan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya Rp. 1 juta/unit
- e. Pendampingan pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi Rp. 800 ribu/unit

Sumber : Deputi Bidang Perumahan Swadaya

XXV. PROGRAM PENGEMBANGAN PKP BIDANG PERUMAHAN FORMAL

A. PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL



Kondisi Eksisting:

1. *Backlog*
2. Urbanisasi
3. Kelangkaan Lahan di Perkotaan
4. Kapasitas Fiskal Daerah
5. Dukungan Perumahan di Daerah Khusus (perbatasan)

Fungsi Deputi Bidang Perumahan Formal

1. Penyusunan Kebijakan di Bidang Perumahan Formal
2. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Formal
3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang Masalah atau Kegiatan Bidang Perumahan Formal (PERMENPERA No.21 TAHUN 2010)

PROGRAM KEGIATAN	PEMBANGUNAN RUSUNAWA	FASILITASI RUSUNAMI	PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS	FASILITASI RUMAH TAPAK
SASARAN	Pekerja, TNI/POLRI, mahasiswa, santri	Masyarakat MBM	Pekerja di daerah perbatasan (TNI/POLRI, pegawai kesehatan, pendidik, penjaga mercusuar, dsb)	Masyarakat MBM
PERTANAHAN	Tanah disediakan pengusul	Tanah disediakan pengembang	Tanah disediakan pengusul	Tanah disediakan pengembang
PROGRAM DAN PERENCANAAN	Pemograman Pembangunan Rusunawa	Pemograman Rusunami	Pemograman Pembangunan Rumah Khusus	Pemograman Fasilitas Rumah Tapak
	Perencanaan Pembangunan	Perencanaan dan Pentahapan	Perencanaan Pembangunan	Penetapan Standarisasi
	Verifikasi (administrasi & teknis)		Verifikasi (administrasi & teknis)	
PERIJINAN	Dukungan Pemda/Pemkot	Dukungan Pemda/Pemkot	Dukungan Pemda/Pemkot	Dukungan Pemda/Pemkot
MONITORING DAN EVALUASI	Monitoring Program	Monitoring Program Rusunami	Monitoring Program	Monitoring Program
	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Layanan Pengaduan Konsumen	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Layanan Pengaduan Konsumen
	Monitoring Pemanfaatan	Evaluasi Fasilitas Rusunami	Monitoring Pemanfaatan	Evaluasi Fasilitas Rumah Tapak
	Evaluasi Program		Evaluasi Program	
SUMBER ANGGARAN	APBN dan dukungan sharing instansi pengusul atau pemda/pemkot setempat	Pihak Swasta	APBN dan dukungan sharing instansi pengusul atau pemda/pemkot setempat	Pihak Swasta
DUKUNGAN LAINNYA	Sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi program, bimbingan teknis, bantuan teknis, pendampingan dan pembinaan serta penghargaan kepada pengelola rusunawa	Sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, bantuan teknis, pendampingan dan pembinaan serta kajian standarisasi	Sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi program, bimbingan teknis, bantuan teknis dan pembinaan serta pendampingan	Sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, bantuan teknis, pendampingan, pembinaan dan kajian standarisasi serta penghargaan kepada pengembang berwawasan lingkungan

Benefit langsung:

1. Terbangunnya Rusunawa/Rusus dan terpenuhinya kebutuhan unit hunian untuk kelompok sasaran;
2. Terciptanya Lapangan Kerja;
3. Meningkatnya pasokan Rumah Susun/Khusus.

Benefit tidak langsung:

1. Berkontribusi terhadap pengurangan *Backlog*;
2. Peningkatan produktivitas;
3. Meningkatnya kesejahteraan;
4. Mendukung kegiatan belajar dan mencegah tawuran mahasiswa.

Sumber : Deputi Bidang Perumahan Formal

B. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA SEWA/RUSUNAWA

- Dalam rangka menyediakan rumah layak huni bagi seluruh keluarga Indonesia, Pemerintah memberikan perhatian kepada MBR yang belum mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumahnya melalui kepemilikan
- Pemerintah memprogramkan pembangunan Rumah Sejahtera Susun Sewa yang sebelumnya dikenal dengan Rusunawa

PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN SEWA/ RUSUNAWA

Target pembangunan Rusunawa selama 2010-2014 sebanyak 380 TB

**PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
SEWA (RUSUNAWA) 2010
SEBANYAK 49 TB**

**PEMBANGUNAN RUMAH
SEJAHTERA SUSUN
SEWA/RUSUNAWA TAHUN 2011
SEBANYAK 143 TB**

**TARGET PEMBANGUNAN RUSUNAWA
KEMENPERA 2010-2014**

PERUNTUKKAN:

- TNI/Polri
 - Pekerja (Swasta dan PNS)
 - dan lain-lain
- sebanyak 36.480 unit atau 380 TB**

Catatan: 1 TB = 96 Unit

Sumber : Deputi Bidang Perumahan Formal

C. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA MILIK/RUSUNAMI

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Pembangunan Rusuna (Apartemen Rakyat) diprioritaskan di kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk > 1,5 juta*) dengan mengedepankan efisiensi penggunaan tanah dan penataan permukiman, sesuai dengan RTRW. *) dan/atau Kota yang memiliki tanah siap bangun di lokasi strategis di mana Pemerintah Kota ybs memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan rusuna melalui pemberian berbagai kemudahan seperti; persyaratan rancang bangun, BPHTB, perizinan, sambungan/ tarif air bersih, dsb .	UMUM	SEBARAN
	▪ Meningkatkan keserasian kawasan rumah susun skala besar dengan permukiman melalui penerapan pola hunian berimbang; ▪ Meningkatkan upaya-upaya penanganan kawasan kumuh di perkotaan melalui pembangunan rumah susun (peremajaan); ▪ Meningkatkan kesejahteraan, kegiatan ekonomi masyarakat dan lapangan kerja.	▪ Perkotaan Metropolitan dengan jumlah penduduk $\geq 1,5$ juta jiwa; ▪ Kota Besar/sedang yang memiliki tanah di lokasi strategis dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota/Kab dan Pemerintah Provinsi; ▪ Pemerintah kota yang memiliki program pengentasan kawasan kumuh di lokasi strategis.
	KHUSUS	BESARAN
	▪ Memanfaatkan tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD yang tidak/ belum dimanfaatkan sesuai tupoksi-nya dan tanah-tanah negara yang dikuasai pihak-pihak lain bagi pengembangan kawasan perumahan vertikal/ rumah susun; ▪ Mendorong peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan rumah susun sederhana; ▪ Mengintegrasikan pengembangan kawasan rumah susun dengan prasarana, dan sarana dasar perkotaan; ▪ Memanfaatkan Teknik dan Teknologi Pembangunan (rancang bangun) serta bahan bangunan yang tepat guna; ▪ Memberikan insentif, subsidi & PSO yang tepat sasaran.	▪ Jumlah Tower Rusuna seluruhnya : ± 1.000 ▪ Jumlah Sarusun seluruhnya : ± 500.000 ▪ Rencana alokasi Tower Rusuna : ✓ 50 % di Wilayah Jabodetabek ✓ 30 % di Pulau Jawa, luar Jabodetabek ✓ 20 % di Luar Jawa ▪ Jumlah Sarusun /Tower : 100 – 500 ▪ Jumlah Lantai/Tower : 6 Lantai s/d 24 Lantai ▪ Luas Kavling/Tower MINIMAL : 3.000 m² s/d 5.000 m² (<i>single building</i>)
		SASARAN
		▪ Masyarakat berpenghasilan Rp. 1,2 Juta/bulan s/d $\leq$ Rp. 4,5 Juta/ bulan; ▪ Masyarakat yang mampu menyediakan uang muka maksimum 20 % Harga Jual Sarusun; ▪ Individu/Keluarga maupun Korporat (khusus untuk Rusunawa).

Sumber : Deputi Bidang Perumahan Formal

D. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT

NO	KEBIJAKAN	KLASTER - IV		
		Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil BERDAYA BELI
1	<i>Non Bankable</i>	✓	✓	-
2	<i>Bankable</i>	-	-	✓
3	Bantuan Pemerintah			
	a. Penyediaan Tanah	✓ (Pemda)	✓ (Pemda)	✓ (Pemda)
	b. Sertifikasi Tanah	✓	✓	✓
	c. PSU	✓	✓	✓
	d. Pembangunan Rumah	✓	✓	✓
	e. Bantuan Pembiayaan			
	- Bantuan Sosial	✓	-	-
	- Belanja Barang	✓	-	-
	- Subsidi	-	-	-
	- Pembiayaan (FLPP)	-	✓	✓
	f. Penjaminan	-	✓	-
4	Bantuan PKBL-BUMN/D			
	a. Penyediaan Tanah	✓	✓	✓
	b. Pembangunan Rumah	✓	✓	✓

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

E. SASARAN PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN RUMAH MURAH

RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)	PENDAPATAN PER BULAN	HARGA RUMAH	PROGRAM	CONTOH RTS
MISKIN DAN HAMPIR MISKIN	$P < 1,2 \text{ JT}$ (<i>non-bankable</i>)	BANSOS: 5 JT – 10 JT	EKSISTING DAN PRO RAKYAT	• NELAYAN • PETANI PENGGARAP • BURUH HARIAN
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2,0 \text{ JT}$ (<i>non-bankable</i>)	20 JT – 25 JT	PROGRAM BARU PRO RAKYAT	• WIRAUSAHA MIKRO • PEKERJA KONTRAK
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL BERDAYA BELI	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2,0 \text{ JT}$ (<i>bankable</i>)	20 JT – 25 JT	PROGRAM BARU PRO RAKYAT	• PNS • TNI • POLRI • PEKERJA SWASTA JAMSOSTEK
	$P \leq 2,5 \text{ JT}$ (<i>bankable</i>)	55 – 70 JT	EKSISTING	

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

F. KARAKTERISTIK PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT

NO	KARAKTERISTIK	RT MISKIN DAN HAMPIR MISKIN	PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	PELAKU UMK BERDAYA BELI
1	PENDAPATAN	$P < 1,2 \text{ JT}$	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2 \text{ JT}$ (NON-BANKABLE)	$1,2 \text{ JT} \leq P \leq 2 \text{ JT}$ (BANKABLE)
2	PROGRAM	BANSOS – STIMULAN PB/PK: 5 – 10 JT	KPR UTK HARGA JUAL RUMAH: 20 – 25 JT	KPR UTK HARGA JUAL RUMAH: 20 – 25 JT
3	BUNGA KPR PER TAHUN	-	5% – 6,42%	5% – 6,42%
4	UANG MUKA	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	TENOR	-	s.d. 15 TAHUN	s.d. 15 TAHUN
6	PORSI FLPP	-	80 % s.d. 95%	80 % s.d. 95%
7	ANGSURAN PER BULAN	-	Rp 160.623,- s.d. Rp 220.481,-	Rp 160.623,- s.d. Rp 220.481,-
8	KAPASITAS ANGSUR PER BULAN (15%)	-	Rp 180.000,- s.d. Rp 300.000,-	Rp 180.000,- s.d. Rp 300.000,-
9	PENJAMINAN/ASURANSI KPR	-	PEMERINTAH	TIDAK ADA
10	SUMBER DANA	APBN, BUMN, CSR SWASTA	ABPN/D, BUMN/D, KOPERASI, SWASTA	ABPN/D, BUMN/D, KOPERASI, SWASTA
11	PELAKSANA	KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)	LEMBAGA KEUANGAN BANK/NON BANK	LEMBAGA KEUANGAN BANK/NON BANK
12	KONSEP RUMAH	RUMAH INTI TUMBUH (RIT) TIPE-18	RUMAH TIPE-36	RUMAH TIPE-36
13	RENCANA 2011 - 2014	350 RIBU	325 RIBU UNIT	325 RIBU UNIT

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

G. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN RUMAH MURAH TAHUN 2012

Selain untuk Pembangunan Rumah Sangat Murah bagi kelompok sasaran Masyarakat Nelayan, Masyarakat Pinggir Kota dan Masyarakat Daerah Tertinggal, Kemenpera juga mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Rumah Murah, yaitu:

No.	Sasaran	Kegiatan	Sasaran		Pembiayaan	
					Alokasi Anggaran (Rp. Juta)	Sumber
Pembangunan Rumah Murah						
1	RTS Non - Bankable	PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	20.000	Unit	125.000	APBN Kemenpera
2	RTS Bankable	PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	20.000	Unit	125.000	APBN Kemenpera
	JUMLAH		40.000	Unit	250.000	

Catatan:

Alokasi anggaran Kemenpera hanya untuk penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman untuk mendorong pembangunan rumah murah. Selain itu, masih diperlukan dukungan yang berupa:

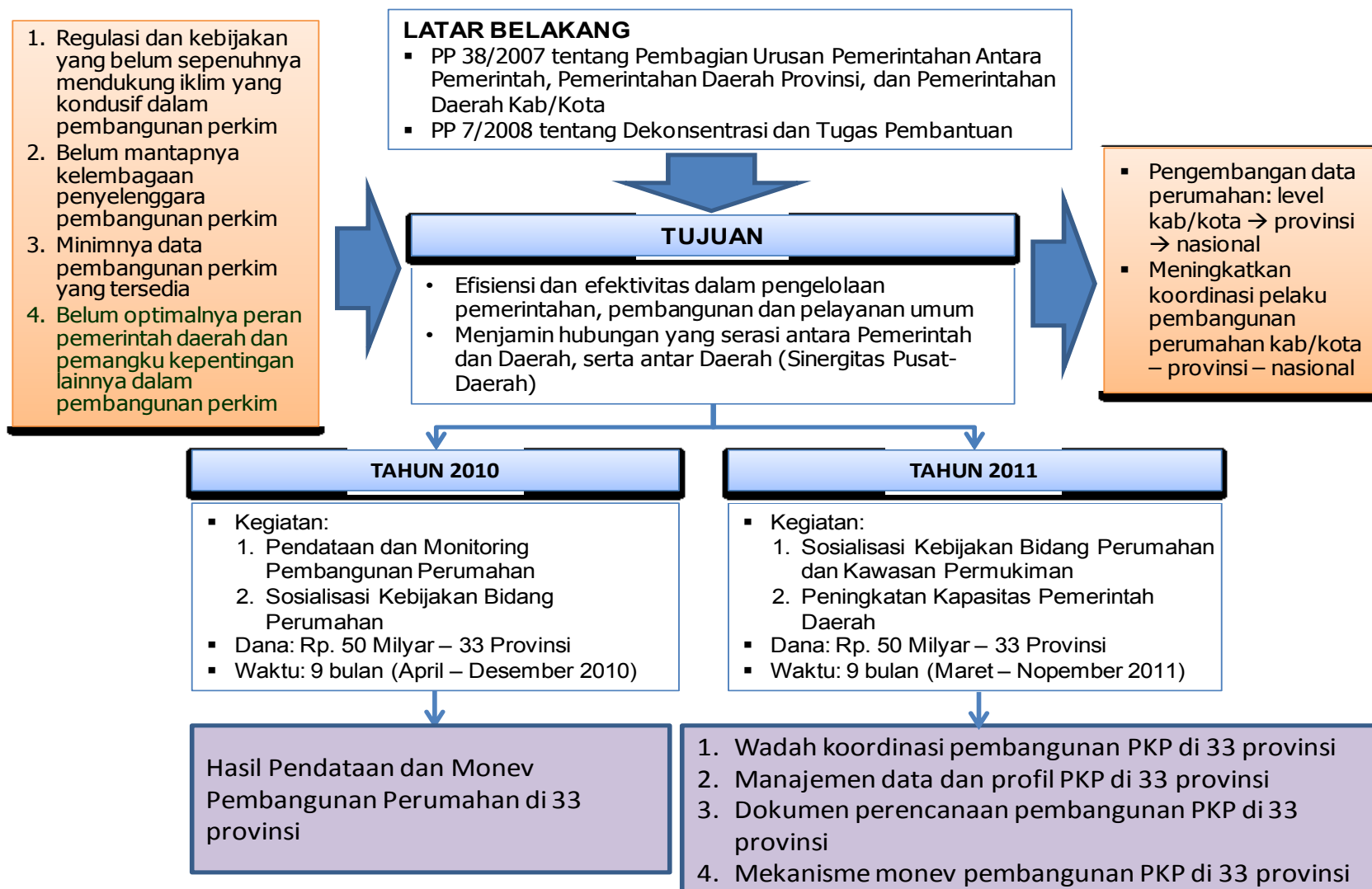
- Alokasi anggaran untuk KPR Rumah Murah, baik dari APBN untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun dari perbankan dalam rangka sharing pokok pinjaman
- PSO Rumah Murah untuk membiayai penugasan untuk pembangunan Rumah Murah kepada Perumnas
- Alokasi anggaran Penjaminan KPR Rumah Murah yang diperuntukkan bagi RTS non-bankable dengan mengikuti mekanisme penjaminan KUR.
- DAK bidang Perumahan dan kawasan permukiman untuk pematangan lahan diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah murah.
- Penyediaan lahan dan dukungan perijinan dari Pemda. Hal ini juga perlu didukung dengan payung hukum untuk mengatur mekanisme hibah lahan Pemda kepada masyarakat.

Sebaran lokasi pembangunan rumah murah sangat tergantung pada kesiapan lahan dari Pemerintah Daerah

Sumber : Bahan RAKOR Rencana Aksi Program Rumah Sangat Murah, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXVI. DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010-2011

A. KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010-2011



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

B. ALOKASI DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2010 DAN 2011

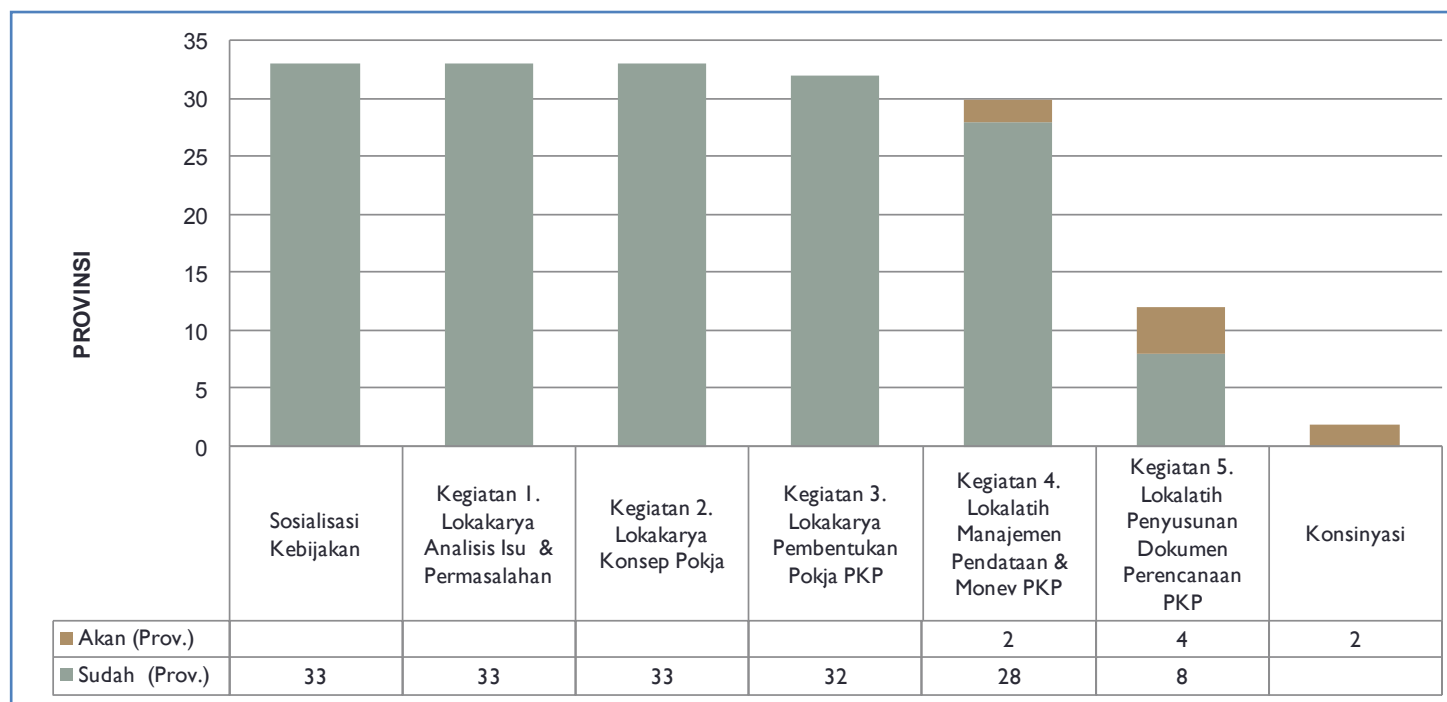
NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	ANGGARAN 2010	ANGGARAN 2011
1	Nanggroe Aceh Darussalam	23	1,985,419,000	1.755.638.000
2	Sumatera Utara	33	2,635,785,000	1.806.118.000
3	Riau	12	1,232,668,000	1.299.641.000
4	Kepulauan Riau	7	904,011,000	1.265.106.000
5	Jambi	11	1,111,375,000	1.246.536.000
6	Sumatera Barat	19	1,710,645,000	1.687.263.000
7	Sumatera Selatan	15	1,422,720,000	1.365.963.000
8	Lampung	14	1,326,503,000	1.476.778.000
9	Bengkulu	10	1,049,283,000	1.234.146.000
10	Bangka Belitung	7	866,773,000	1.193.581.000
11	Banten	8	867,925,000	1.227.781.000
12	Jawa Barat	26	2,092,785,000	1.591.598.000
13	DKI Jakarta	6	712,854,000	1.324.106.000
14	Jawa Tengah	35	2,625,670,000	1.741.193.000
15	DI Yogyakarta	5	737,244,000	1.266.181.000
16	Jawa Timur	38	2,828,029,000	1.874.553.000
17	Bali	9	1,119,802,000	1.729.031.000

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	ANGGARAN 2010	ANGGARAN 2011
18	Nusa Tenggara Barat	10	1,180,406,000	1.362.891.000
19	Nusa Tenggara Timur	21	2,098,030,000	1.804.598.000
20	Kalimantan Barat	14	1,452,804,000	1.358.833.000
21	Kalimantan Tengah	14	1,440,819,000	1.339.433.000
22	Kalimantan Selatan	13	1,405,844,000	1.471.703.000
23	Kalimantan Timur	14	1,542,821,000	1.613.348.000
24	Sulawesi Utara	15	1,677,935,000	1.573.413.000
25	Gorontalo	6	930,403,000	1.289.151.000
26	Sulawesi Barat	5	843,622,000	1.228.036.000
27	Sulawesi Selatan	24	2,262,237,000	1.848.073.000
28	Sulawesi Tengah	11	1,195,970,000	1.335.096.000
29	Sulawesi Tenggara	12	1,275,421,000	1.376.266.000
30	Maluku	11	1,306,895,000	1.589.976.000
31	Maluku Utara	9	1,213,755,000	1.397.981.000
32	Papua	29	3,347,755,000	2.475.138.000
33	Papua Barat	11	1,595,792,000	1.850.851.000
TOTAL		497	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

C. PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2011

1) Status Pelaksanaan Dekonsentrasi (per 28 September 2011)

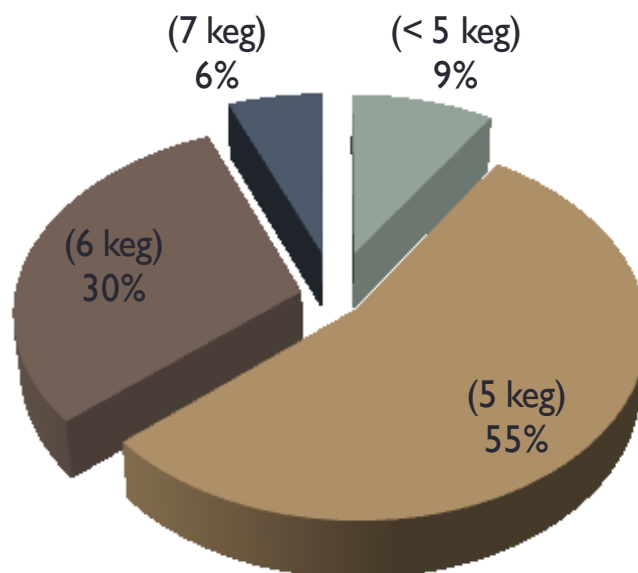


Catatan: - Yang Akan berdasarkan Surat Permohonan SKPD yang sudah masuk per 28 September 2011.
 - Kegiatan 1,2,3, 4 dan 5 merupakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas.

Ket: - Provinsi yang belum melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas 3 (Lok. Pembentukan Pokja) :Kalsel.
 - Provinsi yang belum melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas 4 (Lok. Manajemen Pendataan & Monev); DKI, Kalsel, Sulsel.

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

2) Kesesuaian Jadwal Pelaksanaan Dekonsentrasi (per 28 September 2011)



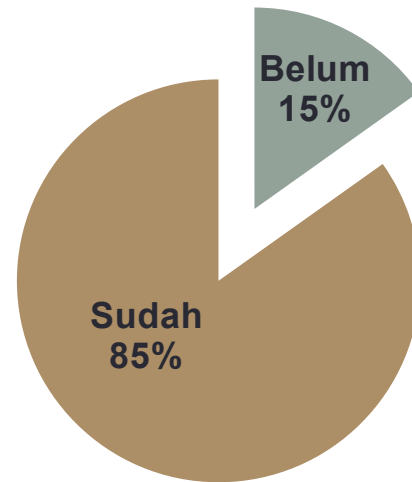
Kategori	Jumlah Provinsi	Keterangan
Sangat Lambat (< 5 kegiatan)	3	DKI Jakarta, Kalsel, Sulsel
Lambat (5 kegiatan)	18	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jatim, NTB, Kalbar, Sulbar, Sulteng, Sulut, Papua, Papua Barat
Normal (6 kegiatan)	10	Sumsel, Babel, Jateng, DIY, Bali, NTT, Kaltim, Sultra, Maluku, Maluku
Cepat (7 kegiatan)	2	Kalteng, Gorontalo

Asumsi : Jumlah kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan s/d akhir September mengacu pada perencanaan adalah 6 kegiatan (Sosialisasi Kebijakan; Lokakarya Analisis Isu; Lokakarya Konsep Pokja; Lokakarya Pembentukan Pokja PKP; Loklatih Manajemen Pendataan dan Monev; dan Loklatih Penyusunan Dokumen Perencanaan PKP).

Catatan : Status kegiatan yang telah/ akan dilakukan berdasarkan surat permohonan yang masuk s/d 28 September 2011.

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

3) Status Pelaporan Manajerial (per 28 September 2011)

STATUS LAPORAN MANAJERIAL TRIWULAN I (JAN s/d APRIL)

Ket	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi
Sudah	28	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Babel, Kepri, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Bali, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalteng, NTT, Sultra, Sulteng, Sulbar, Sulut, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Malut
Belum	5	Papua, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, dan NTB

STATUS LAPORAN MANAJERIAL TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI)

33 provinsi telah menyampaikan laporan manajerial triwulan II

Catatan: Laporan Triwulan yang disampaikan dapat berbentuk *softcopy* maupun *hardcopy*

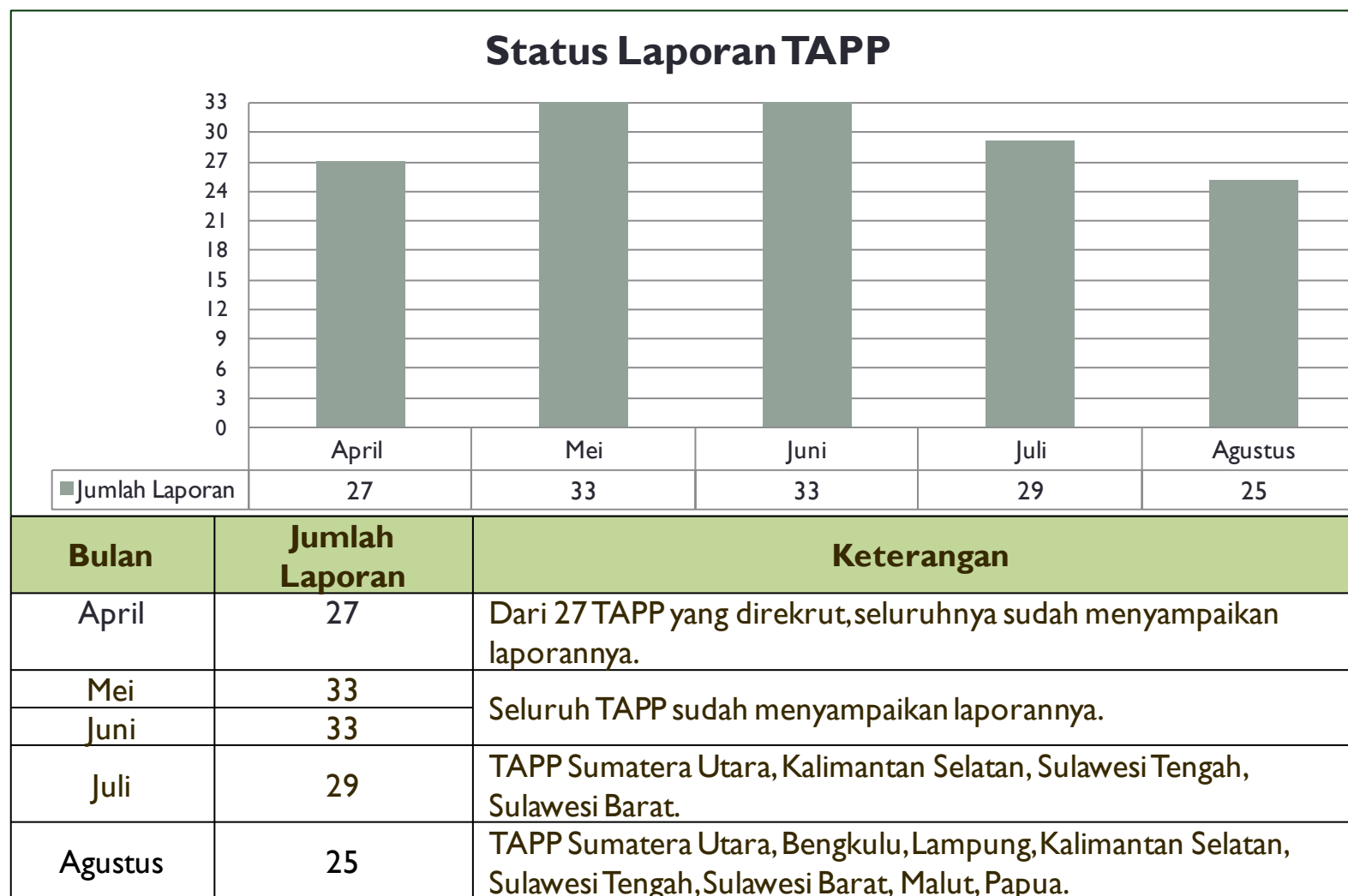
Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

4) Status Pelaporan Teknis (per 28 September 2011)

Kegiatan	Status Pelaksanaan	Status Laporan		
		Sudah Mengirim	Belum Mengirim	Keterangan
		(Jumlah Provinsi)		
Sosialisasi Kebijakan	33	31	2	Sumsel, Bengkulu.
Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan	33	26	7	Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Sulut, Papua Barat
Lokakarya Konsep Pokja	33	24	9	Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, NTT, Sulut, Papua Barat
Lokakarya Pembentukan Pokja PKP	32	17	15	Sumut, Riau, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, NTT, Sulut, Sulbar, Sultra, Papua, Papua Barat
Loklatih Manajemen Pendataan & Monev PKP	28	7	21	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Jabar, Jatim, Bali, NTT, Kaltim, Sultra
Loklatih Penyusunan Dok. Perenc. PKP	8		8	Sultra

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

5) Status Laporan TAPP (per 28 September 2011)



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

6) Konsep Struktur Kelompok Kerja PKP TAPP

No.	Provinsi	Nama Pokja	Tim Pengarah		Tim Pelaksana		Tim Sekretariat		Tugas dan Fungsi		Instansi Yang Terlibat			Unsur Pokja					SK Pokja			
			Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	10 < x < 15	15 < x < 20	x > 20	Eksekutif	Legislatif	Akademisi/Pe-merhati	LSM	Mitra	Draft	Biro Hukum	Gubernur	Pengu-kuhan Pokja
1	Jawa Timur	Pokja Pengembangan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur (P4KPJT)	√		√		√		√			√		√		√		√				
2	Papua Barat	Pokja PKP Papua Barat	√		√		√		√			√		√	√			√	√			
3	Sumsel	Pokja PKP Sumsel	√		√		√				belum ada pembahasan detail											
4	Kalbar	Pokja PKP Kalbar	√		√		√		√				√	√	√	√	√	√				
5	Kaltim	Pokja PKP Kaltim	√		√		√		√			√		√	√	√	√	√				
6	NTT	Pokja PKP Provinsi NTT	√		√		√		√				√	√	√	√	√	√				√ (4 Okt)
7	Jambi	Lembaga Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (LKP2KP) Provinsi Jambi	√		√		√		√			√		√		√		√				
8	Banten	Pokja PKP Provinsi Banten		√	√		√		√				√	√	√	√		√				
9	Bengkulu	Pokja PKP Provinsi Bengkulu	√		√		√		√		√			√		√		√				
10	Maluku	Pokja PKP Provinsi Maluku	√		√		√		√				√	√	√	√	√	√				
11	Gorontalo	Pokja Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P2-PKP) Provinsi Gorontalo	√		√		√		√			√		√		√	√	√				
12	Maluku Utara	Pokja PKP "MARIMOI NGONE FUTURU" Provinsi Maluku Utara	√		√		√		√				√	√		√	√	√				
13	Sulawesi Tenggara	Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	√		√		√		√			√		√		ü	√	√				
14	Jawa Tengah	Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Tengah	√		√		√		√			√		√		√		√				
15	DIY	Dewan Perumahan DIY	√		√		√		√			√		√		√	√	√				
16	Sulawesi Tengah	Pokja PKP "BANUATA" Provinsi Sulawesi Tengah	√		√		√		√		√			√				√				
17	Bali	Pokja PKP Provinsi Bali		√	√		√		√				√	√		√	√	√				
18	Kalteng	Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Huma Betang	√		√		√		√		√			√			√	√				
19	Bangka Belitung	Pokja PKP Serumpun Sebalai	√		√		√		√		√			√		√		√				
20	Jabar	Pokja PKP Jawa Barat	√		√		√		√		√			√				√				
21	Sulawesi Selatan	Pokja "TODDOPULI" Percepatan Pembangunan PKP Provinsi Sulawesi Selatan	√		√		√		√		√			√		√		√				
22	Kepri	Pokja PKP Provinsi Kepri	√		√		√		√			√		√		√	√	√				
23	Sumbar	Lembaga Pengembangan PKP Provinsi Sumatera Barat	√		√		√		√		√			√		√	√	√				
24	Aceh	Pokja PKP Aceh	√		√		√		√		√			√	√	√		√				
25	Sulut	Pokja PKP "MALEOSAN" Provinsi Sulut	√		√		√		√		√			√		√	√	√				
26	NTB	Pokja PKP NTB "BERSAING"	√		√		√		√		√			√		√	√	√				

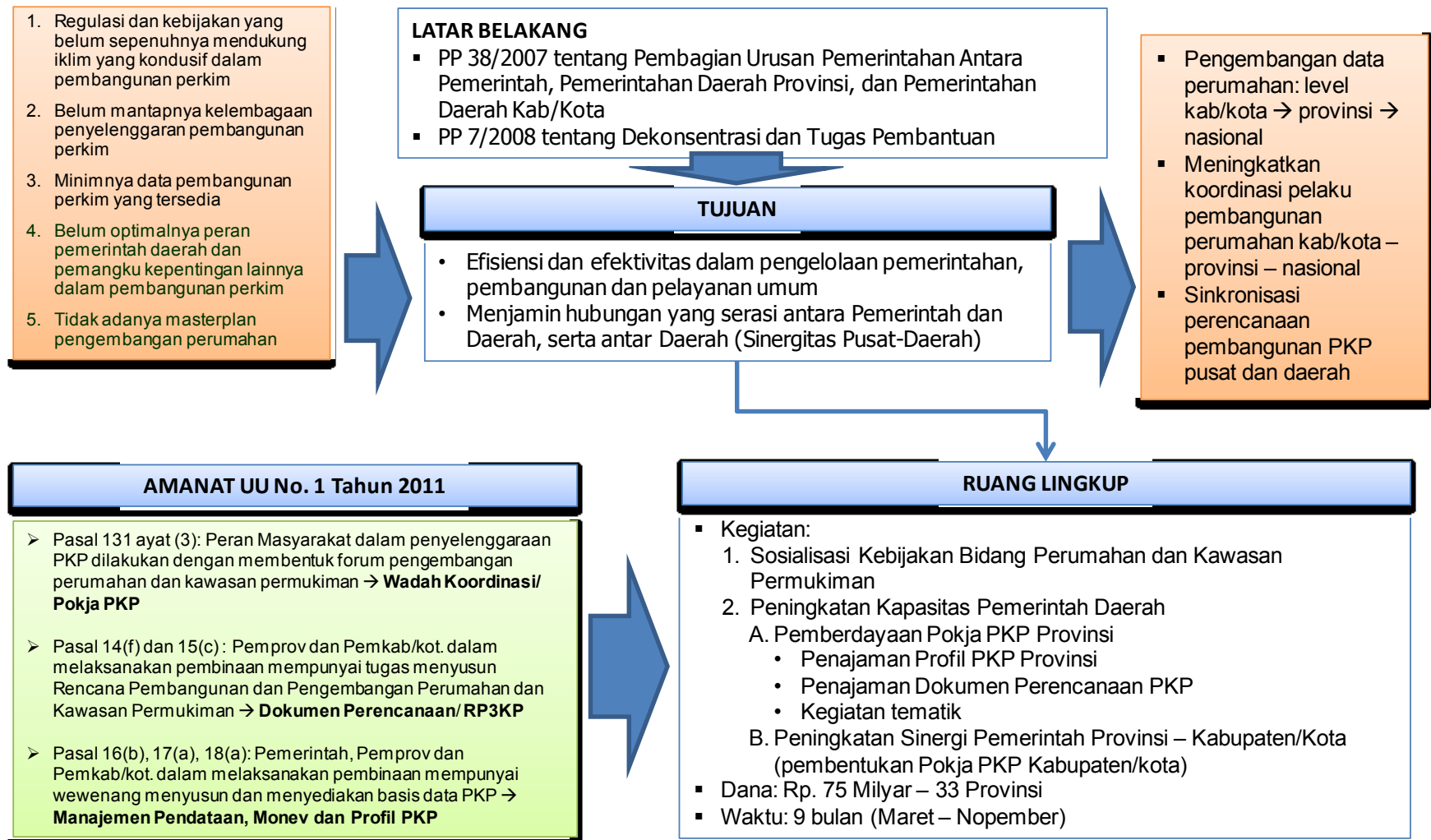
Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

7) Rekapitulasi Struktur Pokja PKP Pada Masing-masing Provinsi

- Dari 33 Provinsi, 32 provinsi (97%) telah melaksanakan Lokakarya Pembentukan Pokja Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera tahun 2011.
- 1 Provinsi (3%) belum melaksanakan Lokakarya Pembentukan Pokja, yaitu Kalsel.
- Dari 33 Provinsi, baru 26 Provinsi (78%) yang mengirimkan Konsep Struktur Pokja PKP melalui milis TAPP/ Prosiding.
- Dari 26 Provinsi yang mengirimkan Konsep Struktur Pokja, nama pokja diawali dengan Pokja, yaitu 24 Provinsi, tapi ada juga beberapa Provinsi yang memakai nama pokjanya adalah lembaga yaitu 2 Provinsi.
- Ada Struktur Pokja dan lembaga yang memakai tim pengarah, yaitu 24 provinsi, yang tidak memakai tim pengarah 2 provinsi. Yang memakai tim pelaksana, yaitu 26 provinsi. Yang memakai tim sekretariat ada 23 provinsi, yang tidak memakai tim sekretariat 3 provinsi.
- Dari 26 provinsi yang mengirimkan konsep Pokja PKP, ada 12 Provinsi yang mencantumkan tugas dan fungsi pokja/ lembaga tersebut, dan 13 Provinsi tidak mencantumkan tugas dan fungsi pokja/ lembaganya serta 1 Provinsi belum ada pembahasan mengenai hal tersebut, yaitu Sumsel.
- Dari 26 Provinsi yang mengirimkan Konsep Struktur Pokja PKP instansi yang terlibat cukup banyak antara 10 sampai dengan 15 instansi ada 10 provinsi, 15 sampai dengan 20 instansi ada 9 provinsi, lebih dari 20 instansi ada 6 Provinsi dan 1 Provinsi belum ada pembahasan mengenai hal tersebut, yaitu Sumsel.
- Unsur Pokja yang dilibatkan dalam penyusunan Struktur Pokja PKP antara lain: Unsur eksekutif ada di 25 Provinsi, Unsur Legislatif ada di 5 Provinsi, Unsur Akademisi ada di 21 Provinsi, Unsur LSM di 13 Provinsi, dan Unsur Kemitraan di 25 Provinsi.

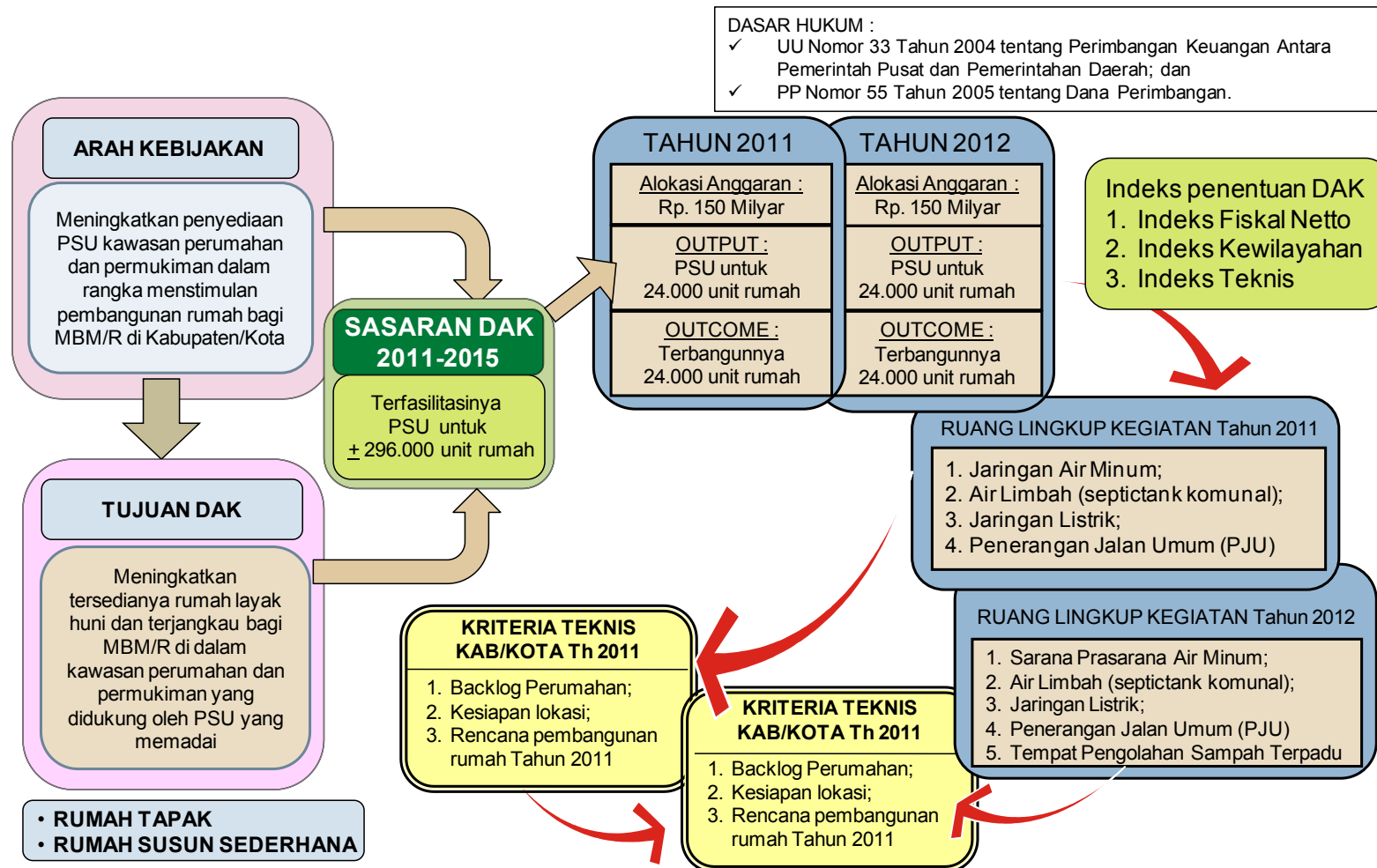
Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

D. KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2012



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXVII. DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2011 - 2015



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

**Hasil Perhitungan Alokasi DAK TA 2011 Yang Disepakati Dalam Rapat Panja Transfer Ke Daerah Dalam Rangka
Pembahasan RUU APBN TA 2011 Bidang Perumahan Dan Permukiman
(dalam ribuan rupiah)**

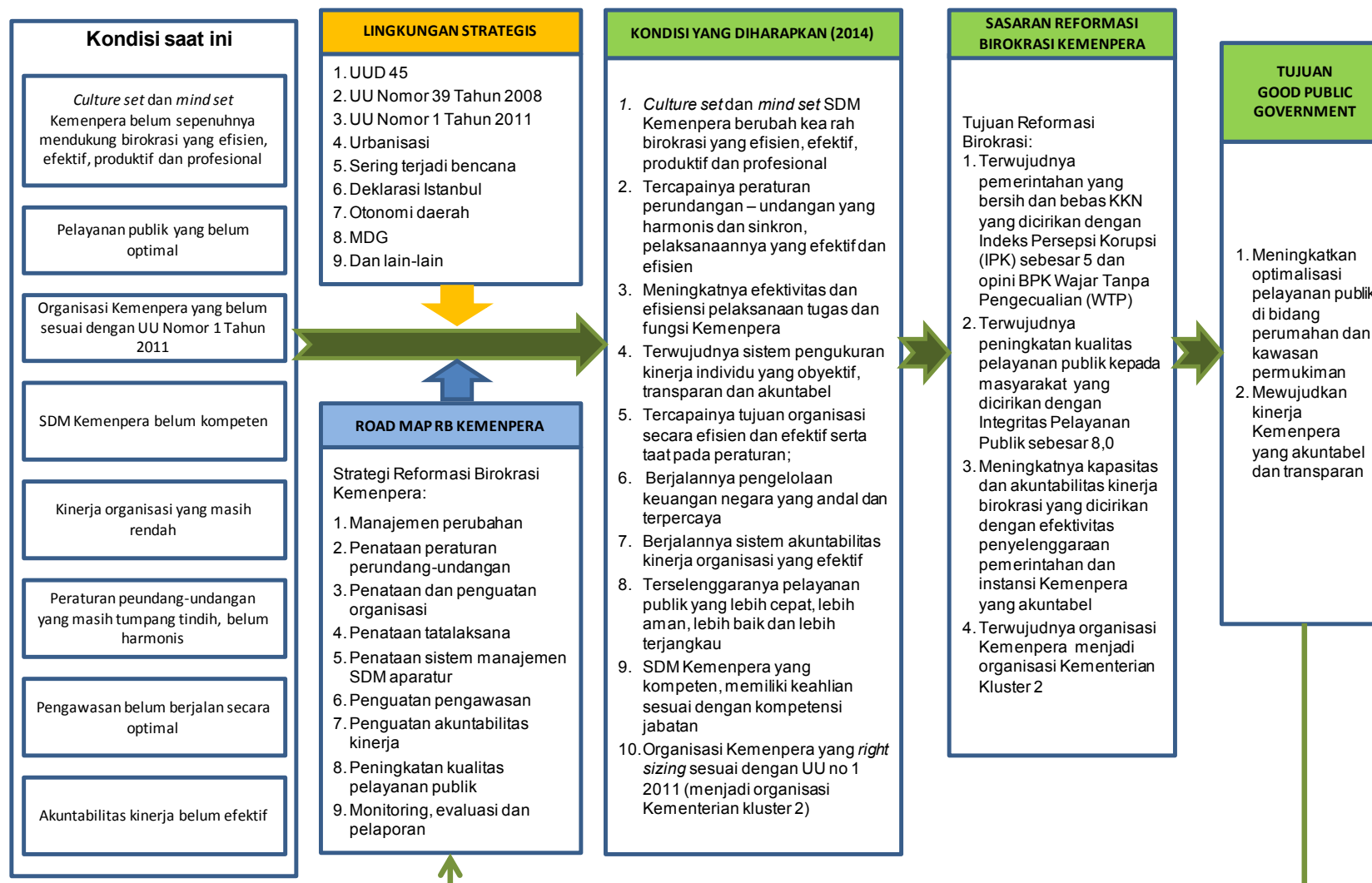
NO	DAERAH	ALOKASI
I.	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kota Medan	4.153,0
2	Kota Padang Sidempuan	1.355,8
II.	Provinsi Sumatera Barat	
3	Kab. Pesisir Selatan	1.992,8
4	Kota Padang	1.547,8
III.	Provinsi Riau	
5	Kota Pekanbaru	2.800,4
IV.	Provinsi Kepulauan Riau	
6	Kota Batam	3.397,0
V.	Provinsi Jambi	
7	Kab. Bungo	2.114,2
8	Kab. Kerinci	1.749,1
9	Kab. Merangin	2.020,3
10	Kab. Sarolangun	2.211,3
11	Kab. Tebo	1.712,0
12	Kota Jambi	2.543,3
VI.	Provinsi Sumatera Selatan	
13	Kota Palembang	3.148,8
VII.	Provinsi Bangka Belitung	
14	Kab. Belitung	2.284,0
15	Kota Pangkal Pinang	2.329,0
VIII.	Provinsi Bengkulu	
16	Kota Bengkulu	1.947,2
IX.	Provinsi Lampung	
17	Kab. Lampung Barat	2.205,5
18	Kab. Lampung Selatan	2.065,2
19	Kab. Lampung Tengah	1.196,9
20	Kab. Lampung Utara	1.846,4
21	Kab. Tanggamus	1.822,9
22	Kab. Tulang Bawang	1.879,8
23	Kab. Way Kanan	1.677,1
24	Kota Bandar Lampung	2.353,1

NO	DAERAH	ALOKASI
X.	Provinsi Jawa Barat	
25	Kab. Bandung	3.103,4
26	Kab. Bekasi	3.071,3
27	Kab. Bogor	5.253,0
28	Kota Bekasi	3.857,2
XI.	Provinsi Banten	
29	Kab. Tangerang	2.969,1
XII.	Provinsi Jawa Tengah	
30	Kab. Kendal	1.650,1
31	Kab. Klaten	2.112,8
32	Kab. Pekalongan	1.857,3
33	Kab. Purbalingga	1.867,3
34	Kab. Temanggung	1.614,2
35	Kota Magelang	2.476,7
36	Kota Pekalongan	2.751,0
37	Kota Semarang	2.829,8
38	Kota Surakarta	2.773,2
XIII.	Provinsi Jawa Timur	
39	Kab. Bangkalan	3.547,7
40	Kab. Gresik	2.535,1
41	Kab. Malang	4.437,2
42	Kab. Pamekasan	1.983,6
43	Kab. Pasuruan	2.295,7
44	Kab. Sidoarjo	2.825,5
45	Kab. Tulungagung	1.924,6
46	Kota Blitar	2.288,4
47	Kota Mojokerto	2.166,2
48	Kota Surabaya	2.834,1
XIV.	Provinsi Kalimantan Selatan	
49	Kab. Barito Kuala	2.226,0
50	Kota Banjar Baru	1.186,2

NO	DAERAH	ALOKASI
XV.	Provinsi Sulawesi Utara	
51	Kota Bitung	1.817,3
52	Kota Manado	2.459,3
XVI.	Provinsi Gorontalo	
53	Kab. Boalemo	2.162,3
54	Kab. Pohuwato	1.415,8
XVII.	Provinsi Sulawesi Tengah	
55	Kota Palu	1.891,3
XVIII.	Provinsi Sulawesi Selatan	
56	Kota Pare-pare	2.130,9
57	Kota Makassar	2.682,0
XIX.	Provinsi Sulawesi Tenggara	
58	Kota Kendari	1.672,7
59	Kota Bau-bau	1.941,3
XX.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
60	Kab. Lombok Barat	2.240,0
XXI.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
61	Kota Kupang	4.800,5
XXII.	Provinsi Papua Barat	
62	Kab. Sorong	3.997,0
	Jumlah Kab/Kota	62
	Rata-rata Alokasi	2.419,355
	Jumlah Total Alokasi	150.000,000
	Jumlah Provinsi	22
	Rata-rata Alokasi	6.818,182
	Jumlah Total Alokasi	150.000,000
	Total Daerah	62
	Rata-rata nasional	2.419,355
	Jumlah Total Nasional	150.000,000

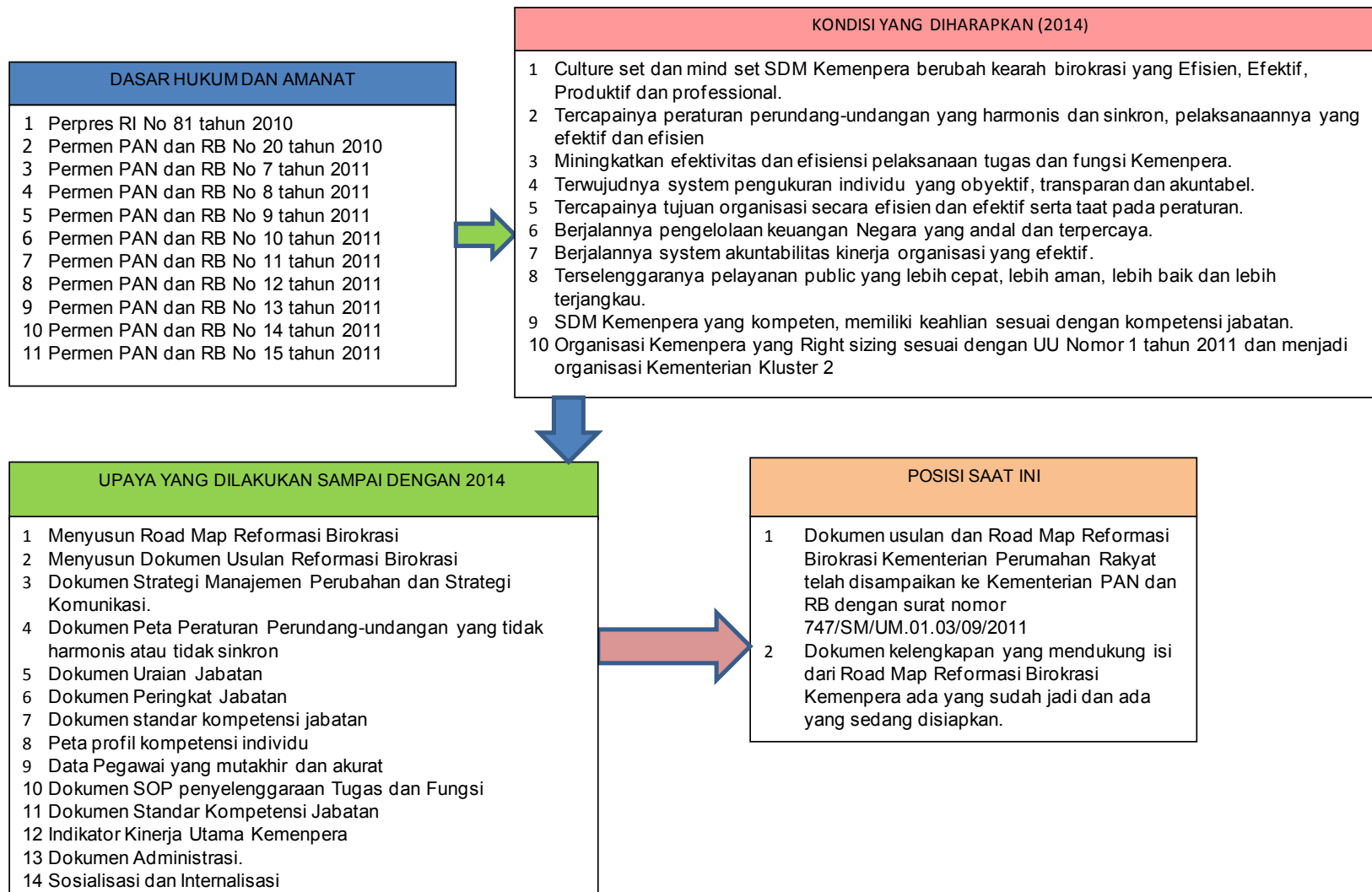
Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXVIII. KERANGKA PIKIR REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT



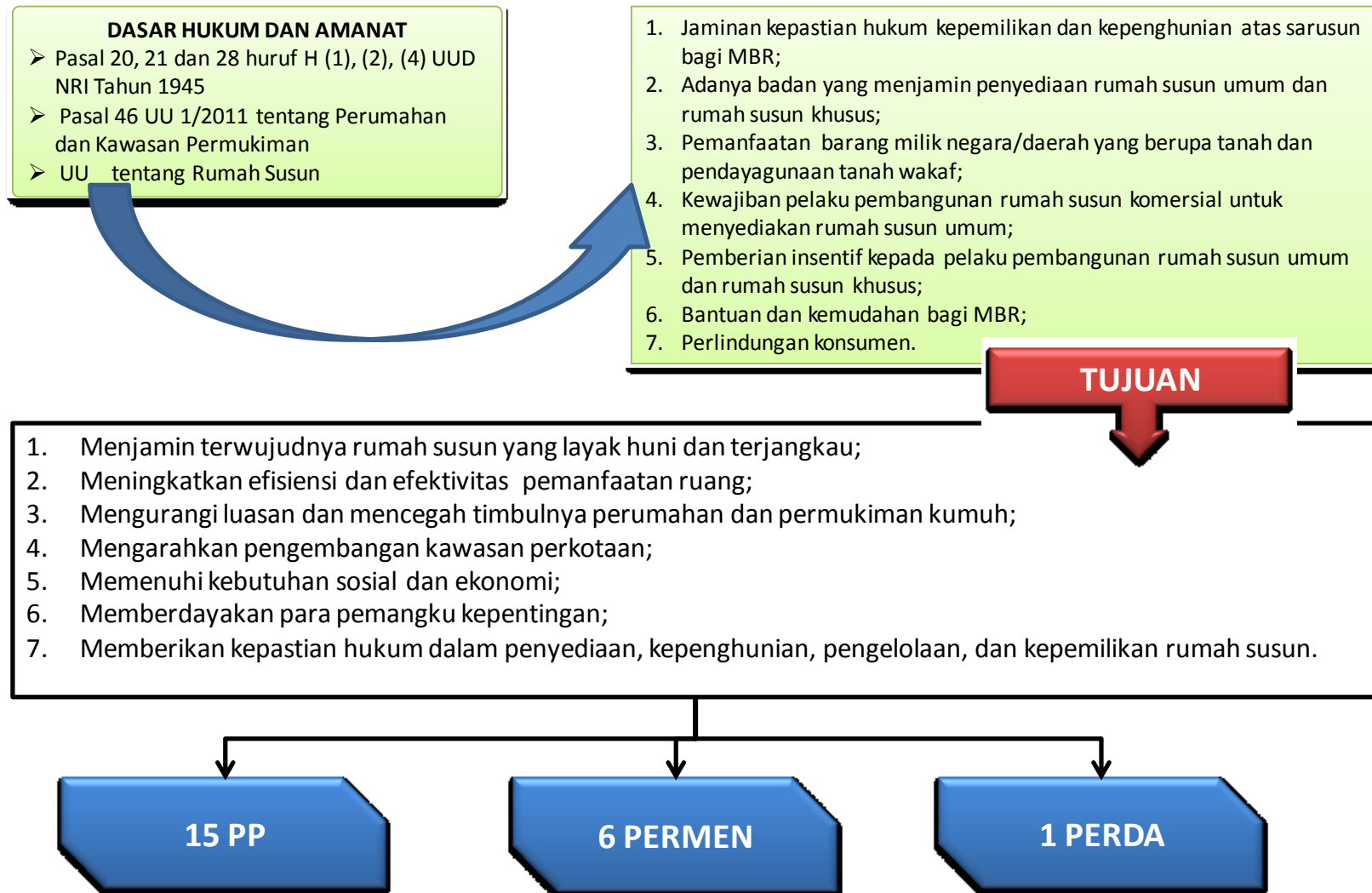
Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXIX. PROSES REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXX. PERATURAN PELAKSANAAN UU RUMAH SUSUN



AMANAT PERATURAN PEMERINTAH

1. Pembinaan, Pasal 11
2. Penyediaan Rusun Umum, Pasal 14 (4)
3. Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan Rusun Umum, Pasal 20 (5)
4. Pemisahan Rusun dalam bentuk Gambar dan Uraian dalam pembangunan Rusun, Pasal 27
5. Tata Cara Pinjam Pakai atau Sewa Dalam Penguasaan Sarusun, Pasal 45 (7);
6. SHM Sarusun dan SKBG Sarusun dan Tata Cara Penerbitannya, Pasal 49
7. Pengalihan Sarusun Umum, Pasal 54 (4);
8. Pedoman Penyewaan Sarusun Umum, Pasal 55 (2);
9. Pengelolaan Rusun, Masa Transisi dan Tata Cara Penyerahan Pertama Kali, Pasal 60
10. Peningkatan Kualitas Rusun, Pasal 69;
11. Pengendalian Rumah Susun, Pasal 71 (2);
12. Badan Pelaksana Rusun, Pasal 73;
13. PPPSRS, Pasal 78;
14. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Pelaku Pembangunan Rusun Umum dan Rusun Khusus serta Bantuan dan Kemudahan Kepada MBR, Pasal 88 (4);
15. Sanksi Administratif, Tata Cara, dan Besaran Denda Administratif, Pasal 107.

AMANAT PERATURAN MENTERI

1. Pedoman Perencanaan Pembangunan Rumah Susun, Pasal 14 (2);
2. Pedoman Permohonan Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan serta Pengubahannya, Pasal 32.
3. SPM PSU Lingkungan Rumah Susun, Pasal 40 (4);
4. Kriteria dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Kepemilikan Sarusun Umum, Pasal 54 (5);
5. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun dan Forum Pengembangan Rumah Susun, Pasal 96 (6).

AMANAT PERATURAN MENTERI

Tata Cara Penghitungan Besarnya Biaya Pengelolaan Diatur Dalam Peraturan Menteri Yang Membidangi Bangunan Gedung, Pasal 57 (5);

AMANAT PERATURAN DAERAH

Permohonan Izin Rencana Fungsi dan Permohonan Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan, Pasal 33

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXXI. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN ASET KEMENPERA TAHUN 2012**Rencana Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Aset, antara lain :**

- Melakukan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan aset di Kementerian Perumahan Rakyat.
- Melakukan pengumpulan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan aset.
- Melakukan pengolahan dan penyusunan data dan informasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan aset.
- Mengupayakan memperkecil kendala dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan aset.
- Meneruskan kegiatan penyerahan aset rusunawa yang telah siap fungsi dan terpenuhi kelengkapan data pendukungnya.

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXXII. FASILITASI ADMINISTRASI ALIH ASET RUSUN SEWA KEMENPERA

PEMBANGUNAN RUSUN SEWA S/D TAHUN 2010

Pembangunan Rusunawa di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dari tahun 2005-2010 sebanyak 138 Twin Block (TB), terdiri dari :

1. Rusunawa untuk Perguruan Tinggi Negeri/ Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 45 TB
2. Rusunawa untuk Pekerja/ Pemerintah Daerah sebanyak 29,5 TB
3. Rusunawa untuk Perguruan Tinggi Swasta, BUMN dan BUMD sebanyak 40,5 TB
4. Rusunawa untuk Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan dan Polri sebanyak 23 TB



PROGRES PENYERAHAN RUSUN SEWA

A. Serahterima Rusun Sewa Mahasiswa

Rusun Sewa Mahasiswa yang telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Berita Acara No.80/M/PL.03.01/05/2011-No.352/MPN/LL/2011, yaitu :

1. Rusunawa Universitas Indonesia (1 TB), Kota Depok dan
2. Rusunawa Universitas Sam Ratulangi (1 TB), Kota Manado

B. Usulan Hibah Rusun Sewa Pekerja

Rusun Sewa Pekerja yang telah diusulkan dengan mekanisme hibah ke Kementerian Keuangan melalui Surat No. S-186/MK.06/2011 tanggal 6 April 2011:

1. Rusun Sewa Cingised Bandung (1 TB) untuk diserahkan kepada Pemkot Bandung
2. Rusun Sewa Muka Kuning Batam (1 TB) untuk diserahkan kepada Pemkot Batam.

Saat ini statusnya sedang dalam proses usulan untuk persetujuan Presiden RI di Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, juga telah diusulkan Hibah Rusun Sewa Pekerja sbb:

Rusun Sewa Pekerja Siwalankerto (2 TB), yang saat ini masih dalam proses di Ditjen. Kekayaan Negara-Kemenkeu

C. Usulan Alih Status penggunaan BMN Rusun Sewa Mahasiswa:

1. Rusun Sewa Mahasiswa Universitas Diponegoro (1 TB)
 2. Rusun Sewa Mahasiswa Universitas Udayana (1 TB)
 3. Rusun Sewa Mahasiswa Universitas Hasanuddin (1 TB)
 4. Rusun Sewa Mahasiswa Universitas Andalas (1 TB)
- Saat ini masih dalam proses di Ditjen. Kekayaan Negara-Kemenkeu

KENDALA: Belum terpenuhi kelengkapan data pendukung yang dipersyaratkan berdasarkan Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007.

Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

XXXIII. DATA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2011

A. DATA LOKASI PENANGANAN KAWASAN TAHUN 2011

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
I	NAD	151	944	716	4,475	3	4,800
1	Kab. Aceh Selatan			110	688		
2	Kab. Aceh Besar			241	1,506		
3	Kab. Batubara					3	4,800
4	Kota Banda Aceh	151	944				
5	Kota Langsa			365	2,281		
II	SUMATERA UTARA	140	875	7,131	44,569	3	4,800
1	Kab. Deli Serdang			2,636	16,475		
2	Kab. Langkat					3	4,800
3	Kab. Simalungun			600	3,750		
4	Kota Medan	140	875	2,735	17,094		
5	Kota Pematang Siantar			1,160	7,250		
III	SUMATERA BARAT	98	613	1,180	7,375	3	4,800
1	Kab. Agam			330	2,063		
2	Kab. Limapuluhkota			150	938		
3	Kab. Padang Pariaman			100	625		
4	Kab. Pesisir Selatan			200	1,250		
5	Kab. Sijunjung			110	688		
6	Kab. Solok			220	1,375		
7	Kota Padang	98	613				
8	Kota Payakumbuh			70	438	3	4,800

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
IV	RIAU	374	2,338	4,071	25,444	3	4,800
1	Kab. Bengkalis			195	1,219		
2	Kab. Kampar			1,965	12,281		
3	Kab. Pelalawan			425	2,656		
4	Kota Dumai			170	1,063		
5	Kota Pekanbaru	374	2,338	1,316	8,225	3	4,800
V	JAMBI	76	475	1,615	10,094	0	0
1	Kab. Bungo			290	1,813		
2	Kab. Sarolangun			250	1,563		
3	Kab. Tanjung Jabung Timur			300	1,875		
4	Kota Jambi	76	475	775	4,844		
VI	SUMATERA SELATAN	0	0	7,980	49,875	6	9,600
1	Kab. Banyuasin			250	1,563		
2	Kab. Muara Enim			1,150	7,188		
3	Kab. Musi Banyuasin			200	1,250		
4	Kab. Musi Rawas			1,000	6,250		
5	Kab. Ogan Ilir			350	2,188		
6	Kab. Ogan Komering Ilir			300	1,875		
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur			250	1,563		
8	Kab. Ogan Komering Ulu			430	2,688		
9	Kota Pagar Alam			300	1,875		
10	Kota Palembang			3,750	23,438	6	9,600
VII	BENGKULU	38	238	1,550	9,688	3	4,800
1	Kab. Bengkulu Selatan			300	1,875		
2	Kab. Bengkulu Tengah			200	1,250		
3	Kab. Lebong			200	1,250		
4	Kab. Mukomuko			150	938		
5	Kota Bengkulu	38	238	700	4,375	3	4,800

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
VIII	LAMPUNG	106	663	2,358	14,738	0	0
1	Kab. Lampung Selatan			1,009	6,306		
2	Kota Bandar Lampung	106	663	800	5,000		
3	Kota Metro			549	3,431		
IX	KEP. BANGKA BELITUNG	0	0	950	5,938	0	0
1	Kab. Bangka Tengah			150	938		
2	Kab. Belitung			300	1,875		
3	Kota Pangkal Pinang			500	3,125		
X	KEP. RIAU	311	1,944	5,188	32,425	3	4,800
1	Kota Batam	258	1,613	4,178	26,113	3	4,800
2	Kota Tanjung Pinang	53	331	1,010	6,313		
XI	DKI JAKARTA	268	1,675	0	0	8	12,800
1	Kota Jakarta Timur					8	12,800
2	Kota Jakarta Barat	140	875				
3	Kota Jakarta Utara	128	800				
XII	JAWA BARAT	920	5,750	14,159	88,494	18	28,800
1	Kab. Bandung	89	556	1,830	11,438		
2	Kab. Bandung Barat	89	556	320	2,000		
3	Kab. Bekasi	140	875	4,243	26,519		
4	Kab. Bogor	70	438	3,761	23,506		
5	Kab. Cianjur			500	3,125		
6	Kab. Garut			800	5,000	6	9,600
7	Kab. Karawang			300	1,875		
8	Kab. Purwakarta			120	750		
9	Kab. Subang			450	2,813		
10	Kab. Sumedang			1,175	7,344		
11	Kota Bandung	214	1,338			6	9,600
12	Kota Bogor			200	1,250		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
13	Kota Ciamhi					6	9,600
14	Kota Cirebon	38	238				
15	Kota Depok	280	1,750				
16	Kota Tasikmalaya			460	2,875		
XIII	JAWA TENGAH	261	1,631	3,560	22,250	3	4,800
1	Kab. Banyumas			200	1,250		
2	Kab. Boyolali			550	3,438		
3	Kab. Cilacap			200	1,250		
4	Kab. Jepara			600	3,750		
5	Kab. Kudus			300	1,875		
6	Kab. Magelang	45	281				
7	Kab. Pati			350	2,188		
8	Kab. Purbalingga			160	1,000		
9	Kab. Rembang			100	625		
10	Kab. Sragen			300	1,875		
11	Kab. Wonogiri			230	1,438		
12	Kota Pekalongan	98	613	300	1,875	3	4,800
13	Kota Semarang	118	738	270	1,688		
XIV	D.I. YOGYAKARTA	0	0	330	2,063	0	0
1	Kab. Bantul			160	1,000		
2	Kab. Kulon Progo			170	1,063		
XV	JAWA TIMUR	209	1,306	19,058	119,113	5	8,000
1	Kab. Bangkalan			200	1,250		
2	Kab. Banyuwangi			1,650	10,313		
3	Kab. Bondowoso			265	1,656		
4	Kab. Gresik			550	3,438		
5	Kab. Jember			470	2,938		
6	Kab. Jombang			100	625		
7	Kab. Lamongan			600	3,750		
8	Kab. Magetan			600	3,750		
9	Kab. Malang			2,580	16,125	5	8,000

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
10	Kab. Mojokerto			1,075	6,719		
11	Kab. Ngawi			100	625		
12	Kab. Pasuruan			250	1,563		
13	Kab. Probolinggo			453	2,831		
14	Kab. Sidoarjo	209	1,306	1,688	10,550		
15	Kab. Situbondo			100	625		
16	Kab. Sumenep			425	2,656		
17	Kota Malang			7,527	47,044		
18	Kota Mojokerto			425	2,656		
XVI	BANTEN	74	463	5,380	33,625	4	6,400
1	Kab. Lebak					4	6,400
2	Kab. Pandeglang			150	938		
3	Kab. Serang			260	1,625		
4	Kab. Tangerang			3,270	20,438		
5	Kota Cilegon			500	3,125		
6	Kota Serang			1,200	7,500		
7	Kota Tangerang Selatan	74	463				
XVII	BALI	26	163	100	625	3	4,800
1	Kab. Jembrana			100	625		
2	Kota Denpasar	26	163			3	4,800
XVIII	NTB	0	0	1,060	6,625	8	12,800
1	Kab. Lombok Tengah			110	688		
2	Kab. Lombok Timur			300	1,875		
3	Kab. Lombok Barat			200	1,250		
4	Kab. Sumbawa			100	625	3	4,800
5	Kota Bima			350	2,188		
6	Kota Mataram					5	8,000
XIX	NTT	98	613	4,128	25,800	3	4,800
1	Kab. Belu					3	4,800
2	Kab. Kupang			280	1,750		
3	Kab. Lembata			400	2,500		
4	Kab. Manggarai Timur			675	4,219		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
5	Kab. Nagekeo			673	4,206		
6	Kab. Sumba Barat			160	1,000		
7	Kab. Sumba Barat Daya			100	625		
8	Kab. Sumba Timur			250	1,563		
9	Kab. Bajawa			250	1,563		
10	Kota Kupang	98	613	1,340	8,375		
XX	KALIMANTAN BARAT	123	769	2,468	15,425	3	4,800
1	Kab. Bengkayang			100	625		
2	Kab. Kubu Raya			653	4,081		
3	Kab. Sanggau	53	331	290	1,813		
4	Kab. Sintang	70	438				
5	Kota Pontianak			1,200	7,500	3	4,800
6	Kota Singkawang			225	1,406		
XXI	KALIMANTAN TENGAH	0	0	1,396	8,725	4	6,400
1	Kab. Barito Selatan			170	1,063		
2	Kab. Barito Timur			100	625		
3	Kab. Kapuas			200	1,250		
4	Kab. Katingan			200	1,250		
5	Kab. Kotawaringin Barat			176	1,100		
6	Kab. Kotawaringin Timur			300	1,875		
7	Kota Palangkaraya			250	1,563	4	6,400
XXII	KALIMANTAN SELATAN	0	0	4,623	28,894	4	6,400
1	Kab. Barito Kuala			1,715	10,719		
2	Kab. Tabalong			150	938		
3	Kab. Tanah Laut			380	2,375		
4	Kota Banjarbaru			800	5,000		
5	Kota Banjarmasin			1,578	9,863	4	6,400
XXIII	KALIMANTAN TIMUR	0	0	9,048	56,550	0	0
1	Kab. Kutai Kertanegara			500	3,125		
2	Kab. Penajam Paser Utara			600	3,750		
3	Kota Balikpapan			5,588	34,925		
4	Kota Bontang			780	4,875		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Satuan	Unit	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
5	Kota Samarinda			1,080	6,750		
6	Kota Tarakan			500	3,125		
XXIV	SULAWESI UTARA	0	0	3,145	19,656	0	0
1	Kab. Bolaang Mangondow Utara			70	438		
2	Kab. Minahasa			330	2,063		
3	Kab. Minahasa Utara			2,145	13,406		
4	Kota Mobago			180	1,125		
5	Kota Manado			420	2,625		
XXV	SULAWESI TENGAH	38	238	1,280	8,000	0	0
1	Kab. Banggai			115	719		
2	Kab. Buol			130	813		
3	Kab. Donggala			100	625		
4	Kab. Morowali			255	1,594		
5	Kab. Sigi			380	2,375		
6	Kota Palu	38	238	300	1,875		
XXVI	SULAWESI SELATAN	476	2,975	3,620	22,625	4	6,400
1	Kab. Gowa			500	3,125		
2	Kab. Jeneponto	196	1,225	320	2,000		
3	Kab. Luwu Timur			1,000	6,250	4	6,400
4	Kab. Maros			300	1,875		
5	Kab. Pinrang			650	4,063		
6	Kab. Sidenreng Rappang			150	938		
7	Kab. Pare-Pare			300	1,875		
8	Kota Makassar	280	1,750	400	2,500		
XXVII	SULAWESI TENGGARA	0	0	1,830	11,438	0	0
1	Kab. Kolaka			250	1,563		
2	Kab. Konawe Selatan			90	563		
3	Kota Bau-Bau			150	938		
4	Kota Kendari			1,340	8,375		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PSU Rumah Sejahtera Susun		PSU Rumah Sejahtera Tapak		PLP2K-BK	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Ha	Rp. Juta
XXVIII	GORONTALO	136	850	2,165	13,531	3	4,800
1	Kab. Boalemo			200	1,250	3	4,800
2	Kab. Bone Bolango			1,200	7,500		
3	Kab. Gorontalo			200	1,250		
4	Kab. Gorontalo Utara			120	750		
5	Kab. Pahuwato			325	2,031		
6	Kota Gorontalo	136	850	120	750		
XXIX	SULAWESI BARAT	0	0	550	3,438	0	0
1	Kab. Mamuju			550	3,438		
XXX	MALUKU	123	769	150	938	3	4,800
1	Kota Ambon	123	769	150	938	3	4,800
XXXI	MALUKU UTARA	0	0	100	625	3	4,800
1	Kab. Halmahera Barat			100	625		
2	Kota Ternate					3	4,800
XXXII	PAPUA BARAT	0	0	0	0	0	0
XXXIII	PAPUA	0	0	2,075	12,969	0	0
1	Kab. Mimika			1,200	7,500		
2	Kab. Muara Tami, Jayapura			575	3,594		
3	Kota Jayapura			300	1,875		
Indonesia		4,046	25,288	112,964	706,025	100	160,000

Sumber : Deputy Bidang Pengembangan Kawasan

B. DATA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2011

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
I	NAD	250	2.500	225	2.025	475	4.525
1	Kab. Aceh Besar	100	1.000	75	675	175	1.675
2	Kab. Simeuleu	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Bireuen	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Pidie	50	500	50	450	100	950
II	SUMATERA UTARA	300	3.000	250	2.250	550	5.250
1	Kab. Samosir	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Serdang Bedagai	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Langkat	100	1.000	50	450	150	1.450
4	Kota Tanjung Balai	75	750	25	225	100	975
5	Kab. Asahan	0	0	50	450	50	450
6	Kab. Dairi	25	250	25	225	50	475
III	BENGKULU	125	1.250	125	1.125	250	2.375
1	Kab. Kaur	50	500	50	450	100	950
2	Kota Bengkulu	75	750	75	675	150	1.425
IV	JAMBI	100	1.000	100	900	200	1.900
1	Kota Jambi	75	750	75	675	150	1.425
2	Kab. Kerinci	25	250	25	225	50	475
V	RIAU	50	500	150	1.350	200	1.850
1	Kota Dumai	25	250	125	1.125	150	1.375
2	Kota Pekanbaru	25	250	25	225	50	475
VI	SUMATERA BARAT	475	4.750	475	4.275	950	9.025
1	Kab. Dharmasraya	75	750	75	675	150	1.425
2	Kab. Solok	75	750	75	675	150	1.425
3	Kab. Kepulauan Mentawai	50	500	50	450	100	950
4	Kota Padang	50	500	50	450	100	950

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
5	Kab. Agam	50	500	0	0	50	500
6	Kota Bukittinggi	100	1.000	150	1.350	250	2.350
7	Kota Pariaman	25	250	25	225	50	475
8	Kota Payakumbuh	50	500	50	450	100	950
VII	SUMATERA SELATAN	150	1.500	150	1.350	300	2.850
1	Kab. Banyuasin	50	500	50	450	100	950
2	Kota Pagar Alam	100	1.000	100	900	200	1.900
VIII	LAMPUNG	575	5.750	525	4.725	1.100	10.475
1	Kab. Lampung Barat	75	750	50	450	125	1.200
2	Kab. Tanggamus	50	500	75	675	125	1.175
3	Kab. Lampung Tengah	100	1.000	75	675	175	1.675
4	Kab. Lampung Timur	100	1.000	75	675	175	1.675
5	Kab. Lampung Utara	75	750	100	900	175	1.650
6	Kab. Way Kanan	100	1.000	75	675	175	1.675
7	Kota Bandar Lampung	25	250	25	225	50	475
8	Kab. Mesuji	25	250	25	225	50	475
9	Kab. Pesawaran	25	250	25	225	50	475
IX	KEP. BANGKA BELITUNG	100	1.000	100	900	200	1.900
1	Kab. Bangka Selatan	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Belitung Timur	50	500	50	450	100	950
X	KEP. RIAU	600	6.000	600	5.400	1.200	11.400
1	Kab. Bintan	100	1.000	100	900	200	1.900
2	Kab. Karimun	100	1.000	100	900	200	1.900
3	Kab. Kepulauan Anambas	100	1.000	100	900	200	1.900
4	Kab. Lingga	100	1.000	100	900	200	1.900
5	Kota Batam	100	1.000	100	900	200	1.900
6	Kota Tanjung Pinang	100	1.000	100	900	200	1.900

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
XI	BANTEN	300	3.000	300	2.700	600	5.700
1	Kab. Lebak	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Pandeglang	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Serang	75	750	75	675	150	1.425
4	Kab. Tangerang	75	750	75	675	150	1.425
5	Kota Serang	50	500	50	450	100	950
XII	JAWA BARAT	1.075	10.750	1.050	9.450	2.125	20.200
1	Kab. Bandung Barat	100	1.000	100	900	200	1.900
2	Kab. Ciamis	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Cianjur	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Garut	75	750	75	675	150	1.425
5	Kab. Tasikmalaya	75	750	75	675	150	1.425
14	Kab. Kuningan	50	500	50	450	100	950
15	Kab. Majalengka	75	750	75	675	150	1.425
8	Kab. Subang	75	750	50	450	125	1.200
9	Kab. Sumedang	50	500	75	675	125	1.175
10	Kab. Sukabumi	75	750	50	450	125	1.200
11	Kab. Cirebon	75	750	100	900	175	1.650
12	Kota Cirebon	75	750	75	675	150	1.425
13	Kab. Indramayu	75	750	50	450	125	1.200
14	Kota Sukabumi	75	750	75	675	150	1.425
15	Kota Ciamhi	50	500	50	450	100	950
16	Kab. Purwakarta	50	500	50	450	100	950
XIII	DAERAH KHUSUS IBUKOTA	0	0	50	450	50	450
1	Kab. Administrasi Kep. Seribu			50	450	50	450
XIV	JAWA TENGAH	1.425	14.250	1.450	13.050	2.875	27.300
1	Kab. Banjarnegara	50	500	25	225	75	725
2	Kab. Batang	75	750	50	450	125	1.200
3	Kab. Pekalongan	50	500	75	675	125	1.175
4	Kab. Pemalang	75	750	50	450	125	1.200

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
5	Kab. Blora	125	1.250	125	1.125	250	2.375
6	Kab. Boyolali	75	750	125	1.125	200	1.875
7	Kab. Klaten	100	1.000	100	900	200	1.900
8	Kab. Sukoharjo	100	1.000	100	900	200	1.900
9	Kab. Jepara	50	500	25	225	75	725
10	Kab. Kebumen	25	250	50	450	75	700
11	Kab. Magelang	75	750	50	450	125	1.200
12	Kab. Purworejo	75	750	125	1.125	200	1.875
13	Kab. Temanggung	125	1.250	125	1.125	250	2.375
14	Kab. Wonosobo	75	750	75	675	150	1.425
15	Kab. Wonogiri	50	500	75	675	125	1.175
16	Kab. Pati	50	500	50	450	100	950
17	Kab. Purbalingga	50	500	25	225	75	725
18	Kab. Semarang	25	250	50	450	75	700
19	Kab. Tegal	50	500	25	225	75	725
20	Kota Pekalongan	0	0	50	450	50	450
21	Kab. Karanganyar	25	250	25	225	50	475
22	Kota Magelang	25	250	25	225	50	475
23	Kab. Demak	25	250	25	225	50	475
24	Kota Semarang	50	500	0	0	50	500
XV	JAWA TIMUR	1.225	12.250	1.225	11.025	2.450	23.275
1	Kab. Banyuwangi	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Jember	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Ngawi	75	750	75	675	150	1.425
4	Kab. Jombang	100	1.000	75	675	175	1.675
5	Kab. Trenggalek	50	500	50	450	100	950
6	Kab. Mojokerto	50	500	75	675	125	1.175
7	Kab. Nganjuk	50	500	50	450	100	950
8	Kab. Sumenep	75	750	75	675	150	1.425
9	Kab. Pamekasan	75	750	75	675	150	1.425

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
10	Kab. Sampang	75	750	75	675	150	1.425
11	Kab. Madiun	50	500	50	450	100	950
12	Kab. Magetan	50	500	50	450	100	950
13	Kab. Malang	100	1.000	100	900	200	1.900
14	Kota Probolinggo	50	500	50	450	100	950
15	Kab. Ponorogo	50	500	50	450	100	950
16	Kab. Pacitan	50	500	50	450	100	950
17	Kota Surabaya	150	1.500	150	1.350	300	2.850
18	Kota Malang	50	500	50	450	100	950
19	Kota Madiun	25	250	25	225	50	475
XVI	D.I. YOGYAKARTA	150	1.500	150	1.350	300	2.850
1	Kab. Bantul	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Kulon Progo	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Sleman	50	500	50	450	100	950
XVII	BALI	75	750	75	675	150	1.425
1	Kab. Karangasem	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Tabanan	25	250	25	225	50	475
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT	450	4.500	400	3.600	850	8.100
1	Kab. Bima	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Dompu	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Lombok Barat	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Lombok Timur	50	500	50	450	100	950
5	Kab. Sumbawa	50	500	50	450	100	950
6	Kota Mataram	50	500	50	450	100	950
7	Kab. Lombok Utara	150	1.500	100	900	250	2.400
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR	1.475	14.750	1.475	13.275	2.950	28.025
1	Kab. Alor	100	1.000	75	675	175	1.675
2	Kab. Ende	75	750	100	900	175	1.650
3	Kab. Flores Timur	100	1.000	75	675	175	1.675
4	Kab. Manggarai	75	750	100	900	175	1.650

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
5	Kab. Manggarai Timur	75	750	75	675	150	1.425
6	Kab. Ngada	75	750	75	675	150	1.425
7	Kab. Belu	100	1.000	100	900	200	1.900
8	Kab. Kupang	100	1.000	100	900	200	1.900
9	Kab. Rote Ndao	100	1.000	100	900	200	1.900
10	Kab. Sumba Barat	100	1.000	100	900	200	1.900
11	Kab. Sumba Barat Daya	75	750	75	675	150	1.425
12	Kab. Sumba Tengah	75	750	75	675	150	1.425
13	Kab. Sumba Timur	75	750	75	675	150	1.425
14	Kab. Timor Tengah Selatan	75	750	75	675	150	1.425
15	Kab. Timor Tengah Utara	75	750	75	675	150	1.425
16	Kota Kupang	75	750	75	675	150	1.425
17	Kab. Lembata	25	250	25	225	50	475
18	Kab. Manggarai Barat	25	250	25	225	50	475
19	Kab. Sikka	25	250	25	225	50	475
20	Kab. Nagekeo	25	250	25	225	50	475
21	Kab. Sabu Raijua	25	250	25	225	50	475
XX	KALIMANTAN BARAT	300	3.000	300	2.700	600	5.700
1	Kab. Kapuas Hulu	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Landak	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Pontianak	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Kubu Raya	25	250	25	225	50	475
5	Kota Pontianak	25	250	25	225	50	475
6	Kota Singkawang	25	250	25	225	50	475
7	Kab. Sanggau	25	250	25	225	50	475
8	Kab. Melawi	50	500	50	450	100	950
XXI	KALIMANTAN SELATAN	75	750	0	0	75	750
1	Kota Banjarmasin	75	750	0	0	75	750
XXII	KALIMANTAN TENGAH	25	250	75	675	100	925
1	Kab. Kapuas	25	250	75	675	100	925

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
XXIII	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	0	0
0	-	0	0	0	0	0	0
XXIV	GORONTALO	325	3.250	325	2.925	650	6.175
1	Kab. Boalemo	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Bone Bolango	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Gorontalo	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Gorontalo Utara	50	500	50	450	100	950
5	Kab. Pahuwato	50	500	50	450	100	950
6	Kota Gorontalo	75	750	75	675	150	1.425
XXV	SULAWESI SELATAN	650	6.500	650	5.850	1.300	12.350
1	Kab. Bantaeng	75	750	75	675	150	1.425
2	Kab. Barru	75	750	75	675	150	1.425
3	Kab. Bulukumba	75	750	75	675	150	1.425
4	Kab. Maros	75	750	75	675	150	1.425
5	Kab. Gowa	50	500	50	450	100	950
6	Kab. Kepulauan Selayar	50	500	50	450	100	950
7	Kab. Takalar	50	500	50	450	100	950
8	Kab. Tana Toraja	50	500	50	450	100	950
9	Kota Pare-Pare	75	750	75	675	150	1.425
10	Kab. Wajo	75	750	75	675	150	1.425
XXVI	SULAWESI TENGGARA	500	5.000	500	4.500	1.000	9.500
1	Kab. Bombana	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Buton	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Buton Utara	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Kolaka	50	500	50	450	100	950
5	Kab. Kolaka Utara	50	500	50	450	100	950
6	Kab. Wakatobi	50	500	50	450	100	950
7	Kab. Konawe	50	500	50	450	100	950

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
8	Kab. Muna	50	500	50	450	100	950
9	Kab. Konawe Selatan	50	500	50	450	100	950
10	Kota Bau-Bau	50	500	50	450	100	950
XXVII	SULAWESI TENGAH	525	5.250	525	4.725	1.050	9.975
1	Kab. Donggala	75	750	75	675	150	1.425
2	Kab. Parigi Moutong (Parimo)	75	750	75	675	150	1.425
3	Kab. Buol	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Morowali	50	500	50	450	100	950
5	Kab. Poso	50	500	50	450	100	950
6	Kab. Tojo Una Una	50	500	50	450	100	950
7	Kab. Toli-Toli	75	750	75	675	150	1.425
8	Kota Palu	100	1.000	100	900	200	1.900
XXVIII	SULAWESI UTARA	375	3.750	425	3.825	800	7.575
1	Kab. Kepulauan Sangihe	100	1.000	100	900	200	1.900
2	Kab. Minahasa Tenggara	100	1.000	100	900	200	1.900
3	Kab. Minahasa Utara	50	500	50	450	100	950
4	Kota Bitung	50	500	50	450	100	950
5	Kota Kotamobagu	25	250	25	225	50	475
6	Kab. Bolaang Mongondow Timur	25	250	25	225	50	475
7	Kab. Bolaang Mongondow	25	250	75	675	100	925
XXIX	SULAWESI BARAT	100	1.000	100	900	200	1.900
1	Kab. Polewali Mandar	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Mamasa	50	500	50	450	100	950
XXX	MALUKU	225	2.250	225	2.025	450	4.275
1	Kab. Buru	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Kepulauan Aru	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Maluku Tengah	50	500	50	450	100	950
4	Kota Ambon	75	750	75	675	150	1.425

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	BSP2S (PB)		PKP		Total	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
XXXI	MALUKU UTARA	75	750	75	675	150	1.425
1	Kab. Halmahera Utara	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Halmahera Selatan	25	250	25	225	50	475
XXXII	PAPUA	225	2.250	225	2.025	450	4.275
1	Kab. Biak Numfor	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Kepulauan Yapen Waropen	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Waropen	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Jayapura	25	250	25	225	50	475
5	Kab. Jayawijaya	50	500	50	450	100	950
XXXIII	PAPUA BARAT	200	2.000	200	1.800	400	3.800
1	Kab. Raja Ampat	50	500	50	450	100	950
2	Kab. Sorong Selatan	50	500	50	450	100	950
3	Kab. Teluk Wondama	50	500	50	450	100	950
4	Kab. Sorong	25	250	25	225	50	475
5	Kota Sorong	25	250	25	225	50	475
Jumlah		12.500	125.000	12.500	112.500	25.000	237.500

Sumber : Lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembatalan dan Penggantian Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2011

C. DATA LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL TAHUN 2011

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Pembangunan Rusunawa				Rumah Khusus	
		Luncuran 2010-2011		Pembangunan Baru			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Satuan	TB	Rp. Juta	TB	Rp. Juta	Unit
I	NAD	1.0	11,916	4.0	33,566	0	0
1	Kab. Aceh Besar			2.0	16,783		
2	Kab. Aceh Utara			0.5	4,196		
3	Kota Banda Aceh	1.0	11,916	1.5	12,587		
II	SUMATERA UTARA	3.5	41,708	1.5	12,587	40	1,893
1	Kab. Labuhan Batu	0.5	5,958				
2	Kab. Langkat			0.5	4,196	40	1,893
3	Kab. Mandailing Natal			0.5	4,196		
4	Kab. Simalungun			0.5	4,196		
5	Kota Medan	3.0	35,749				
III	SUMATERA BARAT	0.0	0	2.0	16,783	0	0
1	Kota Bukittinggi			2.0	16,783		
IV	RIAU	2.0	23,833	1.5	12,587	100	4,733
1	Kab. Indragiri Hilir					50	2,367
2	Kab. Kampar			0.5	4,196		
3	Kab. Rokan Hilir					50	2,367
4	Kota Pekanbaru	2.0	23,833	1.0	8,392		
V	JAMBI	0.0	0	3.0	25,175	30	1,420
1	Kab. Merangin			1.0	8,392		
2	Kab. Tanjung Jabung Timur					30	1,420
3	Kota Jambi			2.0	16,783		
VI	SUMATERA SELATAN	0.0	0	2.5	20,979	0	0
1	Kab. Ogan Ilir			0.5	4,196		
2	Kota Palembang			2.0	16,783		
VII	BENGKULU	0.0	0	0.0	0	0	0
VIII	LAMPUNG	2.0	23,833	2.0	16,783	0	0
1	Kota Bandar Lampung	2.0	23,833	2.0	16,783		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Pembangunan Rusunawa				Rumah Khusus	
		Luncuran 2010-2011		Pembangunan Baru			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Satuan	TB	Rp. Juta	TB	Rp. Juta	Unit
IX	KEP. BANGKA BELITUNG	0.0	0	1.0	8,392	0	0
I	Kab. Bangka			1.0	8,392		
X	KEP. RIAU	5.0	59,582	6.0	50,350	50	2,367
I	Kab. Bintan			1.0	8,392		
2	Kab. Natuna					50	2,367
3	Kab. Tanjung Pinang			1.0	8,392		
4	Kota Batam	4.0	47,666	3.0	25,175		
5	Kota Tanjung Pinang	1.0	11,916	1.0	8,392		
XI	DKI JAKARTA	3.0	35,749	7.0	58,741	0	0
I	Kota Jakarta Selatan			5.0	41,958		
2	Kota Jakarta Timur	1.0	11,916	2.0	16,783		
3	Kota Jakarta Barat	2.0	23,833				
XII	JAWA BARAT	13.0	154,914	24.5	205,594	0	0
I	Kab. Bandung	2.0	23,833	4.0	33,566		
2	Kab. Bogor	4.0	47,666	2.0	16,783		
3	Kab. Ciamis			0.5	4,196		
4	Kab. Cimahi			1.0	8,392		
5	Kab. Cirebon			1.0	8,392		
6	Kab. Garut			0.5	4,196		
7	Kab. Indramayu			1.0	8,392		
8	Kab. Tasikmalaya			1.5	12,587		
9	Kota Bandung	2.0	23,833	4.0	33,566		
10	Kota Bekasi	1.0	11,916				
11	Kota Bogor			4.0	33,566		
12	Kota Ciamhi			2.0	16,783		
13	Kota Cirebon			1.0	8,392		
14	Kota Depok	4.0	47,666	2.0	16,783		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Pembangunan Rusunawa				Rumah Khusus	
		Luncuran 2010-2011		Pembangunan Baru			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Satuan	TB	Rp. Juta	TB	Rp. Juta	Unit
XIII	JAWA TENGAH	4.0	47,666	14.5	121,678	0	0
1	Kab. Brebes			0.5	4,196		
2	Kab. Kebumen			0.5	4,196		
3	Kab. Magelang	1.0	11,916	1.0	8,392		
4	Kab. Pati	1.0	11,916				
5	Kab. Purbalingga			1.0	8,392		
6	Kab. Purworejo			1.0	8,392		
7	Kab. Rembang	1.0	11,916				
8	Kab. Surakarta			1.0	8,392		
9	Kab. Tegal			1.0	8,392		
10	Kota Magelang			1.0	8,392		
11	Kota Semarang	1.0	11,916	6.0	50,350		
12	Kota Solo			1.0	8,392		
13	Kota Jepara			0.5	4,196		
XIV	D.I. YOGYAKARTA	2.0	23,833	1.0	8,392	0	0
1	Kab. Sleman	1.0	11,916	1.0	8,392		
2	Kota Yogyakarta	1.0	11,916				
XV	JAWA TIMUR	5.5	65,540	23.5	197,203	0	0
1	Kab. Banyuwangi			1.0	8,392		
2	Kab. Jember	0.5	5,958	2.0	16,783		
3	Kab. Jombang			1.0	8,392		
4	Kab. Madiun	1.0	11,916				
5	Kab. Madura			0.5	4,196		
6	Kab. Malang			2.0	16,783		
7	Kab. Ngawi			1.0	8,392		
8	Kab. Pacitan	0.5	5,958				
9	Kab. Pamekasan			1.0	8,392		
10	Kab. Pamekasan Madura			1.0	8,392		
11	Kab. Pasuruan			2.0	16,783		

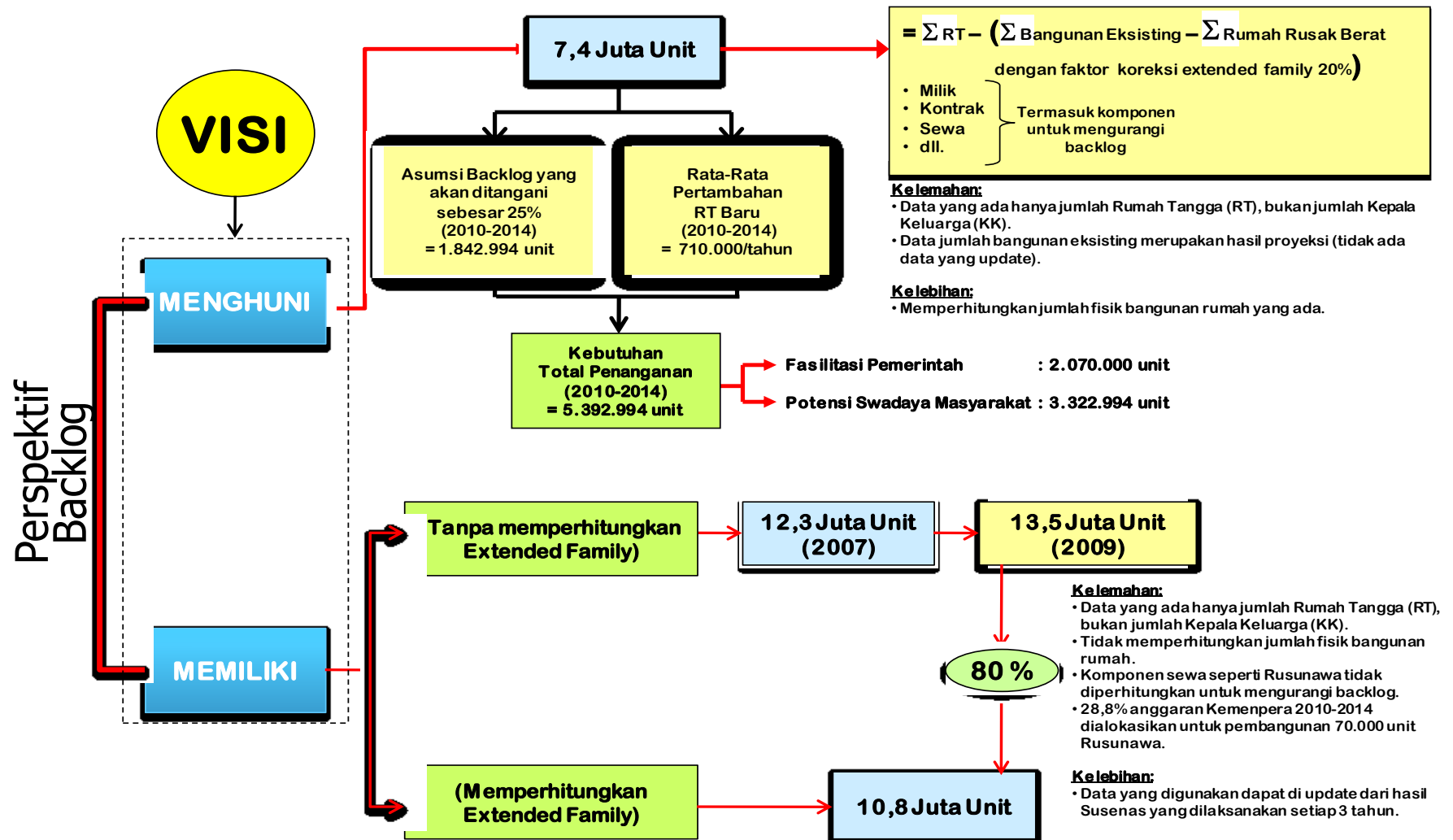
NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Pembangunan Rusunawa				Rumah Khusus	
		Luncuran 2010-2011		Pembangunan Baru			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Satuan	TB	Rp. Juta	TB	Rp. Juta	Unit
12	Kab. Ponorogo	0.5	5,958				
13	Kab. Probolinggo			0.5	4,196		
14	Kab. Sidoarjo	1.0	11,916	1.0	8,392		
15	Kab. Situbondo			0.5	4,196		
16	Kota Madiun			1.0	8,392		
17	Kota Malang	2.0	23,833	5.0	41,958		
18	Kota Surabaya			4.0	33,566		
XVI	BANTEN	0.0	0	5.0	41,958	0	0
1	Kab. Serang			1.0	8,392		
2	Kab. Tangerang			1.0	8,392		
3	Kota Serang			1.0	8,392		
4	Kota Tangerang Selatan			2.0	16,783		
XVII	BALI	0.0	0	2.5	20,979	0	0
1	Kab. Tabanan			1.0	8,392		
2	Kota Denpasar			1.5	12,587		
XVIII	NTB	0.0	0	1.5	12,587	0	0
1	Kab. Lombok Tengah			0.5	4,196		
2	Kota Mataram			1.0	8,392		
XIX	NTT	0.0	0	3.0	25,175	150	7,100
1	Kab. Alor					30	1,420
2	Kab. Belu					80	3,787
3	Kab. Timor Tengah Utara					40	1,893
4	Kota Kupang			3.0	25,175		
XX	KALIMANTAN BARAT	2.0	23,833	2.0	16,783	0	0
1	Kab. Singkawang			1.0	8,392		
2	Kab. Sintang	1.0	11,916				
3	Kota Pontianak	1.0	11,916				
4	Kota Sintang			1.0	8,392		

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Pembangunan Rusunawa				Rumah Khusus	
		Luncuran 2010-2011		Pembangunan Baru			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Satuan	TB	Rp. Juta	TB	Rp. Juta	Unit
XXI	KALIMANTAN TENGAH	0.0	0	0.5	4,196	0	0
I	Kab. Kapuas			0.5	4,196		
XXII	KALIMANTAN SELATAN	1.0	11,916	1.5	12,587	0	0
I	Kab. Amuntai	1.0	11,916				
2	Kab. Banjar			1.0	8,392		
3	Kab. Hulu Sungai Tengah			0.5	4,196		
XXIII	KALIMANTAN TIMUR	0.0	0	2.0	16,783	0	0
I	Kota Balikpapan			2.0	16,783		
XXIV	SULAWESI UTARA	0.0	0	2.0	16,783	30	1,420
I	Kab. Bolaang Mangondow Timur					30	1,420
2	Kota Mobago			1.0	8,392		
3	Kota Manado			1.0	8,392		
XXV	SULAWESI TENGAH	0.0	0	1.0	8,392	30	1,420
I	Kota Palu			1.0	8,392	30	1,420
XXVI	SULAWESI SELATAN	1.0	11,916	8.5	71,329	30	1,420
I	Kab. Bulukumba					30	1,420
2	Kab. Luwu Timur			1.0	8,392		
3	Kab. Maros			2.0	16,783		
4	Kab. Pangkajene dan Kepulauan			1.0	8,392		
5	Kota Makassar	1.0	11,916	4.0	33,566		
6	Kota Pare-Pare			0.5	4,196		
XXVII	SULAWESI TENGGARA	0.0	0	1.0	8,392	0	0
I	Kota Kendari			1.0	8,392		
XXVIII	GORONTALO	0.0	0	1.0	8,392	70	3,313
I	Kab. Bone Bolango					40	1,893
2	Kab. Gorontalo			1.0	8,392		
3	Kab. Pahuwato					30	1,420

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Pembangunan Rusunawa				Rumah Khusus	
		Luncuran 2010-2011		Pembangunan Baru			
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Satuan	TB	Rp. Juta	TB	Rp. Juta	Unit	Rp. Juta
XXIX	SULAWESI BARAT	0.0	0	1.0	8,392	0	0
1	Kab. Mamuju			1.0	8,392		
XXX	MALUKU	2.0	23,833	3.0	25,175	50	2,367
1	Kab. Maluku Tengah			0.5	4,196		
2	Kab. Maluku Tenggara Barat					50	2,367
3	Kota Ambon	2.0	23,833	2.5	20,979		
XXXI	MALUKU UTARA	0.0	0	7.0	58,741	0	0
1	Kota Ternate			4.0	33,566		
2	Kota Tidore Kepulauan			3.0	25,175		
XXXII	PAPUA BARAT	2.0	23,833	1.0	8,392	70	3,313
1	Kab. Manokwari	2.0	23,833				
2	Kab. Sorong					70	3,313
3	Kota Sorong			1.0	8,392		
XXXIII	PAPUA	0.0	0	5.5	46,154	100	4,733
1	Kab. Keerom					50	2,367
2	Kab. Merauke			1.0	8,392		
3	Kab. Muara Tami, Jayapura					50	2,367
4	Kota Jayapura			4.5	37,762		
Indonesia		49.0	583,906	143.0	1,200,000	750	35,500

Sumber : Deputy Bidang Perumahan Formal

XXXIV. BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009



Sumber : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

BACKLOG PER PROVINSI

Provinsi/Kabupaten/Kota	Backlog Tahun 2009
NAD	662.167
SUMATERA UTARA	337.424
SUMATERA BARAT	129.384
RIAU	151.939
JAMBI	50.848
SUMATERA SELATAN	264.932
BENGKULU	31.182
LAMPUNG	96.506
KEP. BANGKA BELITUNG	49.111
KEP. RIAU	90.655
DKI JAKARTA	289.318
JAWA BARAT	1.495.513
JAWA TENGAH	817.106
DI YOGYAKARTA	170.101
JAWA TIMUR	960.733
BANTEN	288.656
BALI	65.664

Provinsi/Kabupaten/Kota	Backlog Tahun 2009
NTB	148.243
NTT	76.885
KALIMANTAN BARAT	147.855
KALIMANTAN TENGAH	67.668
KALIMANTAN SELATAN	117.472
KALIMANTAN TIMUR	65.345
SULAWESI UTARA	137.930
SULAWESI TENGAH	66.028
SULAWESI SELATAN	203.714
SULAWESI TENGGARA	58.397
GORONTALO	72.079
SULAWESI BARAT	21.409
MALUKU	44.931
MALUKU UTARA	52.554
PAPUA BARAT	51.261
PAPUA	88.966
Indonesia	7.371.976

Sumber : Data dari BPS diolah oleh Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat